

SEWINDU PEMBELAJARAN AL-ZAYTUN

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 43 TAHUN III ★ 20 JULI - 02 AGUSTUS 2007

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



BERCERAI KITA RUNTUH

ISSN 1907-977X



Beras Basmati Al-Zaytun

Introduksi India

Beras Basmati adalah dari bangsa padi asal India dan Pakistan. Basmati dalam bahasa Urdu/Hindi berarti harum dan wangi, bentuk bulirnya panjang .

Beras Basmati yang harum terkenal di seluruh dunia, banyak orang ingin menanamnya. Harganya pun menawan tinggi. Kini di Indonesia telah dibudidayakan, produksinya sangat baik. Tepatnya di Al-Zaytun, sejak tahun 2005 telah ditanam ratusan hektar, produksinya cukup memuaskan.

Beras Basmati produk Al-Zaytun memiliki panjang tidak kurang dari 7 mm dengan tampilan putih bersinar.

Indonesia mengimport banyak Beras Basmati dari India dan Pakistan untuk memenuhi konsumen penggemarnya.

Beras Basmati produk Al-Zaytun diharapkan dapat mengimbangi import yang telah berjalan.

Bagi penggemar Nasi Briyani, Nasi Kabuli dll, kiranya tidak lagi bergantung Beras Basmati import, Al-Zaytun siap memasok.

Tentunya harga pasti bersaing, termasuk citarasanya.

Bumi Indonesia memberi citarasa Beras Basmati yang spesifik.

Silahkan mencoba Beras Basmati produk Al-Zaytun.

Syukria.

Nutrition Highlights *)

Basmati rice, 1 cup (200g) (cooked)

Calories : 205

Protein : 4.2g

Carbohydrate : 44.5g

Total Fat : 0.44g

Fiber : 0.63g

***Good source of :**

Iron : 1.9mg

Selenium : 11.8mcg

Thiamine : 0.26mg

Niacin : 2.3mg

*) Sumber : The Truestar Health Encyclopedia



Sampul/Illustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 43/Th.III/ 20 Juli - 02 Agustus 2007

DARI REDAKSI 4
SURAT KOMENTAR 5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
BERITA TERDEPAN 12
VISI BERITA 13

BERITA UTAMA

**BIBIT LAMA SEPARATISME
KEMBALI ANCAM KEUTUHAN NKRI**

Tiga rentetan peristiwa politik terbaru yang terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh, sangat mustahil untuk tidak dimaknai sebagai upaya pemunculan kembali bibit-bibit lama separatisme. Bila tak ditangani secara baik, bisa-bisa bibit lama ini akan mengancam keutuhan NKRI. 14



Dari Indonesia Sampai Eritrea 18
 Beberapa Gerakan Separatis di Indonesia 18
 Pentingnya Pendekatan dan Pemberdayaan 19
 Kelalaian di Kudamati 20
 Pangdam Pattimura Akhirnya Diganti 20
 Kasus Kelalaian Pasukan Pengamanan 19
 Tangan Asing di Bumi Pertiwi 22
 Papua Perlu Pendekatan Social Welfare 23

BERITA POLITIK
 BK-DPR Tebang Pilih? 25

BERITA KHAS
 Setelah Presiden Menangis 26
 Kawasan Lumpur Lapindo Jadi Tambak 27

BERITA WAWANCARA
 Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah 28

BERITA NASIONAL
 Maut Mengintai di Jalan Raya 30

BERITA EKONOMI
 Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 31

BERITA MEDIA
 RUU Pemasung Kebebasan Pers 32



LINTAS TAJUK
 Terobosan Baru Depkeu 46

BERITA HANKAM
 TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura 47

BERITA HUKUM
 Surat Grasi Kepada Presiden 48
 Hadiah Untuk Pak Menteri 49
 Kontroversi Sebuah Pembebasan 49

BERITA TOKOH
 Suryadharna Ali 50
 Zaenal Ma'arif 50

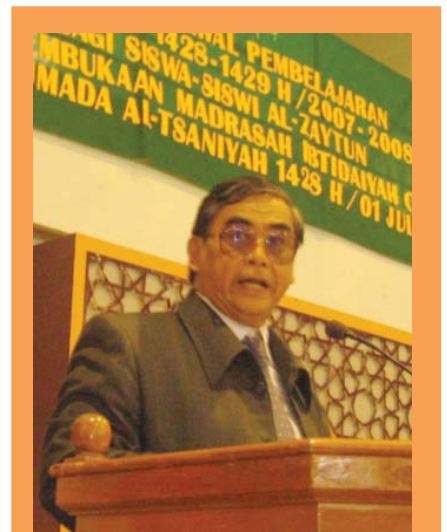
BERITA DAERAH
 Tampilkan Sosok Otda yang Ideal 51



Dengan Pancasila Kita Jaga Kebhinekaan 52
 Kabupaten Kuteng Ditentang 54
 GPSI Dipimpin Putera Daerah 54

BERITA IPTEK
 Buat yang Berkantong Tebal 55
 Pengguna Domain .id Wajib Daftar Ulang 55

BERITA BUDAYA
 Keajaiban Dunia yang Terlupakan 56



**LENTERA
SEWINDU PEMBELAJARAN
AL-ZAYTUN**

Ahad 1 Juli 2007, Al-Zaytun memulai pembelajaran tahun ajaran 2007-2008. Pada hari bersejarah sewindu pembelajaran (1 Juli 1999 - 1 Juli 2007), itu Al-Zaytun mempersembahkan hadiah emas, antara lain mengangkat martabat dan harkat daerah kabupaten Indramayu dari segi pendidikan.....34

BERITA MANCANEGERA
 Pakistan Masih Terkoyak 58
 Hukuman Mati Bagi "The Benghazi Six" 58
 Konser Live Earth di 7 Benua 58
 DPR AS Berusaha Akhiri Perang Irak 59

BERITA PUBLIK
 Optimalkan Pelayanan Menuju 60



Merevitalisasi Infrastruktur 62

BERITA FEATURE
 Sahabat Para Tentara di Dunia 63

BERITA OLAHRAGA
 Timnas Bangkitkan Nasionalisme 64



Sampras dan Sanchez-Vicario Masuk 64
 Brasil Bersinar 65

BERITA KESEHATAN
 Antara Kura-kura dan Salmonella 66
 Anggaran Cekak Untuk Si Miskin 66

Pemimpin Umum:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:

MYR Agung Sidayu

Imam Supriyanto

Dendy Hendrias

Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):

Mangatur Lorieclide Paniroy (Wakil Redaktur Eksekutif)

Sekretaris Redaksi

Retno Handayani

Redaktur:

Suryo Pranoto

Haposan Tampubolon

Staf Redaksi:

Samsuri

Nawawi

Ikhwani Triatmo

Sarjiman

Doan Adikara Pudan

Amron Ritonga

Wartawan Foto:

Wilson Edward

Redaktur Bahasa dan Pracetak

Marjuka Situmorang

Mangatur Lorieclide Paniroy

Desainer:

ESERO Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:

Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)

Bontor Simanullang, Jawa Barat: Ade Wiharyana,

Bernard Sihite, Prana Citra, Tarakan: Sudirman

Leonard Pohan

Penerbit:

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia

dan PT Citra Prinsip Publikasi Indoadprint

Komisaris:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:

Imam Supriyanto

Herni Dewi Farida

Keuangan dan Umum:

Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:

Abdul Halim

Marjuka Situmorang

Harga:

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:

PT Gramedia

(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jalan Cucakrawa No.14A

Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan

Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736

Fax. 83787235

E-mail:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

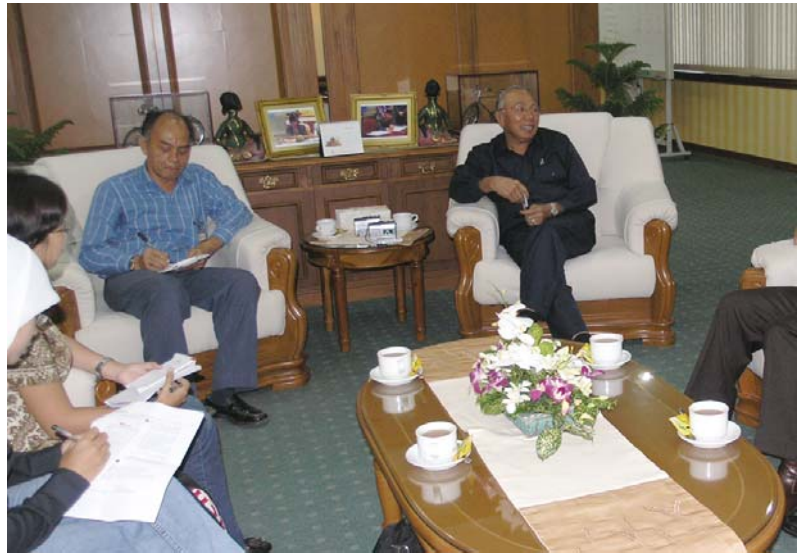


foto: berindo wilson

Wawancara Berita Indonesia dengan Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Kita sangat terusik dengan insiden di Ambon yang dilakukan oleh para penari Cakalele dengan mengibarkan bendera RMS, lantas di Abepura berlangsung pengibaran bendera Bintang Kejora, hingga di Aceh muncul simbol-simbol GAM dalam wujud baru Partai GAM. Tiga peristiwa ini kembali mencuatkan isu gerakan separatisme yang selalu menjadi kekhawatiran bangsa ini, sebab bisa merusak wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita menyadari bahwa separatisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dipicu oleh adanya pihak-pihak yang merasakan ketidakadilan sosial di daerahnya. Sayangnya, ketidakadilan ini membuat NKRI yang dipersalahkan, padahal rezim/penguasalah yang harus diminta pertanggungjawabannya.

Oleh sebab itu, "Bercerai Kita Runtuh" menjadi tema *Berita Utama* kali ini, untuk mengingatkan kita bahwa ide separatisme harus dibuang jauh-jauh. Indonesia yang kuat mengharuskan semua elemen bangsa bersatu dalam bingkai NKRI.

Sidang Pembaca yang budiman,

Setelah Presiden menangis, proses pergantian kerugian warga korban lumpur Lapindo mulai bergerak. Lapindo selama ini menjadi batu sandungan pemerintah. Persoalannya memang sangat kompleks, menyangkut masalah kemanusiaan.

Jika kita tidak lagi menghargai korban-korban semburan lumpur Lapindo, siapa lagikah gerangan yang mau menempatkan mereka dalam posisi yang paling terhormat sebagai manusia? Kami menempatkannya dalam *Berita Khas*, disertai wawancara kami dengan Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah.

Majalah kesayangan Anda ini semakin memperoleh tempat di hati pembaca, khususnya mereka yang bermukim di daerah. Berita-berita yang dipasok oleh para koresponden Berita Indonesia di daerah rutin menghadirkan sajian terbaiknya. Seperti dari Bandung, Purwakarta, Medan, dan Tarakan di Kalimantan Timur.

Rubrik-rubrik lain tetap hadir dengan sajian khasnya masing-masing. Yang tak kalah menarik adalah *Lentera*, yang kali ini bercerita tentang sewindu proses pembelajaran di Al-Zaytun, pembukaan awal pembelajaran baru Al-Zaytun, dan bagaimana Al-Zaytun membangun monumen millenium ketiga. Selamat menikmati, mudah-mudahan Anda semua berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http : http://www.beritaindonesia.co.id/surat_pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jakarta 12840

Telp. (021) 70930474, 8293113
(021) 83701736
Fax. (021) 83787235

Pemerintah Tidak Perhatikan Papua

Kembalinya Papua ke NKRI bukanlah sesuatu yang berlangsung mulus. Banyak liku-liku hingga harus sampai ke PBB. Namun ketika Papua sudah jadi bagian dari NKRI ternyata masih saja ada ganjalan alias dituding separatisme. Naik turunnya bendera Bintang Kejora bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tetapi terbitnya buku-buku tentang Papua semakin marak mulai dari pembunuhan Theys Hiyo Elluay sampai hasil penelitian Prof Dr Droglefer di Belanda tentang Pepera yang tidak demokratis. Tentunya menjadi pertanyaan bagi generasi muda Papua sendiri untuk

mencari kebenaran sejarah. Ironinya pemerintah tidak menerbitkan buku-buku tentang pentingnya Papua jadi bagian dari NKRI malahan memakai jalan mengirim TNI dan Polri untuk memagari NKRI. Seolah-olah NKRI hanyalah sebuah bentangan pulau-pulau tanpa melihat ada manusia yang hidup dan tinggal di atasnya. Saya jadi teringat pesan Uskup Belo seandainya waktu itu di Timtim tidak ada kekerasan militer, mungkin rakyat merasa tertarik untuk menjadi bagian dari saudara-saudara bangsa Indonesia. Marilah kita bangun persaudaraan yang sejati di dalam bingkai NKRI, kalau hanya sekedar mempertahankan pulau-pulau dan mengabaikan manusianya itu akan membuat malapetaka besar bagi masa depan Indonesia.

Dominggus A Mampio
jubi_news@yahoo.com

Supporter Tidak Bertanggungjawab

Kekalahan tim sepak bola Indonesia melawan Arab Saudi sungguh suatu ujian bagi insan persepakbolaan Indonesia untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas para pelatih dan pemain. Kekalahan ini hendaknya menjadi bahan pembelajaran dan analisa di

mana letak kekuatan dan kelemahan tim sepak bola Indonesia agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terlepas dari kekalahan tim Indonesia tersebut, beberapa supporter yang tidak bertanggung jawab telah menunjukkan sikap mereka yang tidak beretika ketika pertandingan baru saja akan dimulai dimana pada saat itu supporter tim lawan memasuki arena pertandingan. Tindakan mereka dengan mengolok-olok para supporter tim lawan ini menunjukkan sikap dan pola pemikiran yang tidak dewasa. Secara umum, hal ini bukan hanya menurunkan citra persepakbolaan Indonesia, tetapi secara keseluruhan justru memalukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beretika di mata dunia internasional. Hal ini diperparah dengan aksi demo yang dilakukan sege-lintir oknum terhadap para panitia AFC. Saya berharap perkembangan sepak bola di tanah air bisa lebih baik lagi.

Indra Kho
indra_kho_exposed2007@yahoo.com.au

Cagub Cawagub Kotori Jakarta

Sebagai warga Jakarta, saya sangat prihatin dengan aktivitas Pilkada saat ini. Di setiap sudut jalan bahkan di fasilitas umum, seperti halte dan dinding

BUNG WARTO



Deny

jembatan, banyak sekali gambar/foto kandidat Cagub dan Cawagub yang resmi diumumkan oleh KPU. Saya menilai tindakan penempatan stiker pasangan tersebut sangat mengganggu keindahan kota Jakarta. Bahkan saya pernah menemukan halte bis yang dipenuhi dengan gambar satu kandidat tersebut. Padahal mereka selalu berjanji ingin membuat Kota Jakarta lebih indah, bersih dan nyaman. Namun pada saat kampanye saja mereka sudah mengotori

fasilitas umum dengan gambar mereka. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji, sebab saya pun pernah mendengar keluhan dari aparat kelurahan yang mengeluhkan bahwa gambar-gambar tersebut sangat sulit untuk dibersihkan. Akibatnya petugas mereka harus bekerja ekstra untuk menghilangkan bekas gambar tersebut. Untuk itu, mohon perhatian kepada para tim sukses Pilkada, anda boleh saja

mempromosikan pilihan anda, namun tidak perlu dengan merusak fasilitas umum.

Rika Lestari

riechalestarie@yahoo.com

Film Kontroversial yang Konyol

Film 'Maaf Saya Menghamili Istri Anda' adalah salah satu film buatan anak negeri (disutradarai oleh Monty Tiwa dan diproduksi Sinemart Pictures) yang hingga saat ini masih diputar di layar lebar. Dari judulnya saja saya rasa film ini sudah kontroversial. Seakan-akan urusan hamil menghamili adalah sesuatu yang sudah biasa, dianggap enteng seperti halnya "maaf saja menginjak kaki anda". Padahal seperti kita tahu, urusan semacam ini diharamkan oleh ajaran agama manapun, dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara manapun. Belum lagi isi filmnya yang menurut saya sama sekali tidak mendidik. Jangankan ia menyampaikan nilai-nilai kebaikan, melainkan melulu menggambarkan kebobrokan moral seorang anak muda yang tidak pantas ditiru. Walaupun film ini dimaksudkan untuk sekadar menghibur dengan kelucuan ataupun kekonyolan, saya rasa masih banyak tema lain yang bisa dibuat lucu selain urusan hamil menghamili. Sebaiknya pembuat film ke depannya harus lebih hati-hati, kritis dan mendidik lewat karya-karyanya jika ingin berkontribusi dalam kemajuan bangsa ini. Semoga penonton juga semakin cerdas dan kritis dalam memilih film-film untuk dinikmati.

Ifa

urfisyifa@gmail.com

Beli Tiket Nonton Piala Asia Ribet

Mencoba mencari tiket Piala Asia lewat online, kok susah benar. Telepon nomor yang disediakan Dayana +62 813 8193 3953, Indah +62 813 9888 770. Yang satu nggak diangkat, yang lainnya

menyarankan membeli langsung saja saat pertandingan. Anak saya SMP kelas 2 suka sepak bola dan ingin nonton ke stadion. Sementara saya sendiri seumur-umur baru sekali nonton di stadion, dan cukup ngeri melihat penonton yang sangat banyak. Apalagi jika sedang mendengar mobil sekitar Lebak Bulus dan Persija sedang main. Wah menonton bola sepertinya sesuatu yang menakutkan. Inginnya sih bisa nonton dengan rapi, beli tiket seperti beli tiket konser, bisa dibeli beberapa hari sebelumnya. Kok sepak bola nggak demikian ya? Kan juga butuh penonton yang sopan. Jika mau beli sebelum pertandingan hanya bisa dilakukan di Senayan, waktu yang terbuang jadi banyak karena harus ke Senayan dulu beli, lalu pas pertandingan datang lagi. Bagaimana ini PSSI? Banyak yang suka nonton sepak bola dan bisa ikut menghidupi kompetisi. Kita juga bangga melihat kesebelasan kita yang mewakili 200 juta penduduk bisa berjaya.

Johannes Bet

johanbet@yahoo.com

Sedih Melihat Balita Jadi Pengemis

Pernah melihat balita-balita yang ikut jadi pengemis di atas jembatan penyeberangan Jalan Gajah Mada atau di sekitar Slipi? Saya sungguh heran, kok tidak ada petugas yang *concern* atas pemandangan tersebut. Saya sering meringis atau linu melihat mereka duduk-duduk di atas jembatan penyeberangan atau tertidur beralaskan besi jembatan. Kadang-kadang malah tanpa celana bahkan celana dalam. Saya berharap ada yang peduli dan mengatasi masalah ini. Saya pikir orangtua mereka harusnya dijerat hukum, karena mempekerjakan anak-anak tersebut dan menganiaya mereka dengan cara seperti itu.

Poppy Deviana

pippoaroo@yahoo.com

PASTIKAN TARIF IKLAN **BERITAINDONESIA**

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax.(021) 83787235

Pemerintah Luncurkan KH

4 Juli - Pemerintah akan meluncurkan program Keluarga Harapan (KH) untuk membantu ibu hamil dan anak sekolah dari keluarga sangat miskin. Menurut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, setiap ibu hamil yang masuk dalam kategori keluarga sangat miskin akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per tahun. Sedangkan anak sekolah akan memperoleh Rp 400 ribu per tahun. Hal itu disampaikan Bachtiar usai rakor di kantor Menko Kesra, Jakarta Pusat. Bachtiar mengatakan, untuk tahap pertama, program yang akan diluncurkan 23 Juli 2007 itu dilakukan di 7 propinsi yang meliputi 48 kabupaten, 348 kecamatan, dan 600 ribu rumah tangga sangat miskin. Ketujuh propinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat,

Sulawesi Utara, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengumpulan data penerima program KH sudah dilakukan Depsos sejak bulan Januari 2007. Untuk tahun 2007, pemerintah menganggarkan Rp 694 miliar untuk pelaksanaan program tersebut.

Anggota Kongres AS Temui Presiden

5 Juli - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan empat anggota Kongres AS di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kedatangan ke empat anggota Kongres AS itu merupakan kunjungan kehormatan di sela-sela kunjungan kerja mereka ke DPR. Dalam pertemuan itu, para anggota kongres yang terdiri dari Donald Payne (Demokrat, New Jersey), David Drier (Republik, California), Wayne Gilchrest (Republik, Maryland), dan Jeff Miler (Republik, Florida), menyampaikan

penghargaannya atas pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-Timor Leste. Mereka berharap KKP dapat menyelesaikan sisa-sisa kasus dugaan pelanggaran HAM saat jajak pendapat di Provinsi Timor Timur tahun 1999 yang

masih menjadi ganjalan. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Ramos Horta dalam pertemuannya bulan Juni 2007 di Jakarta sepakat memperpanjang masa tugas KKP yang akan berakhir Agustus 2007 hingga 6 bulan berikutnya.

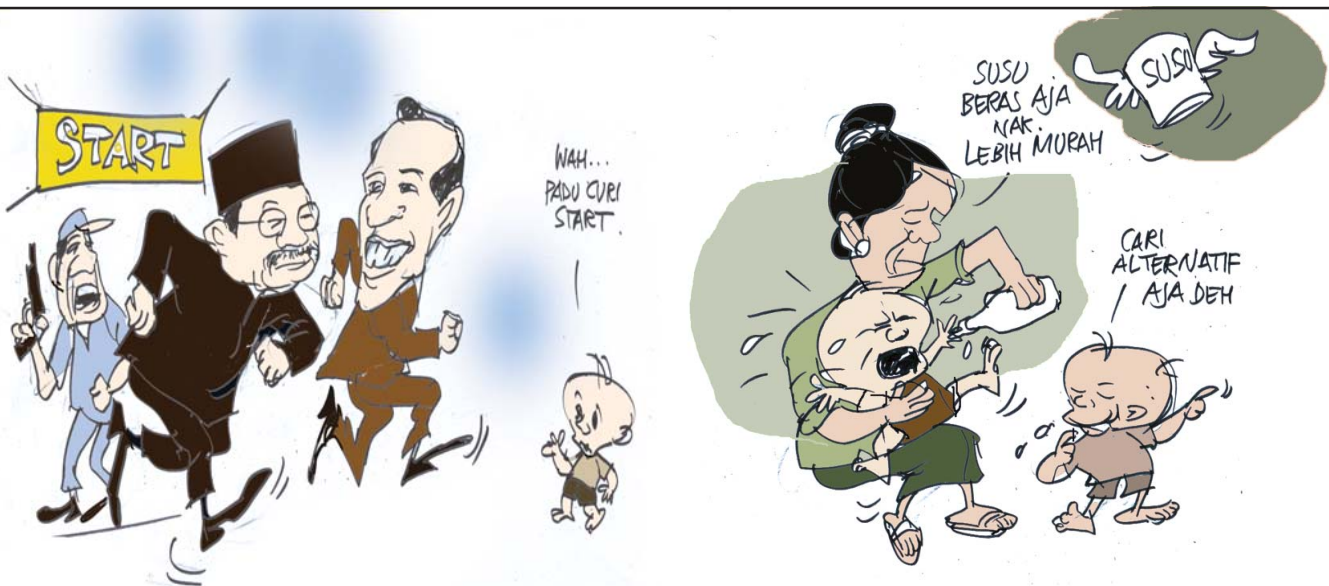


Zidane Main Bola di Istana

6 Juli - Zinedine Yazid Zidane (35) hadir di Indonesia selama 3 hari (6-8 Juli) sebagai Duta Grup Danone untuk mempromosikan program tanggung jawab sosial perusahaan ini terhadap anak-anak di du-

nia. Zidane diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gazebo, halaman rumput tengah Kompleks Istana, Jakarta. Presiden mengungkapkan kekaguman dan kebanggaannya kepada bintang sepak

Karikatur Berita



bola dunia asal Perancis itu. Sedangkan Zidane dalam ungkapan terima kasihnya memberi presiden kenang-kenangan kaus tim nasional kesebelasannya yang bertuliskan Zidane, dengan nomor punggung 10. Kepada putra Presiden, Zidane juga menghadiahkan kaus serupa. Setelah diterima Presiden, pria yang membawa Perancis menjadi juara dunia 1998 dan juara Eropa 2000 ini melanjutkan lawatannya ke Babakan Cipari, Cicurug, Sukabumi. Di sana, ia bertemu dengan tim sepak bola Indonesia yang baru pulang dari Lyon, Perancis, mengikuti D'none Nations Cup.

Rachman Kehilangan Sabuk Juara

7 Juli - Juara dunia tinju kelas terbang mini versi badan tinju IBF, M Rachman asal Indonesia, kehilangan sabuk juaranya menyusul kekalahan angka dari penantangannya, Florante Condes dari Filipina. Bertanding 12 ronde penuh, Rachman harus jatuh dua kali di ronde ke tiga dan ronde ke sepuluh. Dari tiga

hakim tinju yang memberikan penilaian pada pertandingan yang berlangsung di Studi 4 RCTI, Sabtu malam, dua diantaranya memberikan kemenangan angka kepada Condes, 114-112. Sedangkan hakim tinju asal

Indonesia, Muhammad Rois, memberikan nilai kemenangan 117-113 untuk Rachman. Petinju kelahiran Merauke itu kini mencatat rekor bertanding 62-5-6. Rekor bertanding Condes menjadi 22-3-1.



Reformasi Birokrasi di Depkeu

8 Juli - Departemen Keuangan dipilih sebagai *pilot project* program reformasi birokrasi pemerintah pada 2007-2008. Alasannya, Depkeu adalah departemen strategis dimana sekitar 62.000 orang berkarya sebagai pelaksana birokrasi. Departemen ini juga merupakan pengumpul hampir 75 persen penerimaan negara, terutama dari pajak, serta bea dan cukai.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Nasution mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp 3,2 triliun untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi tersebut tahun ini. Yang termasuk dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan remunerasi, tunjangan, dan gaji pegawai. Pemerintah berharap dengan perbaikan sistem birokrasi termasuk juga per-

baikan kualitas pendapatan, nantinya tidak ada lagi pegawai Departemen Keuangan yang masih ngobek atau melakukan tindakan indisipliner lainnya.

Soeharto Digugat Perdata

9 Juli - Jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung, mewakili negara cq Presiden RI, mendaftarkan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu menyebutkan ganti rugi materiil sebesar Rp 185 miliar dan 420 juta dolar AS serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Disebutkan juga sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat, yakni tanah dan bangunan Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita di Jakarta mengatakan, upaya Kejaksaan Agung mendaftarkan gugatan perdata itu sebagai hal yang sia-sia. Menurut

Karikatur Berita



dia, kasus korupsi Soeharto hanya dapat diungkap jika Jaksa Agung membuka kembali kasus pidana Soeharto dengan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Permohonan Tiga Eks Napi Diuji di MK

10 Juli - Tiga eks narapidana, Ahmad Taufik (wartawan Tempo), Budi man Sudjatmiko (aktivis PDI-P), dan Henry Yosodiningrat (pengacara), mengajukan pengujian sejumlah undang-undang yang membatasi hak politik mantan narapidana. Hak politik itu adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hakim konstitusi, hakim agung, dan sejumlah posisi di dalam pemerintahan lainnya. Sidang pertama digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/7). Sejumlah UU yang diuji adalah UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Henry Yosodiningrat pernah divonis lebih kurang dua tahun karena menabrak seseorang hingga tewas, Budiman Sudjatmiko pernah divonis 13 tahun karena aktivitas politiknya sebelum tahun 1998, dan Ahmad Taufik pernah divonis 2 tahun 8 bulan.

Kalla dan Gus Dur Damai

11 Juli - Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui KH Abdurrahman Wahid untuk berdamai terkait dengan gugatan perdata pencemaran nama baik yang diajukan kuasa hukum Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan laporan untuk kasus yang sama ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Wapres diperkarakan Gus Dur karena komentarnya belum lama ini terkait dengan kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog). Perdamaian dilakukan di Hotel Four Seasons,

Jakarta, Rabu petang. Ketika pertemuan terjadi, terlihat beberapa deputi dan staf Wapres, di antaranya Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesejahteraan Rakyat Azyumardi Azra. "Sebagai sesama

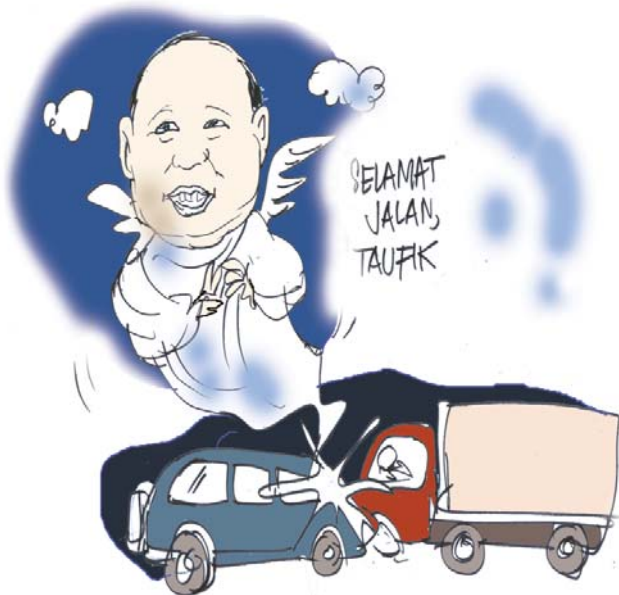
Muslim, kami saling memaafkan. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, kan? Dengan demikian, gugatan ke pengadilan dicabut," ujar Gus Dur yang ditemui sesuai pertemuan.



Pintu untuk Sopir Bus Ditiadakan

12 Juli - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan, Iskandar Abubakar mengeluarkan instruksi penghilangan pintu untuk sopir bus angkutan umum. Peraturan itu juga mewajibkan semua bus menyediakan satu pintu darurat di bagian tengah kendaraan. "Semua bus baru karoserinya harus dibuat seperti itu. Untuk bus yang lama, juga harus disesuaikan pada saat penggantian karoseri, yang berdasarkan ketentuan harus diganti setiap empat ta-

hun sekali," kata Iskandar di Jakarta. Iskandar menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan standar keselamatan penumpang. Dalam beberapa kasus kecelakaan, banyak penumpang terjebak di dalam bus, sementara sopirnya melarikan diri dari pintu sopir. Ketentuan ini baru berlaku untuk angkutan antarkota dan antarprowinsi (AKAP) serta bus pariwisata. Untuk bus angkutan dalam kota, baru akan diterapkan untuk bus transjakarta.



Ribuan Guru Demo di Jakarta

13 Juli - Ketidakpuasan terhadap kinerja dan perhatian pemerintah dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru mendorong guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI berunjuk rasa di Jakarta. Mereka memperjuangkan pemenuhan anggaran sebesar 20 persen dari APBN, kesejahteraan guru, dan penolakan hasil ujian nasional alias UN sebagai pe-

mentu kelulusan. Sekitar 1.500 guru dari PGRI Jawa Timur, berunjuk rasa di tiga tempat terpisah, yakni di DPR, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Keuangan. Menurut Ichwan Sumadi, Sekretaris Umum PGRI Jawa Timur, unjuk rasa semacam ini akan dilakukan secara bergantian dengan PGRI provinsi lain selama pemerintah tidak bisa membuat keputusan yang dituntut para guru.



Sesuai UU No. 23/2007

14 Juli - Penyerahan sertifikat bagi calon penguji pembangunan/pengembangan prasarana Perkeretaapian di

seluruh Indonesia diadakan di Hotel Sofyan, Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Perkeretaapian ini diikuti 45 peserta yang terdiri dari seluruh satuan kerja (satker) perkeretaapian Indonesia, para persiapan PTKA dan instansi terkait lainnya. Pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 6 hari (9-14 Juli) ini menggunakan dosen pembimbing yang berasal dari konsultan asing maupun dalam negeri yang keahliannya sudah teruji

di bidangnya. "Pendidikan dan pelatihan ini sesuai dengan UU No. 23/2007 dan sebagai refleksi serta respon terhadap keselamatan perkeretaapian di Indonesia," kata Nugroho Indrio, Sekretaris Dirjen Perkeretaapian yang didampingi Hermando Dwiatmoko Direktur Prasarana setelah menyerahkan sertifikat tanda kelulusan kepada para peserta.

Susu Mahal, Rakyat Menangis

15 Juli - Mahalnya harga susu membuat masyarakat harus memanfaatkan makanan tambahan atau susu pengganti. Susu jenis full cream yang biasanya dibeli sekitar Rp 7.000-7.500 setiap bungkus naik menjadi Rp 10 ribu hingga 25 ribu. Sebagian warga di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, misalnya, memanfaatkan air gula aren (enau) sebagai konsumsi tambahan makanan kesehatan anak-anak, guna mengganti pemberian susu akibat kenaikan harga sampai 10 persen. Sedangkan masyarakat di Sulawesi Barat memilih mengonsumsi susu kualitas biasa yang harganya lebih



murah. Begitu pula keluarga-keluarga di kawasan pesisir Cirebon mulai menggunakan air tajin sebagai pengganti susu formula.

Karikatur Berita



Air Mata KAMG

16 Juli - Sebanyak 27 dari 30 guru yang mengungkap kecurangan ujian nasional (UN) tahun 2007 di Medan dipecat dan dikurangi jam mengajarnya oleh pihak sekolah tempat mereka mengabdikan. "Dari 27 guru itu sebanyak 14 orang dipecat, 13 dikurangi jam mengajar mereka dari sekitar 40 les menjadi 10 les per bulan," ujar Koordinator Komunitas Air Mata Guru (KAMG), Denny Saragih. Sebanyak 30 guru yang tergabung dalam KAMG pada Mei 2007 mengungkap kecurangan pelaksanaan UN di Medan yang melibatkan pihak sekolah dan dilakukan secara sistematis bersama diknas setempat. Kecurangan itu terbukti benar sesuai hasil pemeriksaan tim Inspektori Jenderal Depdiknas yang turun ke Medan. Kecurangan dilakukan dengan mendistribusikan naskah UN pada H-1, kemudian tidak mengikutsertakan dekan pendidikan dalam kepantiaan UN dan tidak menetapkan SK pengawas UN SMP dan UN SMA/SMK.

DPR Setujui UU Ibu Kota

17 Juli - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Undang-undang (UU) itu menggantikan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), dalam UU ditegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta dipimpin gubernur, dibantu oleh satu wakil gubernur yang dipilih secara langsung. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus memperoleh suara lebih dari 50 persen untuk bisa ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, gubernur dibantu sebanyak-banyaknya empat

deputi gubernur, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah segera

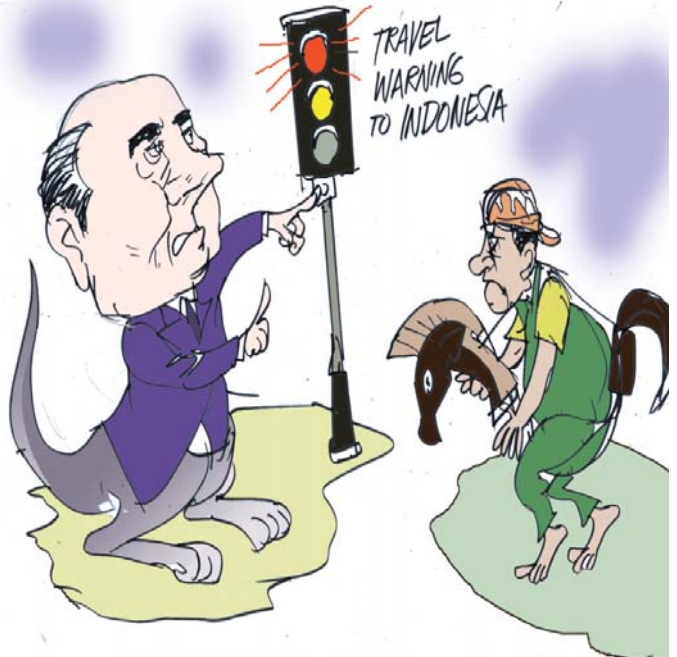
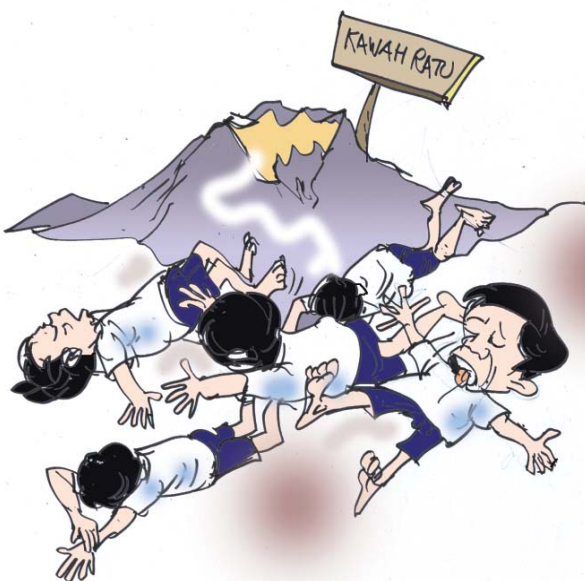
mengundang RUU itu sehingga bisa menjadi dasar pelaksanaan Pilkada Jakarta.



Tommy Jadi Tersangka

18 Juli - Dugaan korupsi penyalahgunaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh pengurus Badan Penyelenggara Pemasaran Cengkeh atau BPPC sedang disidik Kejaksaan Agung. Dalam perkara itu, Huto-mo Mandala Putra atau Tommy Soeharto ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati berstatus tersangka, mantan Ketua Umum BPPC itu belum pernah diperiksa penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.

Perkara dugaan korupsi di BPPC diperkirakan merugikan negara Rp 1,7 triliun, yang terdiri dari penyalahgunaan KLBI Rp 175 miliar dan belum dikembalikan uangnya petani lebih dari Rp 1 triliun, belum termasuk bunga bank. BPPC yang dipimpin Tommy itu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 28 Desember 1990, atas dasar usaha bersama koperasi, BUMN, dan swasta.



Buntut Perjanjian Tampak Siring

Kelanjutan proses ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement - DCA) Indonesia-Singapura menimbulkan banyak kekhawatiran dan kecemasan. Kehidupan perekonomian nelayan, penerbangan sipil, dan kedaulatan bangsa dipertaruhkan.

Pemerintah Indonesia sangat antusias dengan kesediaan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Sebab selama 20 tahun terakhir, Singapura selalu bergeming, menolak diikat dengan perjanjian seperti itu. Dengan disepakati dan ditandatanganinya DCA bersama dua perjanjian lain, kerja sama ekstradisi (*extradition treaty*), dan peraturan pelaksanaan area latihan militer (*implementing arrangement military training area/IA MTA*), 27 April lalu, pemerintah berharap bisa mendapat "uang untuk ruang" dari perjanjian ini.

Istilah "uang untuk ruang" ini muncul dari argumen pemerintah yang kerap dilontarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono dalam sejumlah kesempatan, "Indonesia mendapat kembali aset serta buron koruptor yang lari ke sana, sementara Singapura nantinya akan kita beri ruang untuk militer mereka berlatih, mengingat selama ini mereka memang memiliki keterbatasan soal itu." Namun argumen Juwono ini malah diterjemahkan sebagai penggadaian wilayah kedaulatan RI.

Sejak semula, DCA sudah mendapat kecemasan dari berbagai kalangan terutama yang wilayahnya akan dijadikan tempat latihan tempur. Selain mempertanyakan 'kedaulatan' Indonesia dimana Singapura bisa masuk dan membawa angkatan bersenjata ke wilayah teritorial Indonesia, perjanjian ini memberikan

dampak yang cukup besar terhadap kehidupan perekonomian di wilayah yang dijadikan pusat latihan. Dalam DCA, Indonesia menyediakan sejumlah wilayahnya untuk dipakai angkatan bersenjata Singapura berlatih militer, baik bersama TNI, sendiri, maupun melibatkan negara ketiga. Kerja sama akan berlaku efektif selama 25 tahun, begitu diratifikasi kedua negara. Area latihan militer itu antara lain Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Baturaja di Sumatera Selatan, serta Area Alfa 1 dan 2, serta Area Bravo - ketiganya meliputi kawasan kepulauan dan perairan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Masalah timbul khususnya di Area Bravo yang rencananya akan disediakan bagi Angkatan Laut dan Udara Singapura untuk berlatih militer, mulai dari manuver, tembakan peluru tajam, hingga penembakan peluru kendali yang dapat dilaksanakan empat kali dalam setahun. Pemerintah sulit memenuhi permintaan Singapura yang ingin berlatih selama 15 hari setiap bulan di sana. Selain karena frekuensinya yang menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono "terlalu berlebihan", kegiatan masyarakat sekitar akan sangat terganggu. Harian Kompas bahkan menurunkan tulisan yang mengupas lebih jauh konsekuensi yang harus diterima bangsa Indonesia mulai dari kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan rudal, peluru tajam, dan manuver kapal selam serta makin sempitnya areal tangkap ikan



ilustrasi: denny

nelayan dan terganggunya jalur terbang bagi para penerbang sipil. Sebab perairan yang membentang luas dari Anambas, Midai, hingga Natuna merupakan kawasan para nelayan jaring apung dan pukat mencari ikan. Belum lagi, nyawa nelayan yang bisa direnggut sewaktu-waktu oleh peluru-peluru nyasar. Begitu pula dengan nasib para pilot sipil yang menjadikan Matak dan Natuna tujuan utama beberapa penerbangan perintis. Sebagai kabupaten baru, Natuna tengah menggeliat untuk berkembang. Jadwal penerbangan ke kawasan itu terus meningkat. Serpihan kecil saja dari peluru yang meledak dapat membahayakan pesawat.

Pemerintah memang mempunyai segudang alasan bahwa perjanjian dengan Singapura ini adalah suatu 'keberhasilan'. Pemerintah merasa diuntungkan sebab dalam perjanjian ini disebutkan Singapura akan membangun, memulihkan, dan melengkapi beberapa fasilitas militer, seperti Air Combat Maneuvering Range

(ACMR), Siabu Air Weapons Range (AWR), Puslatpur TNI AD Baturaja, Overland Flying Training Area Range (OFTA), dan Naval Gunfire Scoring System (NGSS) di Pulau Kayu Ara. Selain itu, pemerintah juga yakin perjanjian ini akan memberi keuntungan imaterial berupa meningkatnya kemampuan serta profesionalisme prajurit TNI, mengingat adanya sejumlah kesempatan tukar-menukar informasi, latihan, dan pemberian akses terhadap persenjataan Singapura ke TNI.

Apapun alasan pemerintah dan pendapat yang pro atau kontra dari banyak kalangan, masyarakat tingkat bawah hingga lembaga tingkat pemerintahan daerah dan legislatif makin bingung dan resah. Sebab, hingga saat ini, sedikit sekali informasi yang bisa diketahui masyarakat soal proses negosiasi hingga ditandatanganinya perjanjian ini. Pemerintah juga diharapkan dapat mengkaji kembali beberapa hal penting dalam perjanjian itu. ■ MLP

Bercerai Kita Runtuh

Separatisme, keinginan untuk memisahkan diri (bercerai) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih menjadi masalah pelik bagi bangsa ini. Reformasi yang membuka ruang luas bagi beragam ekspresi, selain berdampak positif, sering kali terkesan kehilangan panduan dalam mengarungi lautan kebebasan yang sebelumnya dibungkam. Reformasi, selain diwarnai tuntutan otonomi juga ditabuh tuntutan memisahkan diri, mulai dari daratan Aceh hingga Papua. Satu di antaranya, Timor Timur, sudah terlepas.

Kejadian paling terkini pengibaran bendera Bintang Kejora saat atraksi tari pada acara Konferensi Besar Dewan Adat Papua (DAP) ke II tahun 2007 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih, Jayapura, Selasa 3 Juli 2007. Beberapa hari sebelumnya, penari Cakalele mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan) di depan Presiden SBY pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, Jumat, 29 Juni 2007. Disusul pendeklarasian Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), partai lokal di NAD, yang dinilai melanggar Kesepakatan Helsinki 12 Agustus 2005.

Apa yang menguatirkan dalam beberapa kejadian terakhir itu? Adalah masih adanya keinginan kuat untuk memisahkan diri (bercerai) dari NKRI. Beragam faktor mengapa keinginan memisahkan diri itu masih menyala. Selain faktor naluri (ideologi) merdeka dan merosotnya nasionalisme Indonesia, juga antara lain dipicu faktor ketidakadilan, ketertinggalan dan ketidaksejahteraan rakyatnya.

Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa belajar dari pengalaman tindakan represif yang pernah dilakukan untuk menumpas kaum separatis atas nama kesatuan dan persatuan di masa lalu, yang ternyata tidak berhasil (kontraproduktif) meredam GAM, RMS dan Papua Merdeka. Tindakan represif itu malah bisa mengundang simpati kepada separatis dari berbagai kalangan bahkan dunia.

Kemudian kita bisa belajar dari keberhasilan meredam GAM di Aceh, yang ditempuh secara persuasif, melalui dialog sehingga dicapai kesepakatan Helsinki Agustus 2005. Dialog berhasil menemukan titik temu, jalan damai, yang membuka hak-hak rakyat terpenuhi sehingga mempersempit keinginan pembangkangan terhadap kesatuan bangsa.

Dalam konteks ini, kita bisa menoleh agenda utama Konferensi Besar DAP ke II 2007 yang membahas berbagai hal menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua seperti tanah, hutan, kayu, dan sumber daya alam lainnya, serta hak sosial, ekonomi dan budaya daerah dari kelompok suku masing-masing. Agenda ini bisa kita maknai bahwa kesatuan berbangsa dan kebanggaan berbangsa seharusnya bermuara pada peningkatan harkat, martabat dan kesejahteraan rakyat.

Pada era reformasi ini, dialog dan komunikasi harus dikedepankan, di samping kemampuan prediktif dan antisipatif pihak keamanan negara perlu lebih ditingkatkan. Transformasi pendekatan dari represif senjata ke dialog komunikatif kita yakini akan menanduskan keinginan separatisme.

Semangat Sumpah Palapa 1258, Sumpah Pemuda 28

Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 serta Mukadimah UUD 1945, sesungguhnya sudah demikian baik untuk memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita juga punya peribahasa yang indah: *Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh*. Sebagai bangsa kita juga punya motto: *Bhinneka Tunggal Ika*.

Namun, masih sangat ironis: Indonesia (Nusantara) yang berhasil merebut kemerdekaannya dengan heroik, kini malah nyaris kehilangan semangat kepahlawanan. Indonesia yang punya cita-cita agung dalam Pancasila (Mukadimah UUD 1945), kini langkahnya gontai seperti orang mabuk, tidak tentu arah. Indonesia yang wilayahnya luas dan kaya, tapi rakyatnya miskin. Penduduknya banyak, tapi pendidikan (mutunya) masih rendah. Indonesia bangsa beragama, namun korupsinya peringkat teratas di dunia. Indonesia yang

punya keindahan kata *Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh* dan *Bhinneka Tunggal Ika*, tapi separatisme malah subur.

Kesadaran bersatu sebagai bangsa, hari ini, harus kita bangkitkan agar kita jangan sampai kehilangan national pride, kebanggaan diri sebagai bangsa. Dalam hal ini, kita perlu belajar dari bangsa-bangsa lain. Contoh paling anyar adalah Uni Eropa. Sebanyak 30 negara (bangsa) Eropa mendeklarasikan bergabung dalam Uni Eropa dan menandatangani konstitusi pertama di Roma, 29 Oktober 2004. Mereka telah membentuk parlemen Uni Eropa, Bank Central Eropa dan lembaga-lembaga lain yang mempersatukan Eropa. Mereka bersatu dari 15 sampai kini sudah

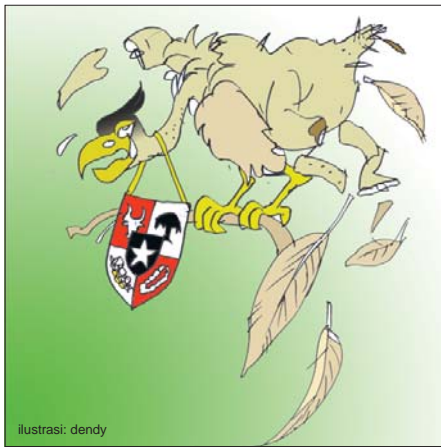
30 negara menjadi satu 'negara raksasa' Uni Eropa.

Negara-negara Eropa yang relatif tingkat kemajuannya sudah jauh di atas kita, masih membutuhkan persatuan Uni Eropa demi kemajuan mereka. Kehadiran Uni Eropa telah mengetarkan keadayaan Amerika Serikat. Dari segi jumlah penduduk (potensi sumber daya manusia) Uni Eropa mencapai 550 juta jiwa yang akan menyaingi populasi AS, yang diperkirakan 550 juta pada tahun 2050. Sehingga, AS dan negara manapun di dunia jangan lagi pernah memandang rendah kekuatan Eropa.

Bagaimana posisi Indonesia dalam persaingan dunia, saat negara-negara Eropa malah menyatukan diri, dan Indonesia malah masih menjadi tanah subur tumbuhnya separatisme, keinginan memisahkan diri, bercerai-berai? Peribahasa kita sudah mengingatkan bahwa bercerai kita akan runtuh!

Tentu, kita tidak kehendaki Indonesia yang tercerai-berai, Indonesia yang akan runtuh. Kita mengimpikan Indonesia yang bersatu, Indonesia yang teguh, Indonesia yang kuat. Indonesia Raya! Maka, mari bersatu-padu, menghilangkan ego berlebihan baik sebagai suku, kelompok agama, daerah dan golongan. Menjadi Indonesia yang hidup dalam kebersamaan, bersatu dan senasib sepenangungan. Indonesia yang makmur sejahtera, Indonesia Raya yang kuat.

Sehingga (bahkan) kita (Indonesia) sebagai bangsa besar di Asia Tenggara, seharusnya menjadi pelopor terbentuknya negara raksasa Uni Asia Tenggara. Indonesia yang memiliki populasi penduduk 240 juta, berpotensi memimpin Uni Asia Tenggara. Mungkinkah itu kita capai? Sangat mungkin, jika kita bersatu! ■



ilustrasi: dendy

BIBIT LAMA SEPARATISME KEMBALI ANCAM KEUTUHAN NKRI

Tiga rentetan peristiwa politik terbaru yang terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh, sangat mustahil untuk tidak dimaknai sebagai upaya pemunculan kembali bibit-bibit lama separatisme. Bila tak ditangani secara baik, bisa-bisa hal ini akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suasana kondusif yang tercipta di Maluku pascakonflik, masa indah di Bumi Cendrawasih yang sedang menikmati pengelontoran anggaran Rp 17 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Rp 11 triliun Dana Alokasi Umum (DAU), serta masa bulan madu antara Indonesia dengan Bumi Serambi Mekkah usai perjanjian damai Helsinki 15 Agustus 2005, ternoda oleh sesuatu yang terkesan insiden. Namun sesungguhnya ketiga peristiwa tersebut merupakan aktualisasi terbaru dari bibit-bibit lama gerakan separatisme, yang sepanjang sejarah terbukti selalu mencederai perjalanan Republik Indonesia meraih cita-citanya.

Pertama, aksi yang dilakukan oleh 29 orang penari Cakalele di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Ambon pada pagi hari Jumat 29 Juni 2007 lalu. Di tengah-tengah acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon, para penari itu sudah sangat siap untuk membentangkan bendera "Benang Raja" milik organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS).

Kedua, peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora milik separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh sejumlah aktivisnya yang sedang dipenjarakan di Lembaga Masyarakat Abepura, Papua,

dalam rangka HUT OPM (1 Juli 1969-2007), Senin 2 Juli 2007.

Ketiga adalah deklarasi pendirian partai politik lokal di Aceh, diberi nama Partai GAM, yang atributnya mengacu kepada simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), berlangsung Sabtu 7 Juli 2007.

Borneo Bisa Lepas

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, mengakui, selama lima tahun ke depan isu separatisme masih akan marak di Indonesia. Berbicara di sebuah acara diskusi bertajuk "Mengungkap Eksistensi Separatisme," Sabtu (7/7), mantan Pangdam Jaya ini mengidentifikasi Papua saat ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia.

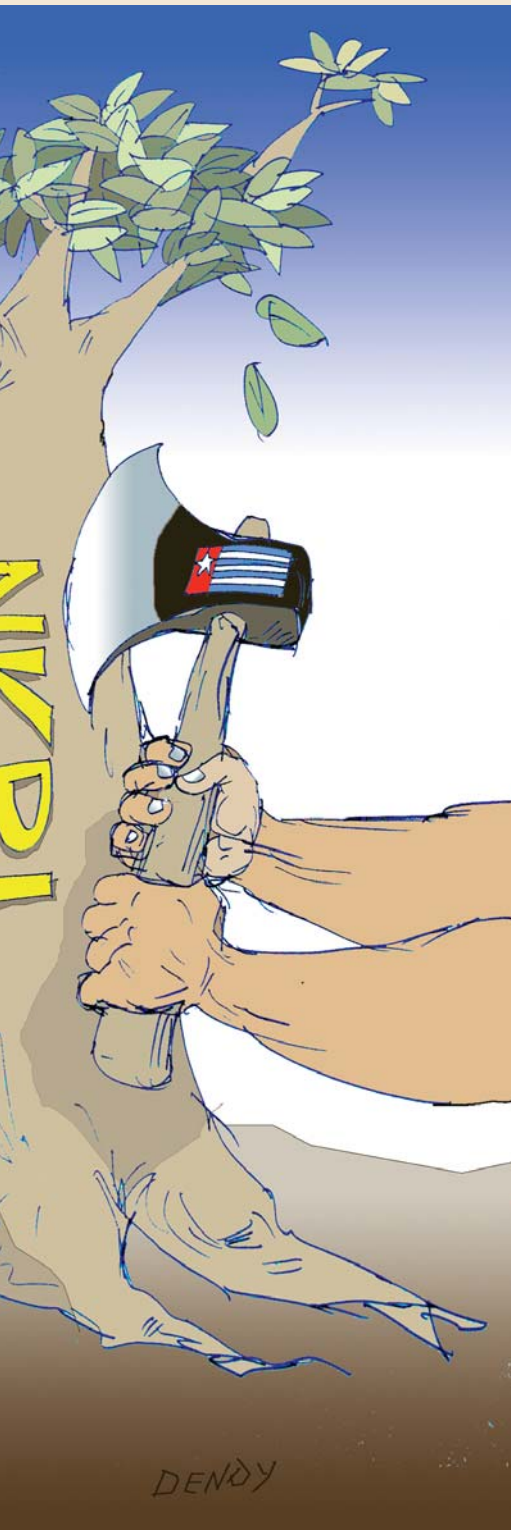
Hendro menyebutkan, sudah sejak pertengahan 1980-an lima daerah di Indonesia intens memperlihatkan bibit separatisme. Yaitu, Timtim, Papua, Maluku, Kalimantan, dan Aceh. Para tokohnya yang tidak puas dengan pemerintah pusat mulai mencari sponsor di luar negeri. Timtim akhirnya lepas dari NKRI tahun 1999, usai jajak pendapat yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hendro mengakui hingga saat ini isu yang dibawa gerakan separatisme masih berupa isu separatisme pheriperal. Arti-



nya, masih seputar isu pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Padahal, kata Hendro, Indonesia saat ini justru sedang menghadapi banyak masalah dalam hal ekonomi dan pemerataan pembangunan. Jika hal tersebut tidak diwaspadai, mantan Danrem Garuda Hitam Lampung yang berhasil meng-



gulung Kelompok Warsidi, ini mengingatkan NKRI bisa-bisa bubar nantinya. Hendro mengatakan jika pemerintah tidak mampu mengendalikan konflik di daerah-daerah yang potensial berkembang gerakan separatisme, tidak menutup kemungkinan lima tahun lagi Borneo bisa lepas.

Eskalasi Berbeda

Simon Patris Morin anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI asal daerah pemilihan Papua, mengatakan, soal separatisme bukan hanya monopoli Papua, Maluku, dan Aceh. Tetapi milik seluruh daerah di Indonesia yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Khusus antara Ambon, Papua, dan Aceh, memang memiliki banyak persamaan sekaligus perbedaan dalam bagaimana memperjuangkan ideologi dan motif pemisahan diri dari Indonesia.

Fajar Kurnianto, peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kajian (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta, menulis, sudah beberapa kali aktivis RMS mengibarkan bendera "Benang Raja". Yaitu pada 25 April 2001, saat Pimpinan Eksekutif Forum Kedaualatan Maluku (FKM), Alexander Hendricks Manuputty, memelopori pengibaran bendera RMS pada peringatan proklamasi organisasi ini di Ambon. Kemudian pada 25 April 2003, tak kurang 60 orang aktivis ditahan aparat karena mengibarkan bendera RMS.

Semuanya memberi sinyal gerakan separatist RMS masih eksis meski dalam jumlah pengikut yang terbilang sedikit.

Tetapi Menteri Pertahanan Prof Juwono Sudarsono menyebutkan Republik Maluku Selatan (RMS) bukanlah gerakan ideologi. Mereka hanya ingin mempertanyakan soal keadilan. Intinya, ingin diperhatikan pemerintah.

Demikian pula Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selama hampir 30 tahun melakukan gerakan bersenjata, juga semata-mata hanya ingin meminta perhatian pemerintah soal keadilan sosial ekonomi bagi mereka.

"Bahwa mereka angkat senjata, itu karena tidak diperhatikan oleh Jakarta," ujar Juwono, mencoba menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya sudah tergolong "mahagawat".

Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Prof Muladi juga menyebut RMS tidak perlu dikhawatirkan. RMS menurutnya tidak berbahaya karena tidak memiliki jaringan internasional, dan SDM-nya tidak ada yang unggul.

Tetapi untuk Papua dan Aceh, Muladi mengajak kita untuk perlu khawatir. Keduanya berbahaya sebab memiliki jaringan internasional, sumberdaya yang andal, dan organisasi yang hirarkis.

Kepada pers usai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, untuk memaparkan hasil kajian lembaganya tentang separatisme, berlangsung di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (9/7), mantan Rektor Undip Semarang ini memastikan gerakan separatist Papua sangat berbahaya karena jaringan internasionalnya bagus, sumberdaya manusianya mulai membaik,

dan ada dorongan dari organisasi internasional seperti LSM di Australia, Belanda, dan Amerika Serikat.

"Kita tahu Papua dan Aceh mendapat dukungan dana yang besar dari dalam dan luar negeri. Papua punya dana otonomi khusus Rp 17 triliun, dan DAU Rp 11 triliun. Sementara Aceh dapat banyak bantuan asing pascatsunami," kata Muladi, yang memberikan pembekalan Pendidikan Singkat Angkatan XV Lemhannas, di Istana Wapres tersebut.

Muladi menekankan gerakan separatisme di Aceh harus mendapat perhatian penuh. Karena elit dan eks pejuang GAM masih belum menerima UU Pemerintahan Aceh dan UU Pendirian Partai Lokal. Penggunaan atribut militer Gerakan Aceh Merdeka, menurutnya, merupakan bukti elit GAM masih memendam keinginan untuk merdeka. "Otsus seperti Aceh dan Papua itu sudah seperti negara federal. Tidak ada ceritanya lagi kemudian orang masih bicara merdeka," urainya.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, konflik SARA di Ambon atau Maluku sudah sejak awal diidentifikasi oleh organisasi nahdliyin ini bertintakan separatisme yang melibatkan RMS, bukan konflik agama.

Mengenai Papua, Hasyim mengatakan pemerintah terlalu longgar membiarkan multi intervensi asing di sana. "Karena ancaman terhadap Pancasila dan NKRI sekarang ini bukan hanya datang menyerang kedaulatan teritorial politis tetapi juga ideologis, ekonomi, dan budaya atau integritas bangsa," ujar Hasyim.

Soal Aceh, Hasyim mengatakan semenjak perjanjian Helsinki telah banyak yang mengingatkan bahwa banyak mengandung kelemahan. Namun pemerintah sulit diberitahu. "Sekarang disalahgunakan GAM," kata Hasyim kepada wartawan Selasa (10/7).

Separatisme bukan monopoli Papua, Maluku, dan Aceh, juga pernah ditengarai oleh Samuel Huntington, ilmuwan politik Barat yang mengidentifikasi ada potensi terjadi benturan peradaban antara Timur dengan Barat.

Tony Wardoyo anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Papua, dalam tulisannya di *Suara Pembaruan* mengangkat komentar Huntington tersebut, yang menyebutkan, Indonesia bisa bernasib sama seperti Yugoslavia dan Uni Soviet terpecah-pecah karena gagal menjaga integrasi nasional.

Pandangan Huntington, kata Tony, barangkali dilandasi oleh kenyataan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, yang masyarakatnya sangat plural sehingga selalu dihantui oleh gerakan separatisme. Heterogenitas struktur masyarakat Indonesia secara horizontal

ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Demikian pula secara vertikal ditandai adanya perbedaan lapisan atas dan bawah.

Dengan struktur sosial yang demikian kompleks, alumnus Universitas Johannesburg Mainz, Jerman, ini mengatakan sangat rasional Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun integrasi secara permanen.

Sudah Diingat

Almarhum Matori Abdul Djilil, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan RI di era Presiden Megawati Soekarnoputri, pada Februari 2003 pernah mengingatkan lepasnya Timtim telah meningkatkan intensitas gerakan separatisme di Papua.

Berbicara di hadapan Rapat Kerja Komisi I DPR, Matori ketika itu menyatakan, Timtim telah memberi inspirasi dan mendorong semangat tokoh-tokoh OPM untuk mengembangkan upaya melepaskan diri dari NKRI. Dia juga menyebutkan penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan (COHA) antara RI dengan GAM di Genewa, Swiss, membuat OPM semakin yakin bahwa perjuangan mereka untuk merdeka bukan mimpi belaka. OPM kemudian terus mengembangkan usaha terutama membentuk jaringan di dalam dan luar negeri.

Mereka juga menciptakan opini penyatuan Irian Jaya ke Indonesia setelah Pepera (penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 tidak sah, karena tidak dilakukan satu orang satu suara (*one man one vote*) sesuai Resolusi PBB Nomor 2504. Mereka lantas menyatakan Papua telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1969, sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah Belanda.

Sebagaimana Bumi Serambi Mekkah Aceh, yang kaya dengan minyak bumi dan gas alam, Papua juga sangat kaya akan kandungan sumber daya alam. Terlebih setelah PT Freeport Indonesia (FI) memulai penambangan untuk pertama kali pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya (KK) I.

Sejak tahun 1986 Freeport menemukan lagi sumber penambangan baru di puncak gunung rumput, atau di Grasberg yang kandungannya dipastikan jauh lebih besar. Grasberg memiliki kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia sekitar 2,16-2,5 miliar ton, serta kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Dalam sehari diperkirakan diproduksi 185.000 hingga 200.000 ton biji emas dan tembaga.

Itu sebab Freeport sangat berhasrat untuk kembali memperpanjang KK I, sehingga dibuatlah KK II pada Desember



Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selama hampir 30 tahun melakukan gerakan bersenjata, semata-mata hanya ingin meminta perhatian pemerintah soal keadilan sosial ekonomi bagi mereka.

1991 yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama 2 x 10 tahun. Ini berarti KK II baru akan berakhir tahun 2021, dan jika diperpanjang, hanya akan berakhir pada tahun 2041.

Yang menjadi persoalan adalah siapa sesungguhnya yang menikmati hasil dari FI. Sebab nyatanya, sumbangan FI ke APBN hanya Rp 2 triliun, mengingat saham milik Pemerintah RI hanya 9,36% sisanya asing. Kantor berita *Reuters* Maret 2006 pernah menulis, terdapat empat *big boss* FI yang menerima pendapatan paling tidak Rp 126,3 miliar/bulan. Diantaranya *Chairman of the Board* James R Moffet menerima sekitar Rp 87,5 miliar per bulan, dan President Director PT FI Andrianto Machribie menerima Rp 15,1 miliar per bulan. Tetapi pada saat yang sama orang-orang Papua dan sekitar tetap banyak yang miskin bahkan mengalami kelaparan.

Albert Hasibami Ketua Forum Papua

berbicara di Gedung CSIS, Jakarta, Selasa (10/7), menyebutkan, tanah Papua kaya dengan sumber daya alam namun hingga kini masyarakatnya tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa ketidakadilan.

Pengamat ekonomi pertanian HS Dillon, yang juga anggota Forum Papua, turut menegaskan dalam hal pembangunan infrastruktur kesejahteraan masyarakat Papua mengalami ketidakadilan. Ia mencontohkan, seluruh anggaran Papua pada tahun 2006 hanya 20 persen yang dialokasikan langsung ke desa-desa untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Sisanya digunakan untuk anggaran birokrasi.

Hadirkan Keadilan

Dua tokoh muslim, Hidayat Nurwahid yang Ketua MPR RI, dan Tifatul Sembiring Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan solusi yang senada atas ancaman separatisme yang mulai menggejala akhir-akhir ini.



foto: dok. kll

Hingga kini masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa ketidakadilan.

Tifatul mengatakan bibit-bibit separatisme yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI harus diusut dan ditangani secara tuntas tanpa diskriminasi. "Peristiwa memalukan dan membahayakan negara itu harus diusut tuntas, bukan hanya karena menyangkut Presiden, tapi justru menunjukkan kelengahan petugas pengamanan yang dapat membahayakan kepala negara kita," kata Tifatul soal kejadian di Ambon.

Tifatul mendesak agar pemerintah memberikan sanksi kepada pejabat penegak hukum yang lalai dalam insiden tersebut. Sebab, aksi provokatif demikian seharusnya bisa diantisipasi dan terdeteksi jauh-jauh hari. "Jika sampai dibiarkan akan memancing aksi-aksi serupa di kemudian hari," ucapnya.

Hidayat Nurwahid berpendapat separatisme sama bahayanya dengan terorisme sehingga harus juga ditindak tegas. Ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap kebijakan pemerintah, yang belum mampu memberikan kesejahteraan rakyat, seharusnya tidak langsung ditujukan kepada pemerintah pusat. Sebab pusat sudah berupaya memberikan peluang dengan anggaran triliunan rupiah. "Sekarang kita bersama-sama mengawasi digunakan untuk apa dana triliunan tersebut di daerah, kalau warganya ternyata masih belum sejahtera. Jadi jangan langsung menyalahkan Jakarta saja," kata Nurwahid.

Menurut Hidayat separatisme harus diberi jawaban konkret diantaranya ukhuwah Islamiyah sebagai modal sosial mempertahankan NKRI. "Para pelaku separatisme harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku supaya ada efek jera karena telah mengancam keutuhan bang-

sa yang telah diamanatkan Undang-Undang," kata Hidayat.

Menhan Juwono Sudarsono menyebutkan gerakan separatisme tidak akan ada asalkan ada kerja keras dan kepedulian seluruh warga Indonesia mulai dari Papua, Ambon, dan dimanapun mereka berada.

Kata Juwono, untuk meredam aksi separatisme perlu usaha keras menghadirkan keadilan di lapangan seperti membangun ketersediaan pangan, hunian yang layak bagi manusia, dan ketersediaan listrik.

Menko Polhukam Widodo AS usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/7), menyebutkan perlu dilakukan tindakan tegas dan terukur untuk menindak kasus-kasus yang terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh. Namun semua tindakan tetap merefeksikan pendekatan *rule of law*, bukan tindakan represif. Pendekatan dibutuhkan untuk menjaga kondisi keamanan nasional supaya tetap aman, tertib, dan stabil untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengomentari pendirian Partai GAM Widodo menyebutkan itu tidak sesuai dengan kesepakatan damai di Helsinki, dan juga melanggar UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan, pemerintahan yang sah harus memelihara kondisi perdamaian di Aceh.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta sudah memberi isyarat bahwa Partai GAM akan sulit lolos verifikasi. Dasarnya, setiap partai lokal haruslah mengusung semangat perdamaian, rekonsiliasi, dan reintegrasi Aceh.

Ali Mochtar Ngabalin anggota Komisi I

DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang, mengatakan, kemunculan separatisme adalah akibat dari buruknya kinerja pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi daerah-daerah yang selama ini bergolak, selain alasan ada kepentingan asing. Karena itu, solusinya, "Kalau mau selesai, beri perlakuan yang sama bagi bangsa Papua, Ambon, dengan bangsa-bangsa yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi," seru Ngabalin.

Hasyim Muzadi meminta pemerintah supaya lebih intensif mencegah gerakan separatisme. "Pemerintah sebagai wakil eksekutif negara harus bertanggungjawab atas kedaulatan negara," kata Hasyim. Menurutnya, negara berhak bahkan berkewajiban untuk memaklumkan perang terhadap setiap gerakan yang menjurus kepada separatisme baik dalam bentuk simbol maupun tindakan. Apalagi bila sampai ke tingkat pemberontakan atau pemisahan diri.

Wapres Jusuf Kalla juga menekankan pendekatan penanganan masalah hukum, sosial ekonomi dan pembinaan masyarakat. "Dengan pendekatan semacam ini, kita harapkan proses penyelesaian kasus ini akan segera tuntas," kata Pendeta John Ruhulesin mengutip pernyataan Kalla, usai bersama para tokoh agama Maluku diterima oleh Wapres.

Wapres, kata John, juga berterimakasih dengan solidnya tokoh agama Maluku. Kondisi ini mencerminkan insiden di Maluku bukan berlatar belakang agama, tetapi masalah politis.

Kata Muladi, untuk menghadapi gerakan separatisme Lemhannas sudah mengusulkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya menumpas gerakan separatisme secara yuridis, dan menegakkan hukum non-represif dengan menjunjung tinggi HAM.

Kemudian, pemerintah harus memperbaiki keadilan sosial yang menjadi akar permasalahan, dan terus-menerus melakukan pendekatan budaya. Muladi mencontohkan, Dubes Belanda Junus Effendi Habibie yang pintar berbahasa Ambon itu masuk ke kantong-kantong RMS di Belanda, dan mendekati tetua-tetua RMS. Hasilnya, tidak ada demo di Kedubes RI di Belanda.

Di Papua Lemhannas mengusulkan agar pemerintah merangkul tetua-tetua Dewan Adat Papua, bukan Majelis Rakyat Papua, serta memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Papua yang dulu berjuang untuk Trikora.

"Kalau tidak ada pendekatan ekonomi, dan adat, saya khawatir sekali akan terulang situasi Timor Timur. Dua puluh dua tahun kita di sana tidak bisa memasukkan budaya Indonesia ke sana. Akhirnya referendum. Yang terjadi di Papua dan Aceh sekarang ini sama," kata Muladi. ■ HT

Separatisme:

Dari Indonesia Sampai Eritrea

Bukan cuma Indonesia yang menghadapi masalah separatisme. Di belahan dunia lainnya, separatisme menjadi persoalan yang memusingkan banyak negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mungkin merasa bak ditampar saat menyaksikan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berkibar hanya berjarak delapan meter dari tempat duduknya. Insiden pengibaran bendera RMS di Lapangan Merdeka Ambon itu, disusul pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Kongres Masyarakat Adat Papua beberapa hari kemudian, menandakan bibit separatisme di Indonesia belum terhapus. Keberhasilan meredam separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tampaknya membuat pemerintah mulai terlena.

Akan tetapi bukan cuma Indonesia yang menghadapi persoalan separatisme politis. Di belahan dunia lainnya, separatisme menjadi persoalan yang

memusingkan banyak negara.

Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dengan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain atau suatu negara. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.

Gerakan separatis adakalanya berupa gerakan politis dan damai. Seperti gerakan separatis di Quebec, Kanada selama tiga puluh tahun terakhir, dan gerakan yang damai juga terjadi semasa perpecahan Ceko-Slowakia dan Uni Soviet. Singapura juga lepas dari Federasi Malaysia dengan damai.

Namun separatisme juga



Pengibaran bendera RMS (Benang Raja) dilaksanakan setiap tahun.

sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambilalihan militer yang terjadi sebelumnya. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menganggap bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai ke-

merdekaan. Ini termasuk kelompok Basque ETA di Perancis dan Spanyol, separatis Sikh di India pada 1980-an, IRA di Irlandia pada masa pergantian abad dan Front de Libération du Québec pada 1960-an. Kampanye gerilya seperti ini juga bisa menyebabkan perang sau-

Beberapa Gerakan Separatis di Indonesia

Gerakan Aceh Merdeka atau GAM

Sebuah organisasi yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara kedua pihak yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya sekitar 15.000 korban jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF).

GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.

Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Nusantara (FKMSN)

Gerakan yang dituntut makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompoknya tidak mengakui kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia, Pancasila, bendera, bahasa, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan UUD 1945. Ketua Umum FKMSN adalah Ahmad Suja'i, yang berasal dari Bogor. FKMSN mengklaim bahwa Sunda Nusantara sudah berdiri pada tahun 130 Masehi dengan pusat kerajaannya di Ujung Kulon dan wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Asia Tenggara. Tentu saja klaim ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pada bulan Mei 2006, kelompok ini telah ditangani

oleh Polri, dan sejumlah anggotanya ditangkap.

Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI)

Darul Islam artinya Rumah Islam, adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, kawedanan Cisayong Tasikmalaya, Jawa Barat.

Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam.

Dalam perkembangannya, DI menyebarkan hingga di beberapa wilayah, di antaranya DI/TII Jawa Barat, DI/TII Jawa Tengah, DI/TII Sulawesi Selatan, DI/TII Kalimantan Selatan, dan DI/TII Aceh.

dara seperti yang terjadi di Chechnya.

Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius sempit. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.

Daerah Basque di Spanyol, yang belum merdeka selama berabad-abad lamanya, mengembangkan kelompok separatis yang keras sebagai reaksi terhadap aksi penindasan yang kejam oleh rezim Francisco Franco. Hal yang sama terjadi di Ethiopia di mana para pemberontak Eritrea marah terhadap despotisme dan korupsi.

Separatisme etnis juga digunakan untuk merujuk kepada kelompok yang mencoba memisahkan diri dari segi budaya dan ekonomi atau ras meski tidak selalu menginginkan otonomi politik. Contohnya, kelompok keagamaan yang percaya bahwa umat mereka tidak boleh berinteraksi dengan penganut agama lainnya, kelompok berbasis ras yang ingin mengisolasi diri dari kelompok lainnya, atau separatisme lesbian-feminis merujuk kepada penggunaan orientasi seksual sebagai pernyataan politik. ■ RH

Mensos Bachtiar Chamsyah

Pentingnya Pendekatan dan Pemberdayaan

Munculnya kejadian yang berbau separatisme, akibat ketidakadilan sosial. Bagaimana tanggapan Anda?

Kita lihat di Papua dan Ambon memang kesejahteraan belum baik, dan di sana area yang paling mudah diprovokasi. Sebenarnya, bagi Papua khususnya, ada dana Otsus sampai Rp 24 triliun. Saya berharap dari dana Otsus tersebut, Gubernur Papua bisa menangani masalah-masalah sosial dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut saya hal seperti ini harus dilakukan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan TNI/Polri saja. Harus ada kerjasama. Jadi ya ada dana Otsus, itu merupakan bagi hasil Freeport. Kita juga berusaha membantu, memang kadang kala mungkin tidak semua orang (merasa puas, Red). Kalau kita berurusan dengan mereka susah juga, karena mereka menuntut terus.

Kalau di Ambon, bisa juga dikatakan masalah kesejahteraan, juga politis. Kadang kala kalau orang punya cita-cita, makan satu kali pun tak masalah asalkan cita-cita tercapai. Itu militansinya. Tetapi secara fisik gerakan separatis itu sangat kecil ya, tapi mereka beruntung. Zaman sekarang kan Zaman kebebasan. Mass media meliput seolah mereka memiliki kekuatan yang besar. Sebenarnya tidak,



foto: berindo wilson

menurut saya ini kecil sekali.

Tetapi ada anggapan dana-dana itu tidak sampai ke bawah?

Saya kira kalau umpamanya gubernur diduga menyelewengkan dana, itu tugas kepolisian dan kejaksaan. Jangan kebijakan diubah karena faktor-faktor kasus.

Pada intinya pendekatan sosial yang ideal itu seperti apa?

Misalnya di Papua, rumah itu kan tidak ada. Bangunlah rumahnya, berilah bimbingan tentang pemberdayaan masyarakat. Misalnya mereka di daerah Pegunungan Bintang, pakaiannya pun sangat primitif, kita seolah-olah berada di zaman batu. Kalau kita masuk ke sana harus hati-hati karena faktor budaya. Dulu Akub Zaenal membuat Operasi

Koteka, dia gagal. Mengapa? Karena orang di sana tidak mengerti apa fungsi baju.

Biasanya orang Papua tidak memakai baju, badannya diolesi minyak babi, supaya tidak digigit nyamuk. Kita beri mereka baju, mereka senang karena masih baru. Tetapi setelah seminggu karena tak dicuci, muncullah kutu tungau. Tubuh mereka menjadi gatal-gatal. Lalu mereka sebut baju itu setan, karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya memakai baju, bahwa baju harus dicuci. Jadi pendekatannya bukan hanya bagaimana harus survive, tapi lebih dari itu.

Di Ambon, Departemen Sosial mempunyai program. Program-program untuk pengungsi, program harmonisasi sosial, dan program jembatan persahabatan sosial. ■ RH, SP, NAH

Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bagian barat pulau Papua (yang lazim disebut Papua Barat) dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Irian Jaya Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Oom Nicolas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto.

Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan

ASEAN.

Republik Maluku Selatan

Adalah negara yang didirikan dengan maksud untuk memisahkan diri dari NKRI. Didirikan di sebelah selatan kepulauan Maluku, Indonesia pada tanggal 25 April 1950 dengan pimpinan antara lain:

Presiden: J.H. Manuhutu (hingga 3 Mei 1950)

Perdana Menteri: Albert Wairisal

Menteri Luar Negeri: Mr. Dr. Chr. R. S. Soumokil (sejak 3 Mei 1950).

Menteri Pendidikan: Johan Manusama (selama dua bulan, belakangan juga menjabat Menteri Pertahanan)

Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), melarikan diri ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja.

Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama dan kini Frans Tutuhatunewa.

Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

Sekarang, hanya sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga dengan para pengungsi RMS di Belanda yang terus memberikan dukungan, sedangkan mayoritas masyarakat Maluku melihat peristiwa pemberontakan RMS sebagai masa lalu yang suram dan ancaman bagi perkembangan kedamaian dan keharmonisan serta upaya pemulihan setelah peristiwa kerusuhan Ambon.

Pada saat kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatasnamakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor di balik kerusuhan Ambon.

Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.

Kelalaian di Kudamati

Para penari Cakalele itu bisa menerobos karena menggunakan tanda pengenal asli sebagai akses masuk.

Insiden penari Cakalele yang mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perayaan Hari Keluarga Nasional XIV di Lapangan Merdeka, Kudamati, Ambon, (29/6), membuka mata pemerintah dan rakyat Indonesia, bahwa ide separatisme belum hilang dari Tanah Air.

Peristiwa itu bukan saja menimbulkan ketegangan antara pihak pasukan pengamanan Presiden dengan Badan Intelijen Negara (BIN), namun juga sekaligus menandai kelalaian pengamanan terhadap kepala negara.

Hasil temuan sementara tim evaluasi atas kasus ini menyebutkan, kesalahan disebabkan kurang koordinasi antara bagian acara dengan pengamanan. Pasalnya, tarian Cakalele tidak dijadwalkan sebelumnya.

Diduga ada pihak panitia yang terlibat. Polisi tengah mencari siapa panitia yang memberikan tanda pengenal sebagai akses masuk kepada

para penari itu. Karena tanda pengenal yang mereka punyai itu ternyata asli.

Pengamanan seorang presiden ditangani oleh badan pelaksana tingkat pusat yang bernama Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres yang Markas Komandonya ada di Jalan Tanah Abang II Jakarta Pusat. Pasukan ini terbagi atas tiga kelompok atau grup yaitu Grup I adalah untuk pengamanan presiden dan keluarga, Grup 2 untuk pengamanan wakil presiden serta Grup 3 adalah untuk mengawal tamu-tamu negara baik presiden maupun perdana menteri.

Namun, pada dasarnya kegiatan mereka bersifat rahasia karena melakukan operasi militer nonperang. Kegiatan mereka baru terasa oleh umum jika jalan-jalan ditutup karena ada presiden atau wakil presiden yang akan melewati jalan tertentu.

Sementara itu, jika presiden atau wapres akan menghadiri acara di satu tempat umum baik yang tertutup seperti gedung atau tempat terbuka



Aksi aktivis RMS yang menyusup sebagai penari Cakalele berbuntut pada peng...

seperti lapangan maka kehadiran prajurit-prajurit Paspampres baru terlihat terutama karena mereka harus memeriksa semua pengunjung dengan menggunakan alat *metal detector* untuk mengetahui apakah seseorang itu membawa senjata tajam atau tidak.

Maka jika terjadi kasus bobolnya sistem pengamanan presiden atau wakil presiden seperti yang terjadi di Lapangan Merdeka Ambon justru di depan Presiden Yudhoyono sendiri maka perlu dipertanya-

kan sejauh mana kemampuan Paspampres dan seluruh petugas militer dan Polri yang ikut terlibat dalam menjaga keamanan Presiden dan rombongannya.

Kegiatan pengamanan bagi presiden dan wakil presiden tidak hanya dilakukan secara fisik dengan mengerahkan pasukan berseragam dan bersenjata lengkap tapi juga melalui operasi intelejen untuk mendeteksi ada tidaknya upaya untuk mengganggu atau menghambat kehadiran orang nomor satu dan dua di negara itu.

Pangdam Pattimura Akhirnya Diganti

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Sutanto akhirnya mengganti bawahannya yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya insiden penyusupan dan tari Cakalele di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu di Ambon.

Tim evaluasi yang dibentuk oleh Menko Polhukam dan tim Mabes TNI menilai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/

Pattimura Mayjen Sudarmaidy bertanggung jawab atas kelalaian anak buahnya. Oleh sebab itu, ia resmi digantikan oleh Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary, sesuai Surat keputusan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bernomor SKEP Nomor 123/VII/2007, tertanggal 13 Juli 2007. Sudarmaidy lebih lanjut akan menjabat perwira

tinggi di Mabes TNI Angkatan Darat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutanto juga telah memecat Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Guntur Gatot Setiawan. Selanjutnya, Brigjen Guntur akan ditugasi sebagai staf ahli di Mabes Polri. Jabatan Kapolda Maluku diisi oleh Wakil Deputi Operasional Mabes Polri Brigjen Guntur Ariyadi. Brigjen Guntur Ariyadi pernah menduduki posisi sebagai komandan satuan

tugas di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia juga pernah bertugas di Maluku dan sekitarnya.

Sementara itu, soal pengganti posisi jabatan Danjen Kopassus sampai sekarang masih diproses. Marsekal Muda Sagom Tamboen Pusat Penerangan Mabes TNI lebih lanjut menyatakan ada kemungkinan pergeseran serupa juga terjadi di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Namun, kepastian



foto: repro indopos

geseran pejabat tinggi TNI dan Polri di daerah Maluku.

Para penanggung jawab keamanan bisa saja berdalih bahwa karena keterbatasan mereka maka tidak mungkin dilakukan operasi intelijen dan pengamanan terbuka secara besar-besaran.

Soal pengamanan kepala negara, mungkin Indonesia bisa belajar dari pasukan pengamanan kepala negara di beberapa negara lainnya. Meski demikian, mereka juga bukannya tidak pernah kecolongan. Dalam sejarah Amerika Serikat, beberapa presidennya mengalami bebe-

rapa kali pembunuhan dan upaya pembunuhan. Sejarah juga menunjukkan telah terjadi pembunuhan atau upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri India Indira Gandhi serta Presiden Mesir Anwar Sadat di tempat terbuka.

Seandainya di Lapangan Merdeka Ambon salah satu penari itu melemparkan tombak tajam, menembakan senjata api atau sekadar melempar batu ke arah Presiden Yudhoyono, dampaknya lebih buruk dari sekarang. ■ RH



foto: berindo wilson

Danjen Kopassus Mayjen Rasyid Qurnuen Aquary

tersebut masih belum dihasilkan mengingat proses pembahasan dan

evaluasinya masih berjalan sampai sekarang. ■ MLP

Kasus Kelalaian Pasukan Pengamanan Presiden

5 September 1975

Presiden AS Gerald Rudolph Ford, Jr, mengalami dua kali upaya pembunuhan namun tidak terluka. Percobaan pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 5 September 1975 di Sacramento, California. Lynette Fromme, pengikut Charles Mason mengarahkan pistol Colt 45 ke Ford, namun tidak berhasil membunuhnya. Fromme dipenjarakan seumur hidup.

Pada 22 September 1975, Sara Jane Moore mencoba membunuh Ford saat dia sedang mengunjungi San Fransisco. Usahanya gagal. Satu orang terluka kena tembakan, dan Moore dipenjarakan seumur hidup.

30 Maret 1981

Presiden AS Ronald Reagan. Pada tanggal 30 Maret 1981, dia dan sekretaris persnya James Brady serta dua orang lagi diserang dengan tembakan oleh John Hinckley Jr. Paru-paru kiri Reagan tertembus peluru, namun dia selamat.

6 Oktober 1981

Presiden Mesir Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh perwira militer yang tergabung dalam kelompok Jihad Islam Mesir. Dia dibunuh karena dianggap mengkhianati Islam dan dunia Arab dengan menandatangani perjanjian Camp David, sebuah perjanjian damai dengan Israel. Pelakunya adalah Khalid Islambuli. Dia dan sejumlah perwira militer dijatuhi hukuman mati.

31 Oktober 1983

Perdana Menteri India Indira Gandhi dibunuh oleh dua orang pengawalnya, Satwant Singh dan Beant Singh di taman kediamannya, saat ia hendak menghadiri wawancara dengan Peter Ustinov, aktor Inggris.

Kedua pembunuh Gandhi itu diidentifikasi sebagai pengikut aliran Sikh. Mereka membunuh Gandhi karena mengeluarkan instruksi penyerangan terhadap Kuil Emas milik para pengikut Sikh di negara bagian Punjab.

Desember 2003

Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf selamat dari dua upaya pembunuhan di Rawalpindi, dekat Islamabad. Tersangka diduga terkait Al-Qaeda. Musharraf akan dibunuh karena mendukung perang melawan teroris yang dipimpin AS.

Serangan kedua di wilayah yang sama saat pengebom bunuh diri menabrakan mobil penuh bahan peledak ke konvoi Presiden. Serangan ini menewaskan 15 orang.

10 Mei 2005

Presiden AS George W. Bush saat berpidato di Georgia, sebuah granat dilemparkan oleh Vladimir Arutian ke arah podium dimana Bush dan Presiden Georgia Mikhail Saakashvili duduk. Granat itu jatuh di tengah kerumunan namun tidak meledak. Arutian ditangkap pada bulan Juli 2005 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

18 September 2006

Presiden interim Somalia Abdullahi Yusuf Ahmad nyaris tewas dalam insiden ledakan bom. Dua bom berdaya ledak tinggi meledak beberapa saat setelah presiden meninggalkan gedung parlemen di Baidoa. Sedikitnya 11 orang tewas, termasuk adik Abdullahi.

Tangan Asing di Bumi Pertiwi



foto: repro indopos

OPM mengibarkan bendera Bintang Kejora saat kongres Masyarakat Adat Papua.

Peran negara-negara asing dalam mendorong ketidakstabilan di beberapa provinsi di Indonesia hampir tak bisa ditutupi.

Dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua beberapa waktu lalu, dihasilkan tiga butir kesepakatan yang jelas-jelas berbau separatisme. Ketiga butir kesepakatan itu adalah, Papua bebas dari penjajahan, mengembalikan hak-hak dasar, dan meneruskan perjuangan rakyat Papua.

Dalam konferensi yang membatalkan Forkorus Yoboisembut sebagai Ketua Dewan Adat Papua yang menggantikan Tom Beanel itu, juga mengemukakan tuntutan referendum dan proklamasi kemerdekaan Papua.

Niat menggelar referendum

itu bukan yang pertama kali. Pada konferensi pertama tahun 2002, usulan itu juga dimunculkan. Menurut Direktur Ridep Institute, Muradi, isu referendum selalu laku dijual ke pihak asing, terutama Amerika Serikat (AS).

Dalam meredam potensi separatisme, sebagian upaya pemerintah sebenarnya sudah lumayan berhasil. Tetapi kemudian mencuat menjadi gelombang ke permukaan karena faktor kekuatan asing. Di Papua, fakta peran Amerika Serikat dalam mendorong ketidakstabilan provinsi itu hampir tak bisa ditutupi, yang secara terbuka melakukan in-

tervensi seperti kunjungan anggota Kongres AS pertengahan Juli ini yang mengungkit masalah Papua. AS jelas memiliki kepentingan agar bisa mengeruk kekayaan Papua. Demikian pula dalam kasus bendera RMS baru-baru ini di Ambon, faktor kekuatan asing atau Belanda banyak disebut terlibat.

Seperti diketahui, AS sudah lama mengincar Papua untuk dijadikan pangkalan militer baru, menggantikan pangkalan Clark dan Subic di Filipina yang sudah lama ditinggalkan. Tentu saja Pemerintah Indonesia menolak, dan itu tidak bisa ditawar lagi.

Nah, jika sampai terjadi referendum dan Papua merdeka, AS berpeluang mewujudkan pangkalan impiannya di Papua. Faktanya pada 2005,

Kongres AS mengesahkan House Representative 2601 atau Undang-Undang Nomor 2601 mengenai Papua. Isinya mendukung kemerdekaan Papua, mempertanyakan keabsahan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, dan mengkritik pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Kini, setelah isu referendum kembali mengemuka, seorang anggota Kongres yang ikut menggolkan HR 2601, Eni Faleomavaega, menyempatkan berkunjung ke Indonesia, 4-6 Juli lalu. Ketua Sub-Komisi Wilayah Asia Pasifik ini tadinya berniat secara khusus bertandang ke Papua.

Namun, Pemerintah Indonesia tidak memberi izin. Kendati demikian, Faleomavaega dipertemukan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono dan sejumlah anggota DPR Komisi Pertahanan dan Luar Negeri, dalam beberapa kesempatan terpisah.

Menurut Gubernur Lemhanas yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Muladi, ada tiga cara menghadapi separatisme. Pertama secara represif yuridis, yakni dengan penegakan hukum yang memperhatikan HAM. Kedua, pemerintah juga harus memperhatikan rasa keadilan sosial di wilayah yang dilanda aksi separatisme untuk mengetahui masalah dasar yang menjadi penyebab kasus tersebut terjadi. Ketiga, dia juga menyarankan, pentingnya pendekatan budaya kepada para tokoh-tokoh di berbagai daerah, termasuk yang dilanda kecenderungan aksi separatisme.

Dalam pandangannya, gerakan-gerakan separatisme tersebut sangat berbahaya jika memiliki jaringan internasional, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan dana yang kuat, serta adanya organisasi yang hirarkis secara baik. ■ RH

WAWANCARA

Drs. Ganda Upaya, MA:



foto: berindo amron

Papua Perlu Pendekatan Social Welfare

Untuk meredam gerakan separatisme, berdasarkan Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat, pemerintah menyiapkan dana pembangunan sebesar Rp 17 triliun selama 2007. Dana itu melengkapi dana alokasi umum (DAU) yang Rp 11 triliun. Pemerintah berharap keinginan warga Papua untuk memisahkan diri bisa ditiadakan.

Apakah skenario itu betul-betul terwujud? Apa sesungguhnya yang dibutuhkan Papua di masa mendatang? Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua? Bagaimana kaitan kejadian Papua dengan rangkaian insiden tarian Cakalele di Ambon, dan deklarasi pendirian Partai

GAM di Aceh?

Berikut petikan wawancara *Haposan Tampubolon* dan *Amron Ritonga* dari *Berita Indonesia* dengan **Drs Ganda Upaya, MA**, staf pengajar pada Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, yang sudah melakukan penelitian langsung ke tengah-tengah masyarakat Papua.

Di Ambon terjadi insiden tarian Cakalele. Di Papua terjadi penaikan bendera Bintang Kejora. Selanjutnya dideklarasikan Partai GAM di Aceh. Fenomena separatisme model apa ini, bagaimana solusinya?

Masalah separatisme sudah berlarut-larut hilang, timbul, hilang, timbul. Rupanya sangat tergantung situasi dalam negeri. Ketika sistem politik Indonesia, dan sistem ekonomi kurang responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat maka isu-isu (separatisme) itu, yang memang sudah ada di kepala (para pelaku) intelektualnya, dimunculkan kembali.

Yang kedua, kita bisa melihat ada semacam keragu-raguan dari aparat negara untuk bertindak. Dan itu diketahui oleh tokoh-tokoh OPM, RMS. Kalau dilakukan kekerasan akan menjadi isu terjadi pelanggaran HAM berat, dan itu justru akan menimbulkan dukungan dari internasional.

Tetapi yang menarik, kejadian di Ambon ternyata di negeri Belanda yang ikut demonstrasi sedikit sekali orangnya. Bisa dihitung dengan jari, dan itu orang-orang tua. Jadi isu ini tidak terlalu memperoleh gaung yang besar. Itulah yang saya lihat.

Mengenai perjuangan ideologi mereka ingin membebaskan diri?

Perjuangan ideologi selalu ada intelektual, ada ideologis. Sekarang ada organisasi yang internal ada yang eksternal. Sepanjang pemerintah daerah atau pusat dapat menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki kesejahteraan, dengan bukti yang nyata, saya pikir dengan sendirinya (itu) tidak akan mendapatkan dukungan walau masih ada yang ingin terus mengibarkan bendera tiap tahun.

Pengibaran bendera mereka katakan sebagai ekspresi kultural. Tapi saya melihat itu politik kultural. Karena mereka ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda, identitas yang berbeda, dan memperjuangkan yang tujuannya adalah suatu negara yang memang lain.

Yang menjadi persoalan dengan desentralisasi, dengan otonomi daerah (Otda), ada masalah-masalah yang dianggap tidak memuaskan. Misalnya di Papua masalah Otsus, kita bisa melihat bahwa pemerintah lokalnya tidak memuaskan.

Di media massa yang pernah saya baca ada kasus ratusan milyar rupiah yang tidak pernah jelas bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawabannya. Kasus seperti itu seakan-akan pemerintah tidak ada kaitan, padahal sebenarnya ada kaitan. Karena dana-dana yang ratusan miliar itu tidak sampai ke bawah.

Yang menjadi sulit di sini bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Karena masalah meningkatkan kesejahteraan, dilihat dari segi ekonomi, tidak

hanya dengan digelontorkan uang banyak. Tapi, apakah uang-uang memang diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Apakah perlu perlakuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan?

Saya pikir, ya. Dalam arti, pemerintah daerah mengidentifikasi masalah-masalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jangan kebutuhan masyarakat apa yang diturunkan lain, akan sia-sia saja. Yang menjadi persoalan, masyarakat sendiri suaranya tidak ada. Jadi kebijakan yang dibuat menjadi kurang aspiratif.

Yang harus dipikirkan, dana-dana yang begitu besar diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang *social welfare* sesuai aspirasi masyarakat lokal. Saya pikir paling tidak itu akan mengurangi dukungan terhadap separatis.

Mereka tertinggal jauh dalam banyak hal, lalu mau dilakukan *social welfare* sama saja seperti membuang garam ke laut?

Memang kendala untuk merubah cara berpikir, paradigma atau kultural. Tapi saya pikir besar keinginan mereka untuk merubah diri.

Saya baru pulang dari daerah, ada keinginan agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, guru-guru yang baik, air bersih dan agar mendapatkan infrastruktur jalan-jalan.

Seperti Anda sebutkan, Pemda sendiri terkait dengan kasus-kasus. Dimana benang merah nya?

Mereka yang terlibat kasus-kasus, yang memang diinginkan oleh masyarakat lokal kelihatannya harus diselesaikan secara hukum. Sebab kalau tidak akan menjadi preseden yang tidak baik.

Aktor interlektual separatisme selalu mengedepankan isu ekstrim, bumi kaya dengan sumber daya alam (SDA) tetapi tingkat kesejahteraan mereka masih rendah. Bagaimana mengcounter isu ini?

Saya pikir harus ada transparansi. Seberapa banyak *revenue* yang jatuh ke pusat, ke Pemda. Kemudian, seberapa jauh pemerintah provinsi bagi-bagi dengan pemerintah kabupaten.

Dengan otonomi kalau memang mereka mempunyai perencanaan yang baik, mempunyai misi yang bersih dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat sudah bisa. Sekarang melihatnya lebih mudah seberapa jauh dana-dana APBD benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut saya infrastruktur yang harus diperbaiki.

Sekarang yang dibutuhkan adalah pelatihan-pelatihan, sekolah-sekolah

kejuruan. Karena itu mengajarkan orang bagaimana sehabis lulus bisa bekerja. Kalau tidak, mereka akan kalah dengan pendatang.

Pengibaran bendera RMS dan Bintang Kejora masih bisa terjadi padahal kita sudah puluhan tahun merdeka?

Selama ini tidak pernah tuntas penyelesaiannya. Ketika penyelesaiannya secara militer dianggap selesai, tidak dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan.

Ketika orang dianggap nyerah, dihukum dianggapnya tuntas. Mestinya kemudian masuk dengan program-program kesejahteraan sosial. Misalnya di Ambon dan Papua banyak yang menganggur.

Sekarang ketika duit dijatuhkan kepada mereka tidak juga kelihatan. Ada kecenderungan kalau yang korupsi orang-orang kita maklumin sajalah.

Tokoh-tokoh separatisme biasanya mengerucut kepada segelintir



orang. Bagaimana *treatment* khusus kepada mereka?

Bagi beberapa orang yang memang bercita-cita seperti itu, tidak bisa. Yang mesti kita perlihatkan adu fakta sejarah, yaitu sejarah Aceh, sejarah Maluku, sejarah Papua.

Jadi jangan kita bercita-cita semuanya akan bisa didekati kemudian tidak lagi mengibarkan bendera. Ada garis kerasnya dan cukup cerdik cari momen-momen. Momen yang paling bagus seperti yang di Ambon, di muka presiden, diliput, dan itu mereka tunggu muncul. Tapi ada batas-batasnya sebab ini masalah kedaulatan, harus tegas.

Ketegasan seperti apa yang Anda

maksud?

Dianggap jalan persuasif tidak bisa. Kita tidak bisa membiarkan itu terus. Harus dilakukan prosedur hukum. Kalau mau NKRI ya NKRI. Kalau tidak ya sudah, berarti mereka sulit sekali dibiarkan.

NKRI sudah final tapi masih banyak potensi separatisme yang bisa menceraiberaikan Indonesia?

Karena NKRI itu suatu proses, tidak fiks. NKRI bukan seperti kulkas atau televisi seperti barang jadi. Ini tergantung sosialisasi kepada generasi berikutnya: pendidikan mengenai sejarah Indonesia, kesehatan, kesejahteraan dan juga sistem politik. Isi NKRI, manusia Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke.

Selama ada ketimpangan, potensi itu akan muncul. Apalagi masyarakat kaya di daerah-daerah tambang, harus dipikirkan cara berpikir, paradigma bapak-bapak yang di atas harus NKRI tidak bisa ditawar lagi.

Berarti dibutuhkan Indonesia yang kuat. Apa saran Anda menjadikan Indonesia yang kuat?

Kelihatannya sudah seperti retorika *clean government*. Yang kedua, harus ada pemimpin yang bisa membawa misi dan mewujudkan. Kemudian birokrasi, badan-badan itu responsif terhadap aspirasi masyarakat. Masyarakat harus aktif, tidak boleh pasif biarin saja, 'Ah, capek deh,' tidak bisa. Mereka harus aktif memberikan kritik dalam menolak suatu kebijakan.

Melihat catatan OPM, RMS dan GAM bagian dari organisasi separatis. Mengapa sulit diselesaikan?

Terutama di daerah Aceh dan Papua memang mereka merasa selama ini tidak diperhatikan, merasa ditindas, jauh sekali kesejahteraan.

Apa solusi yang Anda berikan mengatasi separatisme?

Harus diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang riil kepada daerah-daerah tertentu, bahwa sudah ada perubahan sikap dari rejim pemerintah. Kami memang ingin membangun Anda, tapi sekarang Anda gimana nih, duitnya sudah ada, misalnya begitu. Nah, kami tawarkan kebijakan seperti ini.

Fakta yang Anda amati, ketiga gerakan semakin menguat atau melemah?

Dia bisa menguat ketika tidak ada perhatian, ketika ada delegitimasi dari rejim. Sebenarnya rejim yang salah, bukan NKRInya, tapi bagi orang separatis NKRInya yang mereka jadikan sasaran. ■

BK-DPR Tebang Pilih?

Putusan BK-DPR atas kasus aliran dana nonbudgeter DKP diprotes. BK dianggap tebang pilih dan lebih kejam dari pengadilan. Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun menyatakan siap menghadapi semua itu.

Badan Kehormatan DPR (BK-DPR) kembali diuji integritasnya. Lembaga kelengkapan DPR yang diberi mandat menegakkan citra DPR terkait dengan perilaku dan etika para anggotanya ditantang untuk bersikap objektif dan tidak tebang pilih. BK juga didesak mengusut 30 anggota DPR lainnya yang diduga menerima dana DKP.

Tuntutan agar tidak melakukan tebang pilih ini disampaikan kepada BK-DPR setelah lembaga ini secara aklamasi dalam sidangnya, Senin (9/7) lalu, menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota DPR. Ketiganya dinilai terbukti menerima aliran dana nonbudgeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di era Rokhmin Dahuri.

BK juga meneruskan kasus ketiga anggota dewan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Fahri Hamzah (F-PKS), Awal Kusumah (F-PG) dan Endin AJ Soefihara (F-PPP). Bahkan Fahri dilarang menjabat pimpinan alat kelengkapan DPR sampai masa jabatannya berakhir.

Wakil Ketua BK-DPR Gayus Lumbuun yang memimpin rapat pleno BK-DPR saat itu menyatakan pula, dua anggota DPR direhabilitasi. Yakni Slamet Effendy Yusuf dari F-PG dan A.M.Fatwa dari F-PAN. Alasannya, karena dana yang diterima tidak besar dan memahami yang bersangkutan mengira uang itu milik Rokhmin Dahuri pribadi, bukan dana pemerintah. Dana itu juga digunakan untuk yayasan sosial dan BK sudah melakukan pengecekan langsung.

Tak pelak, putusan BK-DPR ini mengundang protes. Bah-

kan F-PKS meminta keberadaan BK ini ditinjau ulang. Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq menganggap apa yang dilakukan BK lebih kejam dari pengadilan. Sementara F-PG memprotes keras keputusan BK yang meneruskan kasus Awal Kusumah ke KPK. Dalam suratnya yang ditandatangani Wakil Ketua F-PG Darul Siska dan Wakil Sekretaris Syamsul Bachri, F-PG meminta pimpinan DPR menegur keras pimpinan BK.

Wakil Ketua F-PG Ferry Mursidan Baldan yang pernah diperiksa BK-DPR dalam kasus dana pembahasan RUU-PA mempertanyakan keputusan BK yang membebaskan Slamet Effendy Yusuf dan A.M.Fatwa. "Seharusnya sama. Satu kena, semua kena. Jangan ada yang kena, ada yang tidak," katanya seperti dikutip *Kompas* (14/7).

Sebelumnya, Fahri juga memprotes putusan BK tersebut. Alasannya, dana DKP itu diterimanya sebelum menjadi anggota DPR. Dana itu diterima dalam kapasitas pribadi sebagai konsultan Rokhmin Dahuri.

Endin yang baru kembali dari ibadah umroh juga menolak sanksi tersebut. Dia mengaku saat dipanggil BK-DPR, Gayus mengatakan kalau dirinya (Endin-red) menerima transfer dana DKP melalui rekening bank dan menerima pembiayaan untuk acara PPP di Cirebon. "Saya disebut menerima dana itu sebagai pengurus PPP. Mana buktinya? Sampai sekarang BK tidak menyampaikan bukti itu kepada saya," kata Endin.

Terhadap semua protes itu, Gayus menyatakan siap menghadapi demi tegaknya kehor-



foto: repro kompas

Wakil Ketua BK-DPR Gayus Lumbuun saat mengumumkan hasil pemeriksaan BK-DPR.

matan DPR. "Kami tidak akan takut. Siapa pun yang ingin menggugat, silakan saja. Ini kehormatan kami. Kalau semua takut, tidak akan ada hakim, tidak akan ada jaksa, tidak akan ada BK" ujarnya dalam jumpa pers di gedung DPR (13/7).

Dia menilai wajar adanya sikap pro dan kontra dalam masalah ini. Mengingat persoalan etika selalu menimbulkan perdebatan. "Ada yang menganggap keputusan BK ini terlalu lemah. Seharusnya anggota bersangkutan di-*recall* atau dipenjara. Ada juga yang beranggapan keputusan ini lebih kejam dari pengadilan," kata Gayus.

Karena itu, menurut Gayus, penegakan kode etik selalu dipilih dari komunitas bersangkutan. Anggota BK pun terdiri dari wakil-wakil fraksi di DPR.

Terkait kasus dana DKP ini, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menegaskan pimpinan DPR mendukung sepenuhnya upaya BK untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPR yang diduga menerima dana nonbudgeter DKP. Namun

menurut politisi PKB ini, dukungan itu akan diberikan selama BK punya bukti kuat atas keterlibatan anggota DPR sebagai penerima dana non-budgeter DKP.

BK-DPR sebelumnya juga telah mengenakan sanksi kepada beberapa anggota dewan yang dinilai melanggar etika. Diantaranya pemecatan Azidin, anggota F-PD yang dinilai melanggar etika dengan menjadi calo ibadah haji. Selain itu, BK juga menjatuhkan sanksi teguran kepada anggota F-PDIP dalam kasus rapat paripurna BBM. Saat itu F-PDIP tidak menolak atas penenaan sanksi tersebut.

Mengang terasa pahit dan sulit bagi seseorang, termasuk anggota DPR, untuk bisa menerima sanksi yang dijatuhkan. Siapa pun akan berusaha mengelak dengan berbagai argumen dan alasan. Namun bila ternyata kemudian bukti-bukti yang ada justru memperkuat penenaan sanksi itu, maka hal tersebut bisa jadi justru akan membuat yang bersangkutan semakin terpuruk di mata publik. ■ SP

Setelah Presiden Menangis

Pemerintah menyatakan tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi korban lumpur. Negara hanya akan menalangi pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur.

Perempuan setengah baya itu menatap hamparan lumpur nan luas di hadapannya dengan mata kosong. Sesekali dia mengusap matanya yang kering. Sudah tak ada lagi air mata untuk menangisi rumah dan sawahnya yang kini terbenam di bawah lumpur. Satu-satunya harapan adalah segera mendapatkan ganti rugi yang layak agar bisa meneruskan hidupnya di tempat lain.

Saat ini dia terpaksa tinggal di pengungsian, di balik tanggul yang menghalangi lautan lumpur. Tapi kecemasannya belum padam. Bagaimana jika tanggul itu jebol dan menggenangi pula lokasi pengungsian? Hendak ke mana lagi dia dan para tetangganya mengungsi?

Dipimpin budayawan Emha Ainun Nadjib, 20 orang pengungsi korban Lapindo menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, (24/6). Di depan Presiden, mereka menumpahkan unek-uneknya soal ganti rugi yang tidak kunjung cair dan derita yang mereka rasakan selama ini. Media massa mengekspos reaksi Presiden yang terharu sampai menitikkan air mata mendengar cerita mereka.

SBY sampai memerintahkan kunjungan ke Sidoarjo secara mendadak dan membuka kantor sementara selama tiga hari di Wisma Perwira Angkatan Laut, sekitar 300 meter dari Bandara Juanda.

Presiden yang tidak menemui masyarakat korban lumpur, sempat menjengkelkan warga. Menurut Presiden, dia memang tidak berencana bertemu korban. Tujuan utamanya adalah memimpin rapat agar Lapindo segera membayar ganti rugi.

Berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo men-

dorong pemerintah turun tangan dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang salah satu tugasnya melakukan verifikasi dokumen ganti rugi kepada korban lumpur. Presiden SBY lantas mengeluarkan Perpres No. 14/2007 mengenai percepatan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ganti rugi harus dibayarkan dalam waktu 10 minggu terhitung 1 Juni 2007.

Kendati sudah ada aturan, tampaknya dalam pelaksanaan tak selancar yang dibayangkan. Ini membuat para korban beramai-ramai berunjuk rasa sampai ke Jakarta hingga akhirnya masalah ini dibahas di DPR yang berancang-ancang menggunakan hak interpelasi. Rupanya tekanan politik itu memberi dampak positif karena SBY menjadi lebih cepat bergerak.

Soal Ganti Rugi

Semula muncul wacana agar pemerintah memberikan dana talangan. Bahkan hal itu sudah bergulir di Senayan. Namun presiden berpendapat PT Lapindo masih mampu sehingga tak diperlukan dana talangan dari APBN. Rasanya juga menjadi kurang adil kalau sampai pemberian ganti rugi menggunakan anggaran pemerintah. Bukan kita tak peduli dengan nasib warga yang menjadi korban dan sudah menderita lebih setahun. Hanya saja kalau itu dilakukan seperti memberikan kesempatan bagi Lapindo, milik keluarga Aburizal Bakrie itu lari dari tanggung jawab. Sementara kita tahu anggaran pemerintah pun makin terbatas.

Karena itu, pemerintah menyatakan tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi korban lumpur. Negara hanya akan menalangi pembangunan infrastruktur yang rusak akibat lumpur. Tahun ini



Warga korban lumpur Lapindo berdemo ke Jakarta.

targetnya pembebasan lahan dulu. Tahun 2008, pembangunan infrastruktur dimulai.

Lapindo sendiri menyanggupi melaksanakan kewajiban dengan membuka *escrow account* (rekening penampungan sementara) untuk pembayaran ganti rugi sejumlah Rp 100 miliar. Uang tersebut untuk pembayaran uang muka ganti rugi 20%. Sedangkan 80% sisanya akan dilunasi dalam jangka waktu dua tahun. Lapindo juga akan menyediakan sejumlah peralatan untuk keperluan mengelola semburan lumpur.

Nyatanya, ganti rugi awal sebanyak 20% ditolak sebagian besar warga korban lumpur. Mereka menginginkan ganti rugi langsung 100%. Namun ada juga yang setuju. Ini mengakibatkan para pengungsi terpecah dua kelompok, yang setuju ganti rugi awal 20% dan yang ingin ganti rugi dibayar 100% atau minimal separuhnya.

Warga korban lumpur yang saat ini masih mengungsi di Pasar Baru, Porong, harus pula berhadapan dengan keputusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo memberikan batas waktu hingga



foto: berindo wilson

kenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dan siap melawan jika diusir. Padahal, Pasar Porong akan segera dipakai oleh para pedagang pindahan dari Pasar Porong Lama.

Kesepakatan Jual Beli

Di sisi lain, ada kendala dalam hal percepatan pembayaran. Pencairan ganti rugi tergantung selesai tidaknya proses verifikasi. Tim verifikasi ini terdiri dari 9 orang yang bertugas mendata berkas lahan milik korban. Berkas yang sudah diverifikasi akan diserahkan ke PT Minarak Lapindo Jaya untuk segera dibayarkan ganti rugi. PT Minarak merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi tersebut. Tim verifikasi sendiri sudah menyebarkan 13 ribu berkas untuk diisi para korban Lapindo. Diharapkan berkas-berkas itu segera dikembalikan untuk diverifikasi dan mereka bisa segera mendapat ganti rugi.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan, bahwa pada dasarnya pembayaran yang dilakukan PT Lapindo Brantas bukanlah seperti ganti rugi biasa. Seperti diutarakannya kepada *Berita Indonesia*, sistem pembayaran itu sebenarnya lebih kepada semacam kesepakatan jual beli.

Dalam hal ini pihak pembeli adalah PT Lapindo, penjualnya penduduk yang rumah dan lahannya terbenam lumpur. Maka berlakulah hukum jual beli, dimana perlu diketahui luas tanah secara konkret disertai dokumen-dokumen sah sebagai bukti.

Untuk tanah tanpa sertifikat, misalnya, ada keharusan verifikasi berlapis agar bisa mendapatkan ganti rugi. Tanah dengan letter C dan petok D serta tidak ber-IMB termasuk di dalamnya. Dalam situasi bencana, kita maklum tentu sebagian besar warga ada dalam kelompok ini. Menurut Mensos, jika tak ada dokumen yang bisa dijadikan bukti, penduduk yang bersangkutan harus meminta surat keterangan yang ditandatangani oleh pemerintah daerah, yang memuat luas tanah atau rumahnya.

Hal itu untuk mencegah penyalah-

gunaan. Pasalnya harga yang diberikan Lapindo lumayan besar untuk ukuran setempat. Ada kesepakatan bahwa tambak per meter persegi dihargai Rp 125.000, kemudian tanah kering atau tanah darat dibayar Rp 1.000.000 per meter persegi, sementara bangunan dihargai Rp 1.500.000 per meter persegi.

Salah satu tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya, karena itu Mensos membentuk tim verifikasi BPLS yang terdiri dari berbagai macam unsur, di samping pemerintah daerah, juga masuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan kejaksaan. Menurut Mensos, diikutsertakannya kepolisian dan kejaksaan diharapkan masyarakat tidak melakukan kebohongan berkaitan dengan klaim ganti rugi.

Mensos juga memahami adanya protes sebagian korban Lapindo yang menginginkan ganti rugi dibayarkan sekaligus. Bagi penduduk yang memiliki tanah luas, mungkin mereka tak sabar ingin segera mendapatkan pembayaran yang jumlahnya besar, sehingga mereka bisa segera membangun rumah baru dan membuka usaha.

Sesungguhnya harus diperjelas sejak awal bahwa publik harus memiliki akses untuk bisa memastikan bahwa yang terjadi bukannya "pelimpahan tanggung jawab" dari Lapindo ke pemerintah. Karena itu, seluruh biaya penanggulangan semestinya bisa diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan ke publik.

Soal kedua adalah kejelasan sampai kapan Lapindo harus bertanggung jawab. Ketua tim, Basuki Hadi Mulyono, mengakui, keberhasilan menutup lumpur hanya 10 persen. Sebuah perkiraan yang realistis, karena para ahli geologi pun pesimis semburan itu bakal bisa dihentikan.

Implikasi dari kemungkinan itu, solusi terhadap persoalan ini adalah solusi jangka panjang, terutama menyangkut kerusakan lingkungan bila lumpur memang akan dialirkan ke laut. Pertanyaan yang muncul, apakah Lapindo bebas dari tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, yang mungkin saja baru terasa bertahun-tahun kemudian? Atau ini menjadi tanggung jawab pemerintah? ■ RH

pertengahan Juli 2007 agar para korban lumpur Lapindo meninggalkan lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong. Hal ini untuk menghindari bentrokan dengan para pedagang.

Para warga itu bertahan. Mereka baru akan meninggalkan lokasi pengungsian jika Lapindo menyiapkan lahan relokasi di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Pengungsi di Pasar Porong itu berasal dari Desa Renokenongo yang sebagian besar telah terbenam lumpur. Mereka membentuk Paguyuban Warga Reno-

Kawasan Lumpur Lapindo Jadi Tambak

Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, pemerintah berencana menjadikan kawasan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, sebagai pusat tambak ikan lele. Hal itu untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan di kawasan tersebut.

"Sudah dicoba, ikan lele bisa hidup di lumpur Lapindo," kata Rahmat. Luas tambak ikan lele yang direncanakan, menurutnya, sekitar 500 hektare dari total luas kawasan yang tergenang lumpur 600 hektare. Pengelolaannya akan melibatkan masyarakat Sidoarjo. "Sekaligus

untuk pemberdayaan para korban," ujarnya.

Niat membangun tambak ikan lele, menurut mantan duta besar di Uni Soviet itu, merupakan solusi alternatif. Sebab, sejauh ini belum ditemukan manfaat lumpur Lapindo yang lebih baik.

Ia mengatakan, menyumbat lumpur panas agar tidak merembet ke kawasan pemukiman baru akan menjadi salah satu pekerjaan terberat pemerintah. "Setiap minggu kami melakukan *update*, jangan sampai lumpur panas meluas," kata Rachmat. ■

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah

Tidak Bisa Selesai dan



foto-foto: berindo wilson

Berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo mendorong pemerintah turun tangan dengan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang salah satu tugasnya melakukan verifikasi dokumen ganti rugi kepada korban lumpur.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkoordinasi di Sidoarjo, diputuskan percepatan pembayaran uang muka yang 20 persen mulai tanggal 1 Juli hingga 14 September. Setelah itu yang 80 persen lagi akan dibicarakan lebih lanjut. Memang harus diakui, beban PT. Lapindo Brantas sangat berat dan itu adalah risiko yang harus dihadapi. Dengan ketentuan baru itu maka perusahaan tersebut harus menyediakan dana sekurangnya Rp 100 miliar setiap minggu mengingat jumlah korban yang harus diberikan

ganti rugi lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK).

Suryo Pranoto, Retno Handayani, Azizah dan Wilson Edward dari *Berita Indonesia* berbincang-bincang dengan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, (11/7), tentang peran serta Departemen Sosial yang membentuk tim verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam penyelesaian kasus korban lumpur Lapindo ini. Demikian petikan wawancaranya.

Terkait dengan berlarut-larutnya kasus ini, apa langkah ke depan yang dilakukan tim verifikasi BPLS?

Saya jelaskan dulu dampak sosialnya lumpur ini. Sebelum saya jadi wakil dewan pengarah, sudah ada kesepakatan berapa luas areal terdampak itu, yakni hampir 641 hektare berdasarkan peta. Inilah yang menjadi tanggung jawab Lapindo. Di situ, ada pabrik, ada rumah-rumah. Tanggul itu harus dijaga, kalau dia meluber keluar, itu tanggung jawab APBN, tanggung jawab pemerintah. Nah, makanya saya berusaha untuk menjaga agar jangan sampai APBN yang menyangkut dampak sosial ekonomi ini harus membiayai itu.

Dalam peta terdampak itu ada rumah-rumah, ada tanah, ada tambak. Rupanya ada kesepakatan, ini bukan ganti rugi, tetapi semacam jual beli. Si pembeli adalah Lapindo, si penjual masyarakat, maka berlaku hukum jual beli, antara lain berapa panjang berapa lebar, luasnya itu berapa, apa bukti kebenaran luas itu. Nanti dia akan dikejar seperti itu karena

persentase tanah yang bersertifikat itu mungkin tak mencapai 10%. Jadi 90% persen itu hanya surat keterangan lurah, yang disebut dengan letter C dan patok D.

Kita harus cermat melihat ini, ketika saya masuk dan saya tahu ini ujungnya adalah jual beli, maka tentu si pembeli membutuhkan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Lapindo tidak mau bayar *dongk* kalau tak punya bukti-bukti itu. Bahasa kasarnya, dia kan bukan membeli angin, tapi membeli sebidang tanah atau sebuah rumah dengan batas-batas yang jelas. Si penjual harus punya kewenangan penuh, jangan sampai anak istrinya menggugat, atau cucunya menggugat.

Lebih dari 90% hanya memiliki letter C dan patok D. Yang kedua, walaupun punya bangunan tidak semuanya punya IMB. Ini masalah yang harus kita pecahkan, apa bukti kepemilikan itu. Maka kita bersepakat, kalau tidak punya

ngan Keras-kerasan

IMB, harus ada data survei Institut Teknologi Surabaya (ITS) tentang luas tanah, luas bangunan. Kalau tidak ada, ya surat keterangan yang ditan-datangani oleh pemerintah daerah. Tentu surat keterangan itu memuat berapa luas rumah itu.

Ini penting karena ada kesepakatan, bahwa tambak per meter persegi itu dibayar Rp 125.000, kemudian tanah kering atau tanah darat dibayar Rp 1.000.000 per meter persegi, sementara bangunan Rp 1.500.000 per meter persegi.

Itu sebabnya ada masyarakat, kalau itu ditotal seperti itu, saya hitung-hitung bisa saja dia dapat Rp 16 milyar, Rp 20 milyar, bahkan ada yang dapat Rp 45 milyar. Salah satu tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya, maka saya membentuk tim verifikasi, guna memverifikasi surat-surat keterangan dari penduduk. Tim verifikasi itu terdiri dari berbagai macam unsur, di samping pemerintah daerah juga masuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga kepolisian, dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan masuk dengan harapan masyarakat tidak berbohong.

Setelah saya diajak Presiden ke Sidoarjo, ada kesepakatan lain. Bahwa tim verifikasi harus cepat menyelesaikan data-data yang diverifikasi kira-kira 1.000 per hari. Saat ini tim verifikasi ini sudah menyebarkan kira-kira 13.000 formulir.

Sudah berapa banyak formulir yang dikembalikan?

Sampai hari ini sudah sampai 1.400, tapi mungkin tak sampai 500 yang baru dibayarkan. Karena PT Minarak yang membayarkan kepada masyarakat melihat bahwa soal luas bangunan banyak tambahan-tambahan, tetapi dia tetap berpegang kepada IMB. Minarak ini mencoba membayar sesuai

IMB itu. Tapi itu kan ada kesepakatan, kita juga harus lihat data ITS juga, karena ITS juga memfoto rumah-rumahnya. Kemudian ada toleransi tambahan lima meter persegi dari ITS. Kalau dari masyarakat saya tidak mengecek, dikhawatirkan masyarakat bisa menambahkan. Saya berharap ini bisa berjalan. Minggu yang lalu, tiap Senin ada uang seratus miliar, kemudian ada pembayaran empat puluh. Kemudian, Senin kemarin, dia tutup 40 lagi. Menyangkut pabrik-pabrik itu akan diterapkan bisnis dengan bisnis. Jadi biarlah mereka menyelesaikannya.

Kalau tidak salah batas waktu pembayarannya 10 minggu ya?

Ya 10 minggu. Karena dugaan kita kalau setiap minggu 1.000, kan 10 minggu jadi 10.000. Jadi sebelum puasa, 20% itu sudah harus selesai. Sebelum saya ikut serta dalam penyelesaian ini, Lapindo juga sudah membantu untuk sewa kontrak rumah selama dua tahun sebesar lima juta rupiah.



Kemudian setiap jiwa setiap bulan diberi Rp 300.000 per bulan. Lapindo juga melakukan bakti-bakti sosial, misalnya sunatan massal.

Kita lihat dari sisi itu Lapindo sudah cukup banyak membantu, tapi kok masyarakat banyak menuntut?

Bagi masyarakat, walaupun mereka sudah dikasih uang muka kontrak rumah 5 juta, mereka masih rindu masa lalu, ini yang tak bisa diukur dengan materi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, harga yang diberikan mahal. Menurut saya mahal. Ada orang di sana yang dapat sampai Rp 45 miliar kan luar biasa itu.

Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan penggantian yang diangsur, ada upaya pemahaman untuk itu?

Tentu ada, masyarakat juga sudah tahu sesuai dengan Keppres, mereka dibayar 20% di muka. Dua tahun kemudian dibayar 80%. Tetapi kan ada

orang yang dapat Rp 45 miliar. Dia tentu ingin cepat mendapat uang itu. Karena itu, persoalan ini menurut saya tidak bisa diselesaikan secara keras-kerasan.

Masalah semburan itu masih berlanjut, dan sudah ada pendataan wilayah semburan. Namun kemungkinan untuk meluas masih ada. Kira-kira dari Depsos sendiri bagaimana menanggulangnya?

Kalau itu meluap keluar, itu tanggung jawab APBN. Kalau kita ini mengklaim sebagai suatu bencana alam, maka yang dibantu (diberi ganti rugi) itu rumah. Itu pun dibantu hanya Rp. 10 juta. Kan sayang. Tolong dipahami juga.

Ada kekhawatiran dari korban mengenai pembayaran kedua. Ada atau tidak jaminan dari pemerintah bahwa akan dibayarkan oleh Lapindo?

Seumpamanya dijamin oleh pemerintah, anggota DPR kan tidak setuju. Ini kan lumpur Lapindo, mengapa yang menanggung APBN. Kita bekerja berdasarkan keppres. Keppres itu payung hukum, jadi kita harus bekerja sesuai keppres.

Kendala yang dihadapi tim verifikasi, misal jika ada dokumen yang hilang?

Kalau surat dokumennya hilang, tentu minta surat dari kepala desa. Di sini yang kita takutkan adanya salah catat. Bahaya kan. Itulah makanya kita membuat tim verifikasi, supaya cocok antara luas tanah dan bangunannya. Kalau dibuat bertingkat, pertanyaannya tentu benarkah dia menambah bangunan. Seperti misalnya di perumahan, besibesinya hanya bisa untuk membuat satu lantai. Kalau dia tulis dua lantai, kan jadi lain keterangannya. Jadi itulah kerja keras tim verifikasi. ■



foto: repro indopos

Korban di jalan raya diperkirakan satu jiwa setiap 15 menit.

Maut Mengintai di Jalan Raya

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi salah satu 'pembunuh' terbesar. Sekitar 300.000 jiwa melayang setahun, 82 orang sehari atau 1 jiwa setiap 15 menit. Rendahnya tertib dan santun berlalu lintas di jalan raya adalah penyebabnya.

Sejumlah pelajar SMP Islam Ar Ridho, Kota Depok yang hendak berwisata ke Cibodas (7/7) harus terenggut jiwanya secara tragis. Bus "Limas" yang mereka tumpangi menerjang tanggul jembatan dan terjun ke sungai Cikundul, Ciloto. Sebelumnya, bus naas itu menghantam tiga mobil dan tiga motor sekaligus. Akibat tabrakan itu, 16 orang tewas dan 60 lainnya luka-luka.

Belum lagi kering air mata keluarga yang berduka akibat kecelakaan itu, bus "Doa Ibu" jurusan Tasikmalaya – Jakarta bertabrakan dengan mini bus

Izuzu Elf di jalan raya Cicalengka-Nagrek, Kab. Bandung, Jawa Barat (13/7). Kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi. Tabrakan maut itu mengakibatkan 11 orang tewas dan 18 lainnya cedera. Yang tragis, tiga anak kakak beradik, Wawan, Santi dan Agung, warga Ciawi, Tasikmalaya, tewas dalam musibah itu. Sementara orang tua mereka, Maesaroh masih dirawat di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Sebelumnya (11/7), kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Purworejo. Menewaskan komedian Taufik Savalas dan dua rekannya. Sementara dua pe-

numpang lainnya menderita luka-luka. Taufik saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Mobil Toyota Inova yang dinaikinya dihantam truk pengangkut semen yang pindah jalur ketika mencoba melewati mobil di depannya.

Kejadian di atas merupakan sebagian dari serentetan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang boleh dibilang nyaris terjadi setiap hari. Data kepolisian menyebutkan terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun. Dalam tahun 2004 misalnya, terjadi 17.732 kejadian. Tahun berikutnya naik menjadi 20.623 kasus dan tahun 2006 melonjak drastis mencapai 87.020 kejadian. Data dari asuransi menyebutkan korban tewas akibat kecelakaan di jalan raya mencapai sekitar 300.000 orang per tahun. Sekitar 82 orang per hari atau satu jiwa setiap 15 menit.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Dephub Suroyo Alimoeso menyatakan, penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya adalah kesalahan manusia. Angkanya mencapai 90 persen. Kemudian sekitar 5 persen karena kondisi kendaraan, 2 persen karena kondisi infrastruktur jalan dan 3 persen akibat kelengkapan rambu lalu lintas.

Terkait dengan faktor manusia, ini bisa disaksikan di jalur pantai utara (pantura) Jawa. Gambaran umum menunjukkan tidak adanya sopan santun dan tertib berlalu-lintas. Pengemudi bus banyak yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Mereka seenaknya menyalib kendaraan yang berjalan cepat dalam jarak sangat dekat. Tak jarang mengambil jalur kiri saat mendahului kendaraan lain atau bahkan menggunakan jalur yang berlawanan arah. Sementara sopir-sopir truk, termasuk truk gandengan, menggunakan jalur cepat sehingga menghalangi kendaraan lain yang ingin menyusulnya. Maka, tidak mengherankan jika di kawasan ini sering terjadi kecelakaan.

Menteri Perhubungan Jusman Safi'i Djamil mengakui kecelakaan di jalan raya yang

melibatkan angkutan umum selama ini akibat lemahnya kontrol dan penyimpangan penegakan aturan. Jusman yang baru beberapa bulan menggantikan Hatta Rajasa menyatakan akan segera melakukan pembenahan. Selain mengaudit semua operator bus angkutan umum, Jusman akan menjatuhkan sanksi berat kepada aparat perhubungan yang menyalahi kewenangan dalam pemberian keterangan uji kelayakan atau kir.

Banyaknya korban 'sopir maut' di jalan raya mengundang keprihatinan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Saat melantik Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Semarang di gedung MA (13/7), Bagir meminta para hakim tidak ragu mengenakan sanksi berat kepada para pengemudi yang ugal-ugalan dan melakukan tindak pidana di jalan raya.

Menurut Bagir, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya tak hanya faktor teknis seperti rem blong, melainkan akibat ketidakhatian atau kecerobohan para pengendara, terutama kendaraan umum seperti bus dan truk.

Namun di sisi lain keluhan sopir juga perlu diperhatikan. Para sopir bus lintas provinsi, misalnya, mengeluhkan ketiadaan tempat mengaso untuk melepaskan lelah di terminal. Mereka merasa diabaikan meski amat menentukan keselamatan banyak orang. "Banyaknya kecelakaan, selain alasan teknis, ada juga karena sopirnya lelah," kata Suparto, sopir bus Krui Jaya yang melayani trayek Kampung Rambutan – Krui, Lampung Barat. Trayek itu ditempuh dengan lama perjalanan 20 - 22 jam.

Darki (45) sopir bus Sinar Jaya yang melayani rute Pulo Gadung – Purwokerto – Cilacap menyatakan, selain perjalanan jauh, kondisi jalan yang rusak, kemacetan dan ulah semrawut pengendara sepeda motor ikut membuat daya tahan sopir menurun saat di perjalanan.

Pembenahan agaknya perlu dilakukan menyeluruh, sehingga keamanan, kenyamanan dan tertib berlalu lintas bisa jadi kenyataan. ■ SP

Jumlah Penduduk Miskin Berkurang

Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur laju perbaikan perekonomian Indonesia kerap kali mengundang kontroversi. Jumlah penduduk miskin ramai dipergunjingkan tanpa ada upaya konkrit yang sungguh-sungguh untuk mengurangi pengangguran.

Kali ini, BPS mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2007 sudah berkurang 5,4 persen, atau 2,13 juta jiwa, menjadi 16,58 persen dari sebelumnya 17,75 persen pada Maret 2006. Dengan demikian total jumlah penduduk miskin Indonesia tinggal 37,17 juta jiwa saja.

Pengumuman yang dilansir BPS pada awal Juli lalu sontak memperoleh tanggapan beragam dari berbagai kalangan, menghiasi berita-berita ekonomi surat kabar nasional. Mereka sibuk membela pendapatnya masing-masing.

Arizal Ahnaf, Deputy Bidang Statistik Sosial BPS, mengemukakan, metode perhitungan angka kemiskinan yang dipakainya sesungguhnya sudah lama dipakai. Dia menuturkan, jumlah penduduk yang paling dominan diukur berada di wilayah masyarakat pedesaan. Dan temuan hitungan BPS menyebutkan, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) masyarakat pedesaan dalam setahun terakhir sudah lebih besar dari laju kenaikan inflasi.

Survei BPS menemukan penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang hingga 1,20 juta jiwa, lebih tinggi ketimbang penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang hanya berkurang 930 ribu jiwa. Fenomena ini terpecahkan dengan melihat naiknya daya beli masyarakat miskin yang tercermin dari pengeluaran mereka.

Indikator pengeluaran masyarakat pedesaan, yang berhasil dicatat BPS, menunjukkan, NTP mereka selama periode tersebut naik hingga sembilan persen. Potensi ke-

naikan tersebut lebih tinggi dari kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang lebih penting bagi masyarakat bawah, yakni sembako seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan mie instan.

"Komoditas paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada Maret 2007 sumbangan pengeluaran beras pa-



Warga miskin masih banyak ditemukan di perkotaan.

foto: berindo wilson

da garis kemiskinan, 28,64 persen di masyarakat pedesaan, dan 18,56 persen di masyarakat perkotaan," ujar Arizal.

Demi validnya survei jumlah penduduk miskin yang dilakukan, BPS mengambil sampel terhadap 63 ribu rumah tangga miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana BPS hanya mengambil sampel 10 ribu rumah tangga masyarakat miskin. Untuk meneguhkan

kebaikan yang disuguhkan BPS, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebutkan pemerintah tidak pernah mengintervensi BPS. "BPS independen dalam kinerjanya. Sampel juga bertambah, tidak 10 ribu KK, melainkan 63 ribu KK," ujar Paskah.

Kepala BPS Rusman Heriawan juga menegaskan, pihaknya mempunyai integritas tinggi terhadap setiap angka-angka yang dikeluarkan. Data BPS murni dari sensus nasional (Susenas). Terkait naik turunnya angka kemiskinan, Rusman mengakui memang angka kemiskinan masih tinggi, buktinya banyak orang

miskinan, sebagaimana yang dilansir BPS. Menurut Boediono, meskipun beberapa harga kebutuhan pokok meningkat tetapi karena pendapatan masyarakat juga relatif meningkat hal tersebut menaikkan masyarakat bawah ke posisi lebih baik.

Para politisi Senayan dan pengamat ekonomi independen turut angkat bicara menanggapi temuan BPS. Ekonom Faisal Basri, misalnya, tetap kurang bisa menerima apa yang dihasilkan BPS bahwa terdapat penurunan jumlah angka kemiskinan di pulau Jawa.

"Kalau di Sumatera atau Kalimantan, saya bisa terima. Sebab pendapatan masyarakat di sana relatif naik dengan kenaikan harga kelapa sawit. Saya akan lebih yakin kalau penurunannya ada di luar Jawa. Kalau penurunan di Jawa, patut kita curigai," ucap Faisal.

Iman Sugema, ekonom dari Tim Indonesia Bangkit juga menilai ada sejumlah keanehan dalam data kemiskinan BPS. Keganjilan itu, antara lain, terlihat dari survei yang dilakukan pada bulan Maret 2007, pada saat harga beras sedang tinggi dan sektor riil belum bergerak. Iman menuding tengah terjadi politisasi statistik di BPS.

Dradjad Hari Wibowo, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN yang turut angkat bicara mengomentari keganjilan data BPS, mengatakan rasa tak percayanya bahwa survei yang dilakukan BPS bisa mencerminkan realitas kemiskinan di lapangan.

"Bagaimana mungkin angka kemiskinan 2007 turun di tengah mahalannya harga kebutuhan pokok. Data pengangguran maupun kemiskinan itu bertentangan dengan realitas," kata Dradjad.

Ramson Siagian, Anggota DPR PDI Perjuangan mengatakan, pemerintah harus realistis dan proporsional dalam mengungkapkan kondisi negara yang sesungguhnya. ■ HT, AM

RUU Pemasung Kebebasan Pers

RUU revisi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers diluncurkan pemerintah. Beberapa pasal dalam RUU itu berpotensi menghidupkan kembali otoritarian Orde Baru yang memasung pers.

Kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU No.40/1999, kembali dicoba dipasung pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.40/1999 tentang pers.

Secara garis besar, draft revisi UU Pers itu mengungkapkan tiga hal penting yang mengancam kebebasan pers. *Pertama*, ketentuan yang mengatur sensor terhadap pers Indonesia. Ketentuan ini memungkinkan pers bisa sampai dibredel. *Kedua*, ketentuan yang mengatur adanya syarat tertentu yang harus dilewati perusahaan pers. *Ketiga*, ketentuan yang menyebutkan

bahwa persyaratan dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan ini memungkinkan pemerintah "memainkan" UU Pers melalui PP tersebut.

Lebih terperinci, beberapa ketentuan dari RUU Perubahan UU No.40/1999 itu yang banyak diprotes kalangan pers adalah: Pertama, Pasal 9 ayat 3 dan 4. Pasal ini mengatur berbagai persyaratan yang harus digenapi perusahaan pers, persyaratan yang disebut dengan istilah Standar Persyaratan Perusahaan Pers (SPPS). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mengembalikan sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP) seperti di era Orde Baru. Salah satu ketentuan SPPS itu misalnya

menyebutkan, pemerintah menetapkan modal minimum bagi seseorang untuk mendirikan perusahaan pers. Dengan ketentuan itu, pemerintah mungkin berusaha membatasi munculnya media-media cetak yang sebentar terbit-sebentar tutup. Tapi ketentuan itu juga sekaligus menyiratkan, bahwa hanya pemodal besarlah yang bisa menerbitkan media cetak.

Hal lain yang juga mendapat protes adalah ketentuan yang mengatur tata cara pers melayani hak koreksi dan hak jawab. Menurut Pasal 5 ayat 4 RUU tersebut, hak koreksi dan hak jawab akan ditetapkan dengan PP. Padahal di negara mana pun, hak koreksi dan hak jawab adalah hak dari redaksi.

Ketentuan yang menetapkan standar "pendapatan yang layak" bagi wartawan dalam RUU itu, juga mendapat protes dari industri pers. Ketentuan itu dianggap sebagian pihak merupakan upaya pemerintah mencampuri urusan perusahaan pers. Dalam hal ini, perancang revisi UU ini barangkali lupa satu hal yakni, bahwa pekerjaan wartawan itu adalah pekerjaan profesional. Jadi, mengingat tingkat kompetensi dan profesionalisme wartawan yang berbeda-beda, maka soal gaji wartawan seharusnya adalah urusan antara media dan wartawannya. Dicantumkannya ketentuan ini menurut berbagai pihak, diduga hanya trik Depkominfo mencoba merebut hati sejumlah wartawan yang selama ini mengeluhkan gaji tak cukup. Seperti dikatakan Abdullah Alamudi, anggota Dewan Pers dan Pengajar



Modal Minimum: Pemerintah menetapkan

pada Lembaga Pers Dr. Soetomo dalam tulisannya di *Majalah Tempo* (18-24/6), "Dengan RUU Perubahan UU Pers, Depkominfo agaknya berusaha menghabis media-media cetak yang dikelola secara tidak profesional. Pada saat yang sama, departemen itu mencoba merebut hati sejumlah wartawan yang selama ini mengeluh mendapat gaji tak cukup dan karenanya beralih terpaksa menerima "amplop". Kita tahu ini sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik."

Berbagai protes mengalir dari berbagai lembaga pers terhadap RUU ini. "Tampaknya kesadaran pemerintah perlu dibangun lagi menyangkut soal betapa pentingnya pers yang merdeka. Ini bukan melulu soal wacana politik, yakni kontrol kekuasaan yang selalu cenderung korup. Atau wacana teoritis yang menyelipkan pers sebagai tesis tambahan dari trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan tambahan yang disebut pilar



Hak koreksi dan hak jawab ditetapkan dengan PP.



foto-foto: berindo wilson

modal minimum bagi seseorang untuk mendirikan pers.

keempat adalah pers. Ada alasan yang jauh lebih mendasar ketimbang persoalan tersebut. "Para pemegang kebijakan mestinya sadar bahwa pers adalah salah satu kunci pemberdayaan menuju kemandirian," kata Dedy Djamiluddin Malik, anggota Komisi Bidang Informasi Komunikasi, Pertahanan dan Luar Negeri DPR RI dalam tulisannya di harian *Koran Tempo* (20/6).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan tegas menolak rencana revisi UU tersebut karena dianggap mengancam kebebasan pers. Melalui siaran pers, Senin (18/6), AJI sebagaimana diungkapkan Ketua AJI Indonesia Heru Hendratmoko, revisi UU Pers secara jelas bertentangan dengan esensi kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Dasar. "Dalam sistem demokrasi, pers berfungsi mengontrol jalannya kekuasaan negara, bukan sebaliknya." Demikian siaran pers yang ditandatangani 35 peserta Rapat Kerja Nasional AJI.



Pers adalah salah satu kunci pemberdayaan menuju kemandirian.

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara juga dengan jelas mengatakan bahwa rencana revisi UU itu menunjukkan betapa besarnya keinginan pemerintah mengontrol pers. "Itu mencerminkan berahi pemerintah kembali mengontrol pers," kata Leo seperti dikutip *Gatra* (5-11/7).

Dengan penyampaian yang berbeda, Pemimpin Umum

LKBN ANTARA Asro Kamal Rokan juga menolak RUU ini. "Revisi itu perlu, namun bukan untuk membatasi kebebasan pers, sebab tidak ada lagi istilah mundur dalam kebebasan pers," ujar Asro.

Sedangkan Atmakusumah Astraatmadja, Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yang juga Ketua Dewan Pengurus *Voice of Human Rights* (VHR) News Centre di Jakarta dalam tulisannya di *Kompas* (26/6), khusus menanggapi hak koreksi dan hak jawab yang disebutkan RUU ini akan diatur dengan PP. Atmakusumah mengatakan, "Persyaratan independensi wartawan dalam pengelolaan media pers hanya dapat diberlakukan sebagai anjuran walaupun perlu dalam bentuk "anjuran yang kuat" atau "desakan". Sedangkan pengaturan cara penyiaran hak jawab dan hak koreksi oleh pihak pemerintah melalui peraturan pemerintah justru berarti melanggar independensi wartawan. Ini bertentangan pula dengan Kode Etik Jurnalistik 2006 dan malahan bertentangan dengan revisi

pasca reformasi, persisnya di era Presiden BJ Habibie dan Menteri Penerangan Yusus Yosfiah, diterbitkanlah UU 40/1999. UU ini dibuat dengan sederhana dan dapat dijalankan langsung tanpa peraturan pemerintah. Di era inilah pers Indonesia mengalami perkembangan pesat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Namun, saat Menkominfo dipimpin Sofyan Djalil, departemen itu menyusun RUU Perubahan UU No.40 Tahun 1999 itu. Draf RUU yang memuat banyak aturan yang memungkinkan pemasangan kebebasan pers inilah yang belakangan banyak menghebohkan. Kini insan pers menunggu kebijakan Menkominfo Muhammad Nuh, menteri yang baru diangkat pada *reshuffle* kedua KIB menggantikan Sofyan Djalil. Mendengar pernyataan Nuh saat pertemuan dengan Dewan Pers pada 8 Juni lalu, insan pers untuk sementara waktu bolehlah bernafas lega, sebab mantan Rektor Insitut Teknologi 10 November ini kelihatannya tidak segetol Sofyan Djalil memperjuangkan RUU itu. Saat pertemuan itu, Nuh menyerahkan soal RUU revisi UU Pers kepada Dewan Pers. "Semua terserah sampeyan," katanya kepada Dewan Pers. Selanjutnya, dia menganjurkan agar UU Pers itu di-*review* dulu sebelum direvisi.

Pernyataan itu kembali ditegaskannya Selasa (26/6) di Surabaya. Muhammad Nuh mengatakan, pihaknya akan menerima apa pun usulan dari lembaga pers untuk revisi UU Pers itu, baik dari Dewan Pers, PWI, AJI, atau lembaga pers lainnya. "Yang jelas, mereka yang harus merumuskan, sedangkan saya tinggal menyampaikan 'draft' usulan itu ke DPR RI," ujarnya. Dia mengatakan siap membantu memfasilitasi lembaga pers melakukan revisi, namun tidak mau kalau jadi inisiator. "Saya siap memfasilitasi, apakah menyiapkan tempat atau anggaran, tapi saya tidak mau menjadi inisiator. Silakan lembaga pers untuk menjadi panitia," ujarnya kepada ANTARA News. ■ MS

Sewindu Pembelajaran Al-Zaytun

Ahad 1 Juli 2007, Al-Zaytun memulai pembelajaran tahun ajaran 2007-2008. Pada hari bersejarah sewindu pembelajaran (1 Juli 1999 - 1 Juli 2007), itu Al-Zaytun mempersembahkan hadiah emas, antara lain mengangkat martabat dan harkat daerah kabupaten Indramayu dari segi pendidikan.

Tahun mendatang, kata Syaykh AS Panji Gumilang dalam tausiyahnya, Al-Zaytun harus menampilkan berlian sehingga Indramayu berada paling depan dari kabupaten lain di Jawa Barat. Syaykh AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu merespon pidato sambutan Kepala Kandepag Indramayu Drs Mahfud MA yang menyatakan sangat bangga sebab dengan berdirinya Ma'had Al-Zaytun meliputi madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, serta Perguruan Tinggi telah membantu *Human Development Indeks (HDI)* atau *Indek Pembangunan Manusia (IPM)* di Kabupaten Indramayu.

Drs Mahfud MA juga menjelaskan hasil dari ujian nasional untuk tingkat sekolah lanjutan pertama di Indramayu nilainya menduduki peringkat kedua se Jawa Barat, dengan prosentase kelulusan 99,78%. Sedangkan untuk tingkat sekolah lanjutan atas prosentase kelulusannya 99,67% juga menduduki peringkat kedua se Jawa Barat.

Syaykh AS Panji Gumilang memberikan nama kehormatan "*Al-Shidiq*" kepada Drs Mahfud MA sebagai pernyataan spontan dan tulus atas sambutannya yang



foto-foto: dok. al-zaytun

Syaykh AS Panji Gumilang

mengemukakan kilas balik dalam merespon Al-Zaytun sejak tahun 1997 hingga sekarang. Yaitu bagaimana proses Kakandepag Indramayu itu merespon dari rasa ragu kemudian menerima dengan yakin Al-zaytun sampai hari ini.

Pada awal pembangunan ma'had, Drs Mahfud Al-Shidiq pernah berkunjung ke Al-Zaytun. Setelah lama tak berkunjung, tahun 2007 ini datang kembali mengunjungi Al-Zaytun atas undangan untuk meresmikan pembukaan awal pembelajaran 2007-2008 bagi para

santri al-Zaytun, serta membuka resmi penyelenggaraan pembelajaran madrasah ibtidaiyah (MI) di PKBM Cibanoang Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, 1 Juli 2007.

"Ternyata delapan tahun itu punya makna menunggu Al-Zaytun menghadihkan emas kepada lingkungannya," kata Syaykh AS Panji Gumilang. Hadiah emas itu, kata Syaykh adalah mengangkat martabat dan harkat daerah kabupaten Indramayu dari segi pendidikan, tahun ini menghantarkan ke posisi satu langkah dari depan. Tahun



Syaykh dan Umi memasangkan topi dan menyalami santri ibtidaiyah.

mendatang Al-Zaytun harus menampilkan lagi berlian sehingga Indramayu berada paling depan dari kabupaten lain.

Syaykh Al-Zaytun menjelaskan mengapa mengundang Drs Mahfud Al-Shidiq pada hari Windu Kencana Al-Zaytun ini. Windu adalah *delapan*, kencana adalah *emas*. Biasanya orang-orang hanya menghadihkan emas itu kalau umur 50 tahun, perkawinan pun seperti itu, ada perkawinan emas tatkala umur nikahnya itu 50 tahun, namun Al-Zaytun dengan segala keberaniannya menghadihkan emas pada ulang tahun ke 8.

Pesantren Spirit

Syaykh Panji Gumilang menjelaskan bahwa kurikulum yang dilaksanakan di Al-Zaytun adalah lengkap meliputi kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, kurikulum Departemen Agama serta kurikulum kepesantrenan yang menitikberatkan kepada kemandirian. Mengenai kehidupan pesantren di Al-Zaytun berlangsung siang dan malam, sekolah diisi terus, tempat pembelajaran diaktifkan terus.

Dalam taushiyahnya pada pembukaan awal pembelajaran, Syaykh Al-Zaytun mengisahkan secara singkat proses pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan Al-Zaytun yang menganut filosofi dasar: *Pesantren spirit but modern system*. Semangat harus pesantren, tetapi dengan sistem modern.

Syaykh menjelaskan, pesantren di dalam bahasa Inggris *passantry* yang pengertiannya adalah orang yang suka bercocok tanam atau dalam bahasa Indonesia disebut petani. Sedangkan menurut bahasa Urdu dan Parsi,

pesantren adalah orang selalu berusaha membuka mata, meleak hurup baik hurup tulis maupun hurup alam semesta. Itulah sesungguhnya makna pesantren di Indonesia yang kita jalankan ini, bukan dari Hindu dan bukan dari mana-mana, tapi atas penelaahan orang-orang Indonesia yang selalu ingin meleak karena bila di dunia buta, di akherat pun akan menjadi buta.

Pesantren ditumbuhkan supaya masyarakat tidak buta, buta dalam arti seluas-luasnya. Filosofi dasar Al-Zaytun adalah *Pesantren spirit but modern system*. Semangat harus pesantren, tidak boleh ada yang buta dalam arti luas. Kalau sekarang ada orang buta hurup, maka ada pula yang buta tidak bisa menerobos mayapada melalui *information technology*. Zaman seperti ini tidak bisa ditanggapi dengan *step by step* yang tidak serius. *Step by step* harus dilakukan secara serius, ada evaluasi dan ada keberanian masuk ke dalam renovasi yang sebesar-besar dan setinggi-tingginya.

Syaykh Panji Gumilang juga menguraikan pengertian pesantren sebagaimana ditulis oleh Dr Jofir bahwa pesantren adalah sebuah pendidikan yang didirikan oleh kiyai di sebuah kampung kemudian murid datang berduyun-duyun, lalu murid-murid itu mendirikan tempat-tempat untuk asrama, kemudian mengadakan pembelajaran. Tidak diterangkan belajar apa di situ dan dengan kurikulum apa di situ.

Sistem pendapatan dan ekonomi yang berjalan di dalamnya, santri boleh ikut ngaji dengan syarat *ngangsu* air untuk kiyai, mencangkul sawah kiyai, mencuci pakaian kiyai dan mbok nyai, kemudian memasak di dapur dan

sebagainya. Santri tidak dikirim uang dari rumah, ngajinya *sakarepe, karep isuk ya isuk, karep sore ya sore ga ngaji ra opo-opo* yang penting ada dalam pesantren.

Kesehatan para santri juga tidak terjamin karena makannya *sak nemunya*, kalau dikirim orang tua ya bisa beli sate kalau tidak dikirim ya *mangan* apa adanya. Kayu pun boleh ambil di mana-mana, tidak ada aturan yang mengaturnya.

Kalau merujuk kepada pengertian seperti itu, Al-Zaytun seakan menyalahi total dan nyeleneh dari kaidah kepesantrenan. Ini dikarenakan para pendiri dan pendukung Al-Zaytun membuat sebuah analisa tentang itu, apa betul kalau pesantren dengan pengertian seperti itu dilaksanakan di zaman sekarang bisa mencapai tujuan. Sedangkan tujuan hidup bagi bangsa Indonesia adalah "Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya." Bisakah kita menghidupkan Indonesia? Bisakah kita membangun? Bisakah menata jiwa? Maksudnya mengatakan bisa. Mengenai kualitasnya tentunya ukuran akan bisa menandakan belum sampai kepada yang dikehendaki.

Hasil analisa menyimpulkan bahwa pembangunan sebuah pesantren lokasinya jangan di dalam kampung tetapi harus terpisah dari perkampungan, penghuninya merupakan masyarakat baru yang datang dari Indonesia dan luar Indonesia, serta sudah diperhitungkan suatu saat akan lebih dari 10.000 jiwa. Areal yang dipergunakannya pun harus luas karena setiap orang diukur dengan lari cepat 100 meter bolak-balik sehingga masing-masing memerlukan lahan 200 m². Untuk fasilitas jalannya diperlukan 1000 hektar sehingga untuk keseluruhannya diperlukan lahan seluas 2.000 hektar. Bangunannya besar, lebar dan kuat.

Hak Asasi Manusia

Berbicara tentang ciri pesantren, menurut Syaykh, songkok dan sarung itu bukan budaya muslim. Songkok itu dipakai oleh orang-orang di India dengan warna putih, sebagaimana orang yang pergi haji pulangny pakai songkok putih.

Penampilan muslim yang sesungguhnya adalah pro kepada masyarakat. Cita-cita atau ideologi kita adalah untuk menyejahterakan masyarakat yang biasa disebut dengan *Rahmatan lil alamin*. Dalam kehidupan pesantren mesti dibangun sebuah



Paling depan Drs Sulaiman, Drs Mahfud MA, Syaykh dan Umi

foto: dok. al-zaytun

kebanggaan, kejayaan, serta ketatentraman. Untuk itu, pesantren Al-Zaytun memulai pemahaman hak azasi manusia yang kita ambilkan dari *declaration of human right* yang dikeluarkan oleh *united nation organization*.

Ada unsur azasi bahwa *manusia ini berhak hidup, dan berhak menikmati pendidikan*. Hak azasi *pendidikan* sebagai hal yang paling utama sebab manusia harus pintar, cerdas, mempunyai ilmu sebanyak-banyaknya, dan negara wajib memberikan fasilitas untuk itu. Supaya bisa cerdas, manusia *harus cukup makan*, tidak boleh miskin, tidak boleh kekurangan, mampu berdiri tegak, dan makan yang cukup diselenggarakan secara bersama oleh negara dan masyarakat.

Sepulangnya dari study banding ke negeri China. Syaykh bertanya dalam hati mengapa China tidak pernah kekurangan makan dan sanggup menjual makanan, padahal jumlah penduduknya sangat banyak, mencapai 1,3 milyar jiwa. Setelah diteliti, ternyata mereka tidak membeli makanan karena memang dipersiapkan oleh negaranya. Semua fasilitas diadakan, maka memfasilitasi masyarakat untuk bisa makan sempurna itulah menegakkan hak azasi manusia dan siapa yang menghalang-halangi itu, itulah yang anti hak azasi manusia.

Supaya bisa cerdas maka manusia pun badannya harus sehat, bukan umur panjang tapi sehat. Untuk apa umur panjang tapi kesehatannya selalu terganggu, hidup tapi hanya bernafas, berjalan tapi penuh rintihan, berdiri tapi penuh lapar. Itu namanya umur yang tidak bermanfaat. Rasulullah selalu berdo'a "*Allahumma inni a`udzubika min an urodda illa ardzali al-umuur*". Ya Allah, jangan aku dijadikan manusia

yang dikembalikan pada umur yang tidak bagus.

Karena manusia ini bersifat kerjasama maka berdirilah sebuah bangsa dan sebuah negara, lalu diorganisirlah kekuatan-kekuatan tadi untuk mencapai hak azasi manusia. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, negara dikatakan Daulah, "*Dalla-yadullu-duulatan wa daulatan*" kalau *daullah* adalah administrasi negara maka *duullah* adalah perputaran modal atau keuangan.

Mendekatkan kampung dan kota

Menjelang pembangunan Ma'had Al-Zaytun, tahun 1997 yayasan mengutus tiga orang ke Pemda Indramayu untuk menjelaskan rencana pembangunan Ma'had sebagaimana hasil analisa tersebut. Namun sewaktu dijelaskan, petugas pemerintah daerahnya sendiri tidak percaya, masa pesantren pakai IMB. Sewaktu *Site Plan*-nya disampaikan, petugas tersebut menjawab enggak usah, yang penting bangun saja dulu. Dengan membawa sepotong surat, dibangunlah Ma'had ini secara bersama. Terjadilah pembangunan, tahun 1997 mulai berdiri, 1998 mulai tampak, dan 1999 mulai agak bisa dipakai. Setelah bangunan berdiri, datanglah petugas Pemda dan mengatakan kalau bangunannya seperti ini mesti pakai IMB.

Al-Zaytun dibangun di suatu desa terpencil adalah untuk mendekatkan kampung dan kota, sebab kalau kampung tidak dibangun maka selamanya Indonesia ini terkotak-kotak menjadi manusia kampung yang apabila masuk ke kota tidak mengerti kekotaan. Terjadilah bias tatkala masuk budaya kota mempengaruhi, ingin menjadi orang kota dan ingin mencapai sesuatu dengan secepatnya.

Syaykh AS Panji Gumilang mengemukakan, sampai sekarang Al-Zaytun belum menikmati kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam hal infrastruktur. Semua infrastruktur dibangun sendiri, padahal Al-Zaytun memberikan pajak yang tidak kecil. Pengeluaran dana setiap tahun milyarmilyar dengan pajak minimal 10%. Sudah semestinya dibuatkan jalan. Ada jalan tapi ditutup, mengapa? Karena Al-Zaytun adalah madrasah pak!

Karena itu, kepada Kakandepag Syaykh mengatakan, jangan terlalu bangga terhadap Al-Zaytun karena kemajuannya, bapak mesti menangis di depan Bupati dan kemukakan: "Katanya di Indramayu harus semuanya keluaran madrasah. Tengok Al-Zaytun, jalannya di portal, jalannya rombeng, saya masuk ke sana seperti masuk ke laut Cina Selatan". ■ SYAF

**Tahun mendatang
Al-Zaytun harus
menampilkan lagi
berlian sehingga
Indramayu berada
paling depan dari
kabupaten lain.**



Kakandepag Drs Mahfud MA

foto: dok. al-zaytun

Kakandepag Indramayu Drs Mahfud MA

Al-Zaytun Miliki 3P

Al-Zaytun memiliki 3P (*Power, Performance, dan Promotion*) yang memadai. Di sini, ada *power* atau kekuatan, baik pendanaan, moral, maupun pengetahuan. *Performance* juga meyakinkan, ada gedung yang hebat beserta sarana dan prasarana pendidikan lainnya, serta penampilan ustad-ustadzahnya hebat. Juga sudah ada *promotion* yang merupakan faktor dominan dalam persaingan.

Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Indramayu Drs Mahfud MA mengatakan hal itu saat membuka awal pembelajaran Al-Zaytun tahun ajaran 1428-1429 H (2007-2008) di kampus Al-Zaytun, Indramayu, serta sekaligus membuka resmi madrasah Ibtidaiyah di PKBM Cibanoang Desa Mekarjaya, 1 Juli 2007.

Drs Mahfud MA mengungkapkan perasaan gembira, terharu dan sekaligus merinding menyaksikan pembukaan awal pembelajaran yang dinilainya berlangsung dengan hebat. "Acara bagus

karena bisa menampilkan kemampuan santri-santri untuk berekspresi dengan bagus dan memukau," ungkapnya.

Mahfud juga mengapresiasi latar belakang dan kesediaan Al-Zaytun mau membuka Madrasah Ibtidaiyah di Cibanoang, adalah karena adanya permintaan masyarakat. "Ini berarti Ma` had Al-Zaytun sangat dibutuhkan oleh masyarakat," tegasnya. Ia mendo`akan niat Syaykh itu bisa terwujud, sebagaimana ajaran agama mengemukakan "*Man` amila sholehan min dzakar in wa untsa wa huwa mu` minun falanuhayannahum hayatan thoyibat*

alanzajziannahum ajrohum bi ahsni maa kaanuu ya` maluun". Barang siapa yang berbuat amal sholeh, apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat dan akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan.

Menurut Drs Mahfud MA, Al-Zaytun ini bukan *rahmat bil ma`had* saja di lingkungan Indramayu, tapi melanjutkan misi Rasulullah yaitu *rahmatan lil alamin* sebab Al-Zaytun di waktu yang akan datang akan membuka pula PKBM-PKBM di Kalimantan Tengah dan di Nusa Tenggara Barat.

Yakin terhadap Al-Zaytun

Dalam sambutannya, Drs Mahfud MA juga menceritakan kenangannya beberapa tahun lalu. Ketika tahun 1997, ia menyanggah jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kandepag Indramayu, Imam Supriyanto, Wakil Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, sering datang ke kantor Depag Indramayu menjelaskan tentang



foto: dok. al-zaytun

Eksponen Abdul Halim menjelaskan prasasti PKBM kepada Kakandepag

Al-Zaytun yang meliputi madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, serta Perguruan Tinggi ini telah membantu Human Development Indeks (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kab Indramayu.

rencana mendirikan sebuah ma'had yang kemudian diberi nama Ma'had Al-Zaytun. Selain di Kandepag, penjelasan dan pemaparan juga dilakukan di kantor Bappeda dan ruang data Pemda Indramayu.

Semua yang hadir dalam pertemuan, baik di Kandepag, Bappeda, maupun di Pemda ketika itu, bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin yang dipaparkan itu akan menjadi kenyataan. Mahfud sendiri mengaku kurang yakin dan menjadi penasaran. Karena itu, ketika pembangunan unit pertama dimulai, dia datang untuk melihatnya. Saat itu sudah ada rasa kekaguman sebab sudah melihat banyak alat-alat berat. Namun masih kurang yakin akan terlaksananya rencana besar itu.

Tak lama setelah itu, Drs Mahfud MA pindah tugas ke Cirebon, kemudian mengajak kawan-kawan dari Cirebon untuk datang ke Ma'had Al-Zaytun, dan saat itu diterima Imam Supriyanto. "Baru mulai saat itu saya menjadi yakin bahwa pembangunan ma'had sebagaimana yang telah dipaparkan akan terlaksana," paparnya.

"Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan serta keyakinan yang ada pada diri saya, hari ini terjawab. Ma'had Al-Zaytun yang perencanaan pembangunannya telah dipaparkan pada tahun 1997, sekarang telah berdiri megah dan hebat", ungkapinya.

Human Development Indeks

Kakandepag Indramayu itu juga sangat bangga sebab dengan berdirinya Ma'had Al-Zaytun yang meliputi madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah,

Aliyah, serta Perguruan Tinggi ini telah membantu *Human Development Indeks (HDI)* atau Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kab Indramayu.

Ia merasa kecewa kalau ada yang beranggapan bahwa pendidikan di Indramayu bisa maju hanya oleh adanya sekolah umum, sebab anggapan itu bersifat dikotomi antara sekolah umum dengan madrasah. Sekarang ini sudah tidak ada dikotomi antara sekolah umum dengan madrasah, sebab civil efeknya dari madrasah pun sama dengan sekolah umum.

Perihal ujian nasional, Drs Mahfud MA menjelaskan hasil dari ujian nasional untuk tingkat sekolah lanjutan pertama di Indramayu nilainya menduduki peringkat kedua se Jawa Barat, dengan prosentase kelulusan 99,78%. Sedangkan untuk tingkat sekolah lanjutan atas, prosentase kelulusannya 99,67% juga menduduki peringkat kedua se Jawa Barat.

Menurutnya, keberhasilan ujian nasional itu bukan hasil dari sekolah umum saja, melainkan akumulasi dengan madrasah terutama madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah yang ada di lingkungan Al-Zaytun.

Sekolah Unggulan

Ada yang menilai bahwa output yang berkualitas dari suatu pendidikan manakala hasil ujian nasionalnya bagus dan outputnya banyak diterima di perguruan tinggi yang ternama, baik negeri maupun swasta. Penilaian seperti itu baru dari satu sisi yaitu sisi *komitednya* saja, padahal output yang berkualitas bukan hanya dari sisi komited saja tetapi juga dari faktor *afektif* dan *psikomotoriknya*.

Menurut Kakandepag, pembelajaran di Al-Zaytun bukan terbatas kegiatan belajar mengajar di kelas saja. Tapi ada pula pembelajaran yang bagus seperti penerapan disiplin lalu lintas, serta ada pembelajaran ekstra kurikuler sebagai penunjang intrakurikuler.

Di tempat lain ada sekolah unggulan tetapi tidak ada asramanya. Sedangkan Al-Zaytun mendirikan madrasah berbarengan dengan mendirikan asramanya, sehingga begitu berdiri Al-Zaytun sudah menjadi madrasah unggulan. Sumber daya manusia di sini sudah sangat memadai sehingga mampu meluluskan siswa yang berkualitas, serta bisa bersaing dengan madrasah dan sekolah umum yang lain.

Selain itu, 3P (*Power, Performance, dan Promotion*) Al-Zaytun memadai. Di sini ada *power* atau kekuatan, baik pendanaan, moral, maupun pengetahuan. *Performance* juga meyakinkan, ada gedung yang hebat



Kakandepag beserta para eksponen dan masyarakat disamping gedung PKBM Cibanoang

beserta sarana dan prasarana pendidikan lainnya, serta penampilan Ustad-ustadzahnya hebat. Dan disini pun sudah ada *promotion* yang merupakan faktor dominan dalam persaingan.

Suara Miring

Diungkapkan, sewaktu berlangsung ujian nasional, terdengar ada suara-suara miring tentang penyelenggaraan ujian nasional di sini, namun dirinya tidak percaya terhadap suara miring itu. Untuk membuktikan ketidakpercayaan itu, diutuslah Kasum MAPENDA untuk bersama-sama koordinator pengawas Dinas Pendidikan datang ke Al-Zaytun. Hasilnya, Kasum MAPENDA melaporkan bahwa pelaksanaan ujian nasional di Ma'had Al-Zaytun sangat rapi bahkan lebih rapi dari sekolah-sekolah lain. Kakandepag Kabupaten Indramayu telah melaporkan tentang kerapian pelaksanaan ujian nasional di Al-Zaytun itu kepada Kepala Kantor Wilayah Depag Jawa Barat.

Menanggapi apa yang diungkapkan Drs Mahfud MA tentang adanya surat ke Kandepag berisi suara miring penyelenggaraan ujian nasional di Al-Zaytun, Syakh memberikan klarifikasi orang yang mengirim surat itu memang pernah mengajar di Al-Zaytun. "Namun yang berkenaan adalah orang yang tidak disiplin, tidak mengerti tugas keguruan dan orang yang punya misi di balik misi perguruan yang kita dirikan. Itupun kita tahu bukan tatkala dia berada di sini, tapi tatkala keluar dari sini beberapa tahun yang lalu. Telah pun keluar dari perguruan kita ini dengan membawa

misinya sendiri," kata Syakh.

Syakh lebih diyakinkan lagi sewaktu hadir pada reuni santri-santri Gontor tahun 60an di Semarang belum lama ini. Di antara peserta reuni ada yang menanyakan tentang orang itu. "Bapak kenal nama ini?" tanyanya sambil menyebut sebuah nama. *Oh ya saya kenal dengan baik.*

Pernah di Al-Zaytun? Pernah. *Oh ya bagus...bagus. Tapi sayang dia sekarang sudah lain. Apa lainnya? Dia di Nasrani. Bagus..bagus.. daripada bunuh diri. Mengapa? Hak azasi manusia mau murtad mau apa itu silahkan, Tuhan saja menerima.*

Surat yang dibuat itu visi dan misinya untuk menghancurkan pendidikan, serta merubah *image* orang tidak suka pada madrasah. "Kakandepag telah menyampaikan kilas balik dan kita telah respon apa yang disampaikan oleh beliau dan kita juga memberikan klarifikasi sehingga akan *clear* semua adanya. Untuk hal-hal yang dikatakan ABCD, baik terhadap pelaksanaan pengajaran dan pendidikan serta evaluasi maupun terhadap pelaksanaan ujian nasional bisa kita buktikan secara bersama-sama," jelas Syakh.

Bekerja Keras

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Imam Supriyanto dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur bahwa para pelajar yang telah berlibur panjang, kembali ke kampus Al-Zaytun dengan selamat. Diharapkan, para pelajar dapat segera menyelaraskan diri untuk menaati segala kedisiplinan dan aturan yang ditetapkan secara seksama sehingga dapat mencapai keberhasilan pembelajaran dengan hasil yang optimal.

Bagi pelajar baru yang belum memahami proses kedisiplinan kampus Al-Zaytun sepenuhnya agar cepat menyelaraskan diri dengan sebaik-baiknya. Dikatakan, apa yang sedang dan terus diupayakan bersama ini adalah satu upaya membangun pendidikan umat dan bangsa yang kuat. Karena itu diharapkan kepada para eksponen, guru dan seluruh civitas akademika Al-Zaytun di masa-masa yang akan datang agar semakin bekerja keras dan mencurahkan seluruh kemampuan baik moril maupun materiil. ■ SYAF



Kakandepag didampingi Wakil Ketua Yayasan meninjau PKBM Cibanoang.

foto-foto: dok. al-zaytun



Hadiah Bagi Para Johan

foto-foto: dok. al-zaytun

Pembukaan awal pembelajaran tahun 1428-1429 H / 2007-2008 M bagi siswa-siswi Al-Zaytun dilaksanakan di lantai dua gedung serba guna Al-Akbar. Acara berlangsung meriah, diikuti para santri dari kelas I madrasah ibtidaiyah hingga kelas 12 madrasah aliyah serta wali-wali santri dari seluruh Nusantara dan Malaysia.

Selain itu, hadir pula Syaykh Al-Zaytun beserta Umi dan para eksponen, Dewan guru beserta para pengajar, Koordinator dari provinsi dan Malaysia, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu Drs Mahfud MA dan staf, serta undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Syaykh, Umi, serta Kakandepag menyerahkan hadiah kepada para johan (juara) dari setiap kelas yang telah berhasil meraih nilai tertinggi 1, 2, dan 3 pada ujian semester genap (kenaikan kelas) tahun akademik 2006-2007. Para johan penerima hadiah tersebut berasal dari santri seluruh tingkatan mulai Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), dan Aliyah (MA). Untuk santri MI penentuan para johan disatukan antara siswa rijal dan siswa nisa, sedangkan untuk siswa MTs dan MA penentuan para johan

dibagi berdasarkan gender, johan rijal dan johan nisa.

Hadiah diberikan dalam bentuk tabungan dengan jumlah bervariasi sesuai ketentuan yang ditetapkan panitia. Untuk siswa MI besaran

hadiahnya adalah Rp500 dikalikan jumlah siswa di setiap tingkatan kelas untuk johan pertama, Rp400 dikalikan jumlah siswa setiap tingkatan kelas untuk johan kedua, dan Rp300 dikalikan jumlah siswa setiap tingkatan kelas untuk johan ketiga. Sedangkan untuk siswa MTs dan MA besaran hadiahnya adalah Rp700 dikalikan jumlah siswa rijal/nisa di setiap tingkatan kelas, Rp600 dikalikan jumlah siswa rijal/nisa di setiap tingkatan kelas, dan Rp500 dikalikan jumlah siswa rijal/nisa di setiap tingkatan kelas.

Untuk keperluan pemberian hadiah



tersebut para johan didaulat maju ke depan secara bergiliran, dimulai dari para johan santri tingkat MI, kemudian para johan santri tingkat MTs, dan terakhir para johan santri tingkat MA. Untuk santri MI hadiah diberikan oleh ummi Farida Al-Widad, sedangkan untuk santri MTs diberikan oleh

Kasubag Mapenda Indramayu, Drs Sulaiman Hasan, dan untuk santri MA diberikan oleh Kakandepag Indramayu Drs Mahfud MA. Meski secara nominal jumlah hadiah yang diberikan tidak terlalu besar namun pemberian apresiasi tersebut diharapkan dapat memacu semangat para johan untuk

mempertahankan prestasi belajar mereka, serta merangsang para santri lain turut meningkatkan prestasi belajarnya.

Berikut data para johan penerima hadiah dari santri setiap angkatan berikut jumlah tabungan yang mereka terima.

Data Johan Pembelajaran Tahun Akademik 2006-2007 Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah Al-Zaytun

No.	Kategori	No. Induk	Nama	R/N	Kelas	Nilai Total	Nilai Rata-rata	Koordinator
1	Kelas 1	D20060293	Tamara Alfira Nisa binti Teguh Sawgaji	N	01-B-01	89,30	9,92	Jakarta dan Sekitarnya
2	Kelas 1	D20060027	Sayyid Akmal Rabbani bin Agus Waluyo	R	01-B-02	89,03	9,89	Jakarta dan Sekitarnya
3	Kelas 1	D20060150	Rifa Nawra Arhamah binti Fahrurozi	N	01-B-01	88,62	9,85	Jakarta dan Sekitarnya
4	Kelas 2	D20060232	Ikhwanudin Fathurahman bin Sri Wardani	R	02-B-01	107,33	9,76	Jawa Tengah
5	Kelas 2	D20050244	Ibnu Mujadidal Haq bin Suparman	R	02-B-02	107,15	9,74	Jakarta dan Sekitarnya
6	Kelas 2	D20050859	Azzukhrufina Nadia Arsy binti Taufiq Karjadi	N	02-B-01	106,69	9,70	Jakarta dan Sekitarnya
7	Kelas 3	D20050355	Lulu Baety binti Banon Prahatin Prakoso	N	03-B-01	107,34	9,76	Jawa Tengah
8	Kelas 3	D20051558	Irsyad Abdul Hamid Darussalam bin Sumarmo	R	03-B-01	107,11	9,74	Jakarta dan Sekitarnya
9	Kelas 3	D20050530	Dien Kharis Majid bin Suwardi	R	03-B-01	106,81	9,71	Jawa Tengah
10	Kelas 4	D20051646	Arrafi Kurnia Rasyid bin Jaelani	R	04-B-01	128,60	9,89	Jawa Timur
11	Kelas 4	D20051392	Mafajah Salsabila Alfariis binti Muhammad Zul Fi	N	04-B-01	127,80	9,83	Jawa Timur
12	Kelas 4	D20050790	Sharfina Adzani binti Yudi	N	04-B-01	127,70	9,82	Jakarta dan Sekitarnya
13	Kelas 4	D20052168	Nurul Aminah binti Wariyoto	N	04-B-01	127,70	9,82	Jakarta dan Sekitarnya
14	Kelas 5	D20051169	Alyani Yasmin binti Ipik Darmadi	N	05-B-01	129,41	9,95	Pusat
15	Kelas 5	D20050835	Muhammad Ikhsan Purnamasari bin Drs. Sarimun	R	05-B-01	127,38	9,80	Jakarta dan Sekitarnya
16	Kelas 5	D20050002	Ziela Rofahiyat El Quswa binti Imam Prawoto	N	05-B-01	123,79	9,52	Pusat
17	Kelas 7 Nisa	20060236	Ajeng Puspa Malinda binti Slamet S	N	07-BB-01	208,63	9,07	Jawa Tengah
18	Kelas 7 Nisa	20060001	Nurul Azizah binti Imam Supriyanto	N	07-BB-01	208,22	9,05	Pusat
19	Kelas 7 Nisa	20060236	Amelia Puspa Tamara binti Slamet S	N	07-BB-01	206,11	8,96	Jawa Tengah
20	Kelas 7 Rijal	20060217	M. Luthfi Ismail bin Ade Ismail	R	07-BA-01	206,33	8,97	Jawa Tengah
21	Kelas 7 Rijal	20060356	Ahmad Luqman bin Mohammad Nizam	R	07-BA-01	204,65	8,90	Malaysia
22	Kelas 7 Rijal	20060308	Rizaldy Faisal bin Taufik Elhakim	R	07-BA-01	204,00	8,87	Kalimantan Tengah
23	Kelas 8 Nisa	20050006	Quratu Aini Haqiqi binti S., Achdiat H	N	08-BB-01	257,84	9,21	Pusat
24	Kelas 8 Nisa	20050553	Namiroh Samiyah binti Barhan	N	08-BB-01	257,33	9,19	Lingkungan Ma'had
25	Kelas 8 Nisa	20050569	Wasi'ah Naila Rahmah binti Munir Abas	N	08-BB-01	253,97	9,01	Lingkungan Ma'had
26	Kelas 8 Rijal	20050164	Ridho Dewantoro bin Suwaryok	R	08-BA-01	258,26	9,22	Jakarta dan Sekitarnya
27	Kelas 8 Rijal	20050379	Muhammad Thaahaa bin Asraruddin	R	08-BA-01	254,75	9,10	Sumatera Utara
28	Kelas 8 Rijal	20050209	Abghi UI Haq bin Syamsudin A.R	R	08-BA-01	253,75	9,06	Jakarta dan Sekitarnya
29	Kelas 9 Nisa	20040305	Maryam binti Barhan	N	09-BB-01	195,65	9,32	Lingkungan Ma'had
30	Kelas 9 Nisa	20040337	Dini Nurilah binti Dede Bakti M	N	09-BB-01	195,60	9,31	Jawa Timur
31	Kelas 9 Nisa	20040249	Nurul Fadhlilah binti Toyib	N	09-BB-01	195,02	9,29	Jakarta dan Sekitarnya
32	Kelas 9 Rijal	20040071	Fajar Sofyan bin Supardi	R	09-BA-01	192,79	9,18	Jakarta dan Sekitarnya
33	Kelas 9 Rijal	20040411	Muh. Ihsan Hardi bin Harmen Asti N	R	09-BA-01	190,93	9,09	Sumatera Barat
34	Kelas 9 Rijal	20040610	Imamudin A'la bin Saiful Manan	R	09-BA-01	189,88	9,04	Lingkungan Ma'had
35	Kelas 10 Nisa	20030543	Dwintha Maya Kartika binti Ansyori Akhmad	N	10-BB-01	227,54	8,75	Sumatera Selatan
36	Kelas 10 Nisa	20030439	Yuniar Isnani binti Syamsul Hidayat	N	10-BB-01	222,05	8,54	Sumatera Barat
37	Kelas 10 Nisa	20030787	Nur Najwa binti Saroni	N	10-BB-01	221,12	8,50	Malaysia
38	Kelas 10 Rijal	20030176	Ahmad Faizun bin Sahudin	R	10-BA-01	220,73	8,49	Jakarta dan Sekitarnya
39	Kelas 10 Rijal	20030526	Akhmad Rizki Subki bin Pamudjianto	R	10-BA-01	218,97	8,42	Sumatera Barat
40	Kelas 10 Rijal	20030302	Kamal Husein Syaefudin bin Soleman	R	10-BA-01	218,82	8,42	Jakarta dan Sekitarnya
41	Kelas 11 IPA Nisa	20020900	Murmainnah Rahman P binti Abdul Rahman I	N	11-IPA-BB-01	206,31	8,97	Sulawesi Tengah
42	Kelas 11 IPA Nisa	20020720	Karina Wahyudi Utami binti Ansyori Akhmad	N	11-IPA-BB-01	203,87	8,86	Sumatera Selatan
43	Kelas 11 IPA Nisa	20020217	Anisa Karimah binti Engkos Wahyu Hidayat	N	11-IPA-BB-01	203,65	8,85	Jakarta dan Sekitarnya



BAGIAN EMPAT

Pada bagian keempat kilas balik menyongsong sewindu Al-Zaytun, 27 Agustus 1999-27 Agustus 2007, kami menyajikan bagaimana sistem manajemen Al-Zaytun membangun prasarana dan sarana yang benar-benar mengubah paradigma berpikir khalayak ramai dari anggapan bahwa pesantren itu kumuh menjadi pesantren itu bersih, megah, gagah dan modern. Segagah sejarah pesantren yang mampu bertahan melintasi berbagai tantangan dari sejak beberapa abad lalu hingga kini. Bahkan tidak berlebihan bila disebut, Al-Zaytun tengah membangun monumen milenium ketiga.

Membangun Monumen Milenium Ketiga



foto-foto: berindo wilson

Semua bangunan gedung di pondok pesantren modern komprehensif (kampus) ini bukan hanya bersih, megah dan gagah untuk sesaat, melainkan dibangun berdaya tahan lebih lima ratusan tahun bahkan bisa puluhan abad, setara bangunan-bangunan monumental di dunia, yang sudah mengukir sejarah pada zamannya.

Gaya arsitekturnya pun merupakan perpaduan menyeluruh dari semua gaya arsitektur yang ada di dunia ini, gaya arsitektur bernilai estetika universal, yang di Al-Zaytun disebut sebagai gaya arsitektur *rahmatan lil alamin*.

Pendek kata, Al-Zaytun dibangun sebagai sebuah kawasan pendidikan terpadu yang monumental dalam abad 21 ini. Hingga kelak, sampai ratusan tahun dan berabad-abad ke depan, Al-Zaytun akan dicatat sejarah menjadi

sebuah monumen fenomenal milenium ketiga. Diyakini, kelak, bagi generasi berikutnya, monumen ini akan bernilai sejarah setara dengan bangunan-bangunan monumental dunia yang sudah tercatat dalam sejarah zamannya masing-masing.

Seperti, bangunan monumental Islam kompleks Masjid Cordoba, Istana Al-Hamra dan Medinat az-Zahra di Spanyol. Juga bangunan-bangunan monumental Romawi, Mesir, Dinasti Cina klasik, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang bersejarah dan mampu bertahan ratusan sampai ribuan tahun. Setiap bangunan yang didirikan di Al-Zaytun, diprogram harus memenuhi persyaratan pokok yakni berdaya tahan lama, aman untuk difungsikan sesuai hajat Al-Zaytun.

Setiap bangunan itu harus cukup kuat dan berkemampuan memikul

pembebanan yang terjadi baik pembebanan vertikal maupun horizontal dalam jangka waktu lama. Kekuatan itu dirancang dengan penggunaan kekuatan elemen-elemen (material) konstruksi berkualitas dan proses pengerjaan yang telaten dan cerdas.

Dalam hal sistem kontrol mutu bangunan dilakukan dengan sistem pengendalian sumber daya yang disebut BMW, singkatan dari biaya, mutu dan waktu. Semua dikontrol sejak awal, baik mutu manusia, mutu bahan bangunan maupun mutu peralatan bangunannya.

Salah satu hal yang amat menarik dalam proses dan sistem pembangunan di Al-Zaytun bahwa semua dilakukan oleh tenaga profesional sendiri yang teruji handal dan memegang prinsip ibadah, akhlak dan amanah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan berada dalam satu manajemen internal yang terpadu dan terkendali tanpa batas waktu, 24 jam setiap harinya.

Dengan manajemen pembangunan seperti ini, bukan saja kualitas bangunannya yang bisa dijamin, juga soal pembiayaannya yang jauh lebih rendah, 1 : 3. Artinya, pembiayaannya hanya 1/3 dari biaya jika dikerjakan secara konvensional. Maklum, di Al-Zaytun selain tidak ada birokrasi yang panjang dan berbelit, juga dijamin tidak ada korupsi.

Sistem manajemen dan proses pembangunan di Al-Zaytun tidaklah asal ada dan asal jadi. Sejak awal Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) telah merencanakannya sedemikian matang. Kemudian dibentuk tim pelaksana pembangunan pada pertengahan Mei 1995. Tim pembangunan itu menerima amanah untuk bertugas dan bertanggung jawab mewujudkan bangunan-bangunan yang dihajatkan sebagaimana telah direncanakan dalam bentuk *master plan* Kampus Al-Zaytun. *Master plan* itu ditetapkan bersama di bawah pimpinan Syaykh AS Panji Gumilang, selaku *grand architect*-nya.

Kemudian, dalam perkembangan berikutnya, untuk memperkuat perencanaan, termasuk bidang arsitektur, Tim Al-Zaytun yang langsung dipimpin oleh Syaykh AS Panji Gumilang, dengan anggota tim M Natsir Abdul Qadir, M Yusuf Rasyidi dan Ir Bambang Abdul Syukur, melakukan studi banding ke Eropa, khususnya ke Andalusia.

Studi banding ini, selain menyangkut hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan pada umumnya, juga secara khusus menelusuri lengkung-lengkung arsitektur dunia yang mengundang

kekaguman umat manusia sampai ratusan tahun.

Kunjungan itu telah pula memperluas wawasan dan memompakan spirit yang lebih besar serta meresapkan sentuhan-sentuhan keindahan karya-karya besar arsitektur klasik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampus ini. Semua masukan itu memberi kekayaan ide arsitektur bernilai karsa dan estetika tinggi dan universal dalam rancang bangun gedung-gedung di Al-Zaytun, terutama rancang bangun Masjid Rahmatan lil Alamin.

Maka jika mengamati seluruh konstruksi dan arsitektur bangunan di kampus ini, terutama rancang bangun dan arsitektur Masjid Rahmatan lil Alamin, tak berlebihan bila perencana dan arsitek Al-Zaytun dapat disejajarkan dengan arsitek Abbasiyah yang membangun kompleks Masjid Cordoba, Istana Al-Hamra dan Medinat az-Zahra di Spanyol. Atau Salman al-Farisi yang

korupsi.

Semua proses pembangunan prasarana dan sarana di Al-Zaytun bermula dan berpedoman pada *master plan* yang telah ditetapkan bersama di bawah pimpinan Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang. Kebersamaan atau *team work* adalah hal yang menonjol dan mutlak di kampus ini. *Team work* yang taat pada suatu sistem dengan segala pranatanya mulai dari yang tertinggi sampai terendah.

Semua eksponen, termasuk karyawan pembangunan, sangat menyadari dan memahami bahwa keberadaannya dalam suatu tim kerja adalah untuk ibadah kepada Allah, dan sepatutnya berakhlakul karimah baik kepada pimpinan, sahabat, bawahan maupun juga terhadap material dan peralatan pembangunan serta terhadap waktu. Di bawah pimpinan Syaykh Panji Gumilang, yang bijak dan kebabakan, setiap eksponen memahami fungsi



Arsitektur pembangunan Al-Zaytun dipimpin langsung Syaykh AS Panji Gumilang.

merancang pembuatan khandaq (parit) yang mengelilingi kota Madinah.

Sebagaimana karya arsitek Abbasiyah dan Salman al-Farisi yang dicatat dalam sejarah zamannya masing-masing, begitu pula karya tim perancang pembangunan Al-Zaytun ini kelak pantas dicatat sejarah zamannya yang membangun bangunan-bangunan monumental yang kelak menjadi bukti sejarah kebangkitan Islam dan kebangkitan bangsa ini.

Sistem Manajemen

Sistem manajemen pembangunan Al-Zaytun pantas dijadikan sebagai panutan bagi siapa saja pelaksana pembangunan di negeri ini. Sehingga pembangunan di negeri ini bisa terlaksana dengan baik, efisien, efektif dan berkualitas, serta terbebas dari

dirinya masing-masing dalam tugas dan tanggung jawabnya terhadap amanah yang diberikan kepadanya.

Sistem manajemen yang diterapkan tidak sekadar sistem manajemen modern yang sudah teruji ampuh di tempat lain, melainkan lebih dari pada itu, sistem manajemen yang dinaungi dan dibekali kedalaman iman dan taqwa. Sistem manajemen yang berpegang pada ibadah, akhlak dan amanah. Manajemen Ilahiyah yang bermakna manajemen tauhid atau manajemen terpadu dalam satu kesatuan sistem. Tahapan-tahapan pembangunan proyek mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan berada dalam satu manajemen terpadu dan terkendali.

Dalam sistem manajemen demikian itu, Yayasan Pesantren Indonesia (YPI)



foto: berindo wilson

Tahapan pembangunan proyek mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan berada dalam satu manajemen.

Semua eksponen, termasuk karyawan pembangunan, sangat menyadari dan memahami bahwa keberadaannya dalam suatu tim kerja adalah untuk ibadah kepada Allah.

sebagai induk organisasi Al-Zaytun, pertama kali membentuk tim pelaksana pembangunan pada pertengahan Mei tahun 1995. Tim inilah sebagai penerima amanah yang bertugas dan bertanggung jawab mewujudkan bangunan-bangunan yang direncanakan dalam *master plan* Al-Zaytun yang telah ditetapkan bersama di bawah pimpinan Syaikh Al-Zaytun.

Kemudian dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan yang disebut sebagai Tim Tanmiah. Tim Tanmiah ini dipimpin oleh seorang ahli beranggotakan delapan tim pembangunan, terdiri dari arsitek, teknik sipil, mekanik dan kelistrikan serta dilengkapi beberapa penanggung jawab kepersonaliaan. Sementara untuk pelaksana di lapangan ditunjuk beberapa insinyur muda, mendukung tim inti yang juga turun ke lapangan sesuai keperluannya.

Tim Tanmiah ini bekerja secara terpadu dan terkendali selama 24 jam setiap hari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan. Dengan sistem manajemen terpadu 24 jam ini, maka setiap instruksi tertangani secara cepat dan tepat. Selama 24 jam para karyawan mencurahkan tenaga mereka untuk menyempurnakan azam umat: sesuai maklumat Al-Zaytun membangun monumen umat Islam yang akan dihadiahkan untuk umat Islam sedunia. (Majalah Al-Zaytun Edisi 11 hlm.16).

Pertama kali, Ir Djamal M Abdat, ditetapkan sebagai Rois 'am Tim Tanmiah, dan dianggotai oleh Ir Asrur Rifa, Ir Bambang A Syukur, Ir

Abdurrahman, Ir A Hanif dan Ir Armand AR dan dilengkapi personalia terdiri dari Abbas Ali Nasution selaku koordinator bersama Usman Azhari dan Rahmat Ramadhan.

Tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam tim pembangunan ini mengerjakan sendiri semua pekerjaan. Sejak awal antara konsultan dan kontraktor dibuat menyatu. Tidak dikenal *main contractor* dan subkontraktor. Dengan sistem manajemen pembangunan seperti itu, banyak mata rantai yang diputus, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang yang tidak seharusnya dibelanjakan. Semuanya dikerjakan sendiri. Keperluan besi, misalnya, yang dibeli bahan baku, lalu dipabrikasi sendiri, di-*erection* sendiri.

Sistem seperti ini terbukti mempunyai banyak keunggulan dan keuntungan dibandingkan dengan sistem proyek pembangunan yang lazim di luar Al-Zaytun. Selain untuk menghemat biaya juga menjaga mutu. Dicontohkan, untuk bangunan seperti Gedung Abu Bakar, biayanya hanya 1/3 dari biaya bangunan jika itu dikerjakan oleh kontraktor luar.

Juga unggul dari segi efisiensi waktu. Contohnya, ketika merencanakan Masjid Al-Hayat hanya membutuhkan waktu satu pekan, pelaksanaan pembangunannya pun hanya 100 hari. Bandingkan dengan kebiasaan di tempat lain, untuk perencanaan bangunan saja paling tidak membutuhkan waktu dua kali dari lama pelaksanaan pembangunan bangunan itu sendiri.

Dengan penghematan itu, dana bisa dipergunakan untuk membeli bahan-bahan material yang berkualitas. Dalam hal ini, tanmiah sangat selektif memilih bahan material. Sebagaimana dijelaskan oleh Djamal M Abdat, Rois 'am Tanmiah, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan fisik secara keseluruhan, bahwa pihaknya tidak mau menggunakan bahan yang tidak berkualitas.

Dalam hal pengadaan material pun selalu dibeli dalam partai besar, sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih murah. Biasanya, pembelian tidak hanya untuk kebutuhan satu proyek bangunan. Sebab pembangunan di Al-Zaytun terus berlanjut sampai kebutuhannya tercakup. Kala itu direncanakan, setiap tahun harus ada bangunan yang jadi. Targetnya setiap tahun satu gedung pembelajaran dan satu gedung asrama harus selesai dibangun. Bahkan, Syaikh Al-Zaytun mengisyaratkan agar dalam satu tahun bisa terealisasi tiga bangunan. Maka, tatkala membeli besi atau baja, atau material jenis lain, tidak pernah

khawatir akan terbuang, pasti dimanfaatkan.

Selain itu, yang juga membuat murah, semua bahan-bahan dibeli dalam bentuk bahan baku. Bahan baku atau bahan mentah itu kemudian diolah kembali oleh karyawan-karyawan Al-Zaytun yang memang sudah berpengalaman. Besi dan baja dipabrikasi sendiri, lalu *erection* juga dilakukan sendiri. Begitu pula untuk bahan-bahan perkayuan. Semua komponen bangunan seperti daun pintu, kusen, furniture dan khususnya isi bangunan (meja, kursi, papan tulis dan partisi) dikerjakan sendiri.

Dengan sistem manajemen seperti itu, setiap bangunan yang didirikan di Al-Zaytun memenuhi persyaratan pokok berdaya tahan lama. Setiap bangunan itu harus cukup kuat dan berkemampuan memikul beban dalam jangka waktu lama. Kekuatan itu dirancang dengan penggunaan kekuatan elemen-elemen (material) konstruksi berkualitas dan proses pengerjaan yang telaten dan cerdas.

Begitu pula dalam aplikasi gaya arsitektur, semuanya dipertimbangkan secara matang. Gaya itu harus punya nilai estetika universal, tidak cenderung kepada suatu etnik lokal atau antipati terhadap nilai-nilai estetika tertentu. Menurut Ir Bambang Abdul Syukur, arsitek tim tanmihyah, Syaykh Al-Zaytun selalu berpesan, tidak ada dikotomi arsitektur Islam, gothic atau tradisional.

Dalam hal sumber daya manusia, pada waktu proyek dimulai, hanya sembilan orang. Kemudian sesuai dengan kebutuhan pembangunan, tahun 2004 telah mencapai lebih 2.500 orang. Terbagi dalam 28 unit karyawan, masing-masing fungsinya berbeda.

Jumlah ini tidak statis tapi dinamis artinya bisa berubah sesuai kebutuhan. Bisa bertambah bisa berkurang. Jika pekerjaan di suatu unit sudah selesai maka karyawannya akan diperbantukan ke unit lain yang sedang mengejar target penyelesaian.

Seluruh karyawan tinggal di sekitar lokasi proyek. Setiap pagi mereka menerima amanah dari insinyur pelaksana. Malam hari, melakukan evaluasi tentang progres yang telah dicapai.

Sehingga setiap saat, semua pekerjaan menjadi terkontrol. Hampir tidak ada mandor yang harus berada di lokasi proyek setiap saat. Artinya, walaupun pimpinan unit sedang tidak ada di lokasi proyek, seluruh program harian tetap berjalan semestinya.

“Mandor mereka adalah Alquran, di tangan mereka alat kerja, di kantong mereka ada Alquran, minimal kitab Juz’

Amma”, kata Syaykh Panji Gumilang. Mungkin saat ini, sistem ini satu-satunya di Indonesia atau bahkan di dunia.

Setiap pekerja mendapat kesempatan untuk bekerja di semua unit. Dengan demikian semua karyawan diharapkan punya keahlian yang bermacam-macam. Suatu saat mereka mengaduk semen, pada saat lain mereka juga harus bisa mengemudikan dozer atau membuat *furniture*.

Besok bisa jadi tukang batu, lusa bisa di kantor memegang komputer. Jadi, harus di-*rolling* supaya hidup, tidak membosankan. Di sini setiap unit sama, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah antara petugas yang mengecor, menyapu atau yang duduk di depan komputer. Semua nilainya sama, yang membedakan adalah ketakwaan.

Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan juga dimulai dari perencanaan material. Kekuatan bangunan bergantung kepada kekuatan elemen-elemen (material) konstruksinya. Untuk bangunan yang diprogram akan bertahan berabad-abad, bahan-bahan dasarnya harus berkualitas. Dan untuk lebih menjamin kualitas bahan-bahan material itu, sejak awal dilakukan kontrol mutu, mulai dari pengadaannya sampai pemanfaatannya.

Material konstruksi yang digunakan meliputi material baja profil, baja tulangan dan material beton yakni campuran material semen, pasir, kerikil dan air. Material arsitektur meliputi material untuk lantai dan tangga seperti keramik, untuk dinding berupa batu, cat, kayu, kusen, kayu pintu, jendela dan kaca. Adapula material untuk plafond seperti tripleks, gypsum serta material atap berupa genteng dan alumunium. Material plumbung meliputi instalasi pipa-pipa air bersih dan air kotor, pipa hidrant, kran wastafel, kloset, dan lainnya. Dan untuk material elektrikal meliputi instalasi kabel-kabel, pipa-pipa listrik, dan lampu-lampu.

Untuk baja konstruksi, digunakan baja tulangan dan baja profil yang masih harus didatangkan dari Korea, Jepang, Polandia dan Rusia. Soalnya, ketika pernah dicoba menggunakan baja WF lokal hasilnya sangat tidak memuaskan, belum apa-apa sudah melengkung. Baja tulangan yang digunakan berdiameter mulai 6 mm hingga 32 mm. Sedangkan untuk baja profil menggunakan bentuk-bentuk seperti *wide flange* (sayap lebar) berdimensi tinggi 200 mm hingga 450 mm, *Canal Cnp* berdimensi tinggi mulai 75 mm hingga 150 mm, siku berukuran 30 mm hingga 100 mm dan juga plat baja berukuran tebal mulai 2 mm hingga

15 mm.

Sedangkan untuk kekuatan lantai bangunan digunakan pelat lantai beton bertulang dengan kualitas betonnya 300 kg per cm persegi. Pelat lantai tersebut dipikul oleh balok lantai dengan menggunakan baja profil sayap lebar (*wide flange*) dengan kekuatan tegangannya bernilai 4.100 kg per cm persegi.

Suatu hal yang patut dicatat bahwa semua pengadaan material adalah bahan baku. Kemudian diolah sendiri menjadi bahan material jadi. Keperluan besi, misalnya, yang dibeli bahan baku, lalu dipabrikasi sendiri dan di-*erection* sendiri. Dalam pabrikasi baja baik pemotongan, pengelasan maupun pelubangan (pons) dan *rolling* plat baja seluruhnya menggunakan teknologi Al-Zaytun sendiri. Teknologi pembesian memanfaatkan peralatan yang disebut *bar cutter* dan *bar bending machine* untuk memotong dan membengkokkan besi tulangan sesuai kebutuhan.

Semua itu dikerjakan sendiri oleh unit kerja pabrikasi yang bertanggung jawab mengenai konstruksi baja dan pembesian, dari mulai bahan baku sampai menjadi bahan yang siap dipasang menjadi konstruksi bangunan di Al-Zaytun. Untuk bisa memenuhi target yang diprogramkan oleh yayasan tepat waktu, sistem kerja yang diterapkan bagian pabrikasi berbeda dengan unit-unit yang lain yakni memberlakukan dua shift, bekerja 24 jam siang dan malam.

Di samping memberlakukan sistem kerja 24 jam, tenaga kerja unit pabrikasi pun mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya serta berpengalaman dalam pembesian sebelumnya.

Begitu pula dalam pemasangan konstruksi baja menggunakan alat *power winch*. Dalam pengeboran air menggunakan mesin bor sumur (*drilling machine*) pada *submersible pump* (pompa sumur dalam).

Dalam pelaksanaan pondasi pun diterapkan teknologi modern yang dioperasikan tenaga sendiri. Dimulai dengan penggalian tanah menggunakan excavator. Setelah itu tanah diangkut dengan *dump truck* ke suatu tempat. Selanjutnya tanah diratakan dengan dozer sebelum dilakukan pemadatan oleh vibrator hingga diperoleh daya dukung yang kuat. Pada saat pembetonan, tim memanfaatkan truck mixer untuk menuangkan beton siap pakai. Truk ini mengambil beton siap pakai tersebut dari *batching plant* (pembuatan beton masak) pembuat *ready mix concrete* yang juga dikerjakan sendiri di kompleks Al-Zaytun.

Terobosan Baru Depkeu

Wacana reformasi birokrasi dikonkritkan Menkeu Sri Mulyani di Departemen Keuangan. Sebuah terobosan baru, namun ditanggapi 'dingin' oleh media.

Gaung reformasi sudah nyaring kedengaran sejak satu dasawarsa silam, namun reformasi bidang birokrasi terkesan tidak tersentuh, masih sekadar wacana. Namun, sejak 1 Juli 2007, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat terobosan baru. Ia mengkonkritkan wacana itu dengan memberlakukan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan. Yang menjadi program utama dalam reformasi itu yakni membenahan organisasi yang meliputi: modernisasi, pemisahan fungsi, dan penajaman fungsi. Kemudian peningkatan SDM yang meliputi: diklat berbasis kompetensi, pembangunan pusat *assessment* (penilaian), penyusunan pola mutasi, dan peningkatan disiplin. Program utama lainnya, yakni penyempurnaan tata laksana (*Business Process*) dan perbaikan struktur *remunerasi* (tunjangan). Namun besarnya *remunerasi*, yakni Rp 4,3 triliun dalam reformasi birokrasi itu, mengundang pertanyaan berbagai kalangan. Walaupun Menkeu Sri Mulyani mengatakan Depkeu tidak menaikkan anggaran karena tunjangan itu, tapi hanya merelokasi anggaran yang ada, namun berbagai harian tetap menanggapinya dengan dingin, bahkan ada yang menyebut salah kaprah.

Harian *Kompas* (12/7) misalnya menanggapi kebijakan ini dengan hanya menyatakan, dari pada reformasi birokrasi hanya sekadar diwacanakan dan dirapatkan, lebih lengkap dan lebih konkrit jika dilaksanakan, bahkan juga meskipun bisa disertai *trial and error*, percobaan dan kekeliruan. Menurut harian ini, karena departemen ini dianggap departemen "basah", sehingga masuk akal, reaksi yang muncul terhadap langkah reformasi ini cenderung dialihkan ke perbaikan penghasilan. Reaksi itu bisa dimengerti, tetapi jangan dibiarkan membuat kita tidak melihat segi positif

dan strategis langkah reformasi itu.

Nada yang sama datang dari harian *Investor Daily* (10/7). Harian ini menyatakan, kenaikan tunjangan di tengah angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat besar saat ini menimbulkan sejuta pertanyaan. Apakah kenaikan tunjangan sebesar itu akan berbanding lurus dengan kenaikan kualitas pelayanan pegawai Depkeu? Harian ini lebih menyetujui kalau gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan ditentukan

publik. Selain itu, standar rekrutmen, gaji pokok dan tunjangan perlu dibuat dan diberlakukan secara nasional.

Sementara *Indo Pos* (10/7) menyebut, reformasi birokrasi Depkeu ini salah kaprah. Keputusan Menkeu dengan *remunerasi* yang besar itu disebutkan sebagai keputusan yang terbalik. Menurut *Indo Pos*, reformasi birokrasi memang merupakan keharusan. Namun, reformasi birokrasi yang dicituskan Depkeu diragukan, sebab institusi seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai dan instansi terkait di Depkeu sampai saat ini masih dibanjiri keluhan dari masyarakat. Dan alasan pemberian *remunerasi* karena gaji pejabat eselon I di Depkeu di

bawah profesional, agar mendekati market, dan tidak lagi menjadi komisaris di tempat lain, menurut *Indo Pos*, hal itu justru bertentangan dengan etika transparansi dan akuntabilitas. Pemberian insentif apapun harus disesuaikan dengan kinerja para birokrat dalam memberikan pelayanan publik. Sebab, pelayanan publik inilah saat ini yang banyak digugat karena da-

lam pelaksanaannya sering tidak efektif, bertele-tele, boros biaya, tidak pasti, dan tidak transparan.

Pendapat sedikit optimis diberikan *Koran Tempo* (18/7). Harian ini menyayangkan arah pembahasan reformasi birokrasi yang akhir-akhir ini seperti dipersempit menjadi urusan kenaikan gaji semata. Padahal menurut harian ini, menyadari reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan memerangi korupsi, maka pantas ditaruh harapan besar pada langkah penting itu. Jadi yang perlu dilakukan menurut harian ini adalah terus melakukan pengawasan dan kritik terhadap jalannya proses reformasi birokrasi itu sembari tetap memelihara optimisme. Karena seperti diwantiwanti ahli reformasi birokrasi dari Bank Pembangunan Asia, Staffan Synnerstrom, reformasi birokrasi bukanlah proses yang bisa rampung dalam tempo semalam. ■ MS



secara nasional. Jangan setiap departemen menentukan sendiri. Dan agar tunjangan benar-benar diberikan kepada pihak yang berprestasi, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan tujuan, strategi, dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan sesuai strategi yang sudah dibuat. Selain itu, pemerintah juga membuat *key performance indicator* (KPI), kemudian melakukan evaluasi secara rutin dan fair. Jadi, pihak yang berdisiplin dan berprestasi diberikan *award* berupa kenaikan tunjangan, sedangkan yang malas dan melakukan kesalahan diberikan *punishment*. Maka dengan sistem yang jelas seperti itu, kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS tak jadi masalah, karena dampak positif dari pelayanan birokrasi akan dirasakan oleh dunia usaha dan masyarakat. Intinya, *Investor Daily* berpendapat, reformasi yang sudah bergulir di Depkeu sangatlah dihargai. Tapi, langkah itu perlu segera diikuti oleh instansi lain karena untuk melayani



Angkatan Laut Singapura latihan bersama TNI-AL di Teluk Jakarta.

foto: repro tempo

TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura Gelar Rapat Bersama

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bersama Chief of Defence Forces Singapore Armed Forces (CDF SAF) memimpin Combined Annual Report Meeting (CARM) tahun 2007, di Hotel Shangri-La, Jakarta (13/7). Rapat yang digelar itu sudah rutin dilakukan antar kedua negara secara bergantian.

Dalam pertemuan itu dihasilkan laporan kegiatan selama tahun 2007 dan rencana kegiatan tahun 2008 oleh masing-masing delegasi, yakni Indonesia-Singapore *Intelligence Exchange* (Isintelex), Indonesia-Singapore *Joint Coordinating Committee* (ISJCC), Indonesia-Singapore *Joint Training Committee* (ISJTC) dan Indonesia-Singapore *Joint Logistic Committee* (ISJLC).

Kedua delegasi sepakat bahwa tahun 2007 merupakan tonggak penting bagi hubungan persahabatan antara TNI-SAF yang dibangun berdasarkan rasa saling percaya dan

saling pengertian. Hubungan kuat yang sudah terjalin dengan baik memungkinkan kedua angkatan bekerjasama dalam berbagai misi.

Kedua delegasi sependapat telah merasakan manfaatnya demi terciptanya kawasan yang stabil, aman dan damai. Hubungan baik itu dicapai melalui latihan bersama, patroli, pendidikan, pertukaran kunjungan dan bahkan bhakti sosial yang sudah terlaksana dengan baik. Demikian pula di Selat Singapura dan Selat Philips pada periode ini tidak ada kejadian perompakan di wilayah operasi Patkor Indosin.

Operasional *Surveillance*

teroperabilitas dalam memberantas pembajakan dan perompakan di laut. Bhakti Sosial Bersama juga digelar pada Juni dan Desember 2006 di Teluk Bakau, Malay Rapat dan Balai Karimun.

Pendidikan dan Latihan, tahun 2006, tiga Perwira TNI berhasil lulus pada program Pasca Sarjana di NTU, dan saat ini sedang mengikuti program Pasca Sarjana Kajian Strategis Hubungan Internasional di NTU dan NUS. SAF akan melanjutkan program beasiswa ini untuk Perwira TNI sebanyak 6 kursi. Sementara 20 orang Perwira TNI mengikuti kursus bahasa Inggris tingkat Intermediate di *Regional Language Centre* Singapura. Pada periode berikutnya, SAF menyediakan 40 kursi untuk mengikuti kursus ini.

Saat yang sama, 6 Perwira SAF mengikuti kursus bahasa Indonesia di Pusbahasa Dephan Jakarta yang untuk tahun 2007 disediakan 10 kursi. Untuk latihan bersama, pernah diujicoba Latihan Safkar Indopura 17/2005 di Wonosari Jateng, latihan Chandrapura di Singapura, dan Latihan Elang Indopura di Lanud Iswahyudi serta Latihan Camar Indopura di Pontianak. ■ RON, SP

Picture (Surpic) yang telah berlangsung sejak Mei 2005, dapat terlaksana dengan baik dengan cara memperkuat in-



**PIMPINAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Mengucapkan:

Selamat Hari Jadi Purwakarta Ke-176

20 JULI 1831 - 20 JULI 2007

*Semoga cepat terwujud masyarakat Purwakarta yang aman,
damai, demokratis, berkeadilan, maju dan sejahtera,
berdasarkan iman dan taqwa menuju
Wibawa Karta Raharja*

Ketua
dr. H. Sigit Soeroso

Wakil Ketua
H. Saipudin Zuhri, SH **R. Deddy Herawan S, S.AP**
Wakil Ketua

Sekretaris
Drs. H. Sofyan Effendi, M.Si



Grasi untuk kasus korupsi tak pernah terjadi sebelumnya.

foto: repro tempo

Surat Grasi Kepada Presiden

Tiga lembar kertas yang disiapkan Mulyana W. Kusumah menimbulkan harapan baru bagi dirinya dan teman-temannya sesama mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kini tengah mendekam di penjara. Kertas-kertas itu merupakan draf permohonan grasi kepada presiden agar kasus korupsi mereka diampuni.

Berawal dari pertemuan anggota KPU Ramlan Surbakti, Valina Sinka Subekti, dan Chusnul Maryah dengan Wapres Jusuf Kalla (29/6). Seperti dilaporkan *Koran Tempo*, ketiganya meminta perhatian pemerintah terhadap nasib rekan-rekan mereka yang dipenjarakan karena bagaimanapun telah berjasa pada negara.

Majalah *Tempo*, 9-15 Juli 2007, lebih memperjelas kunjungan itu. Menurut majalah ini, sebetulnya pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Di sela-sela pertemuan, dilaporkanlah permintaan perhatian terhadap para pejabat dan anggota KPU yang kini dibui.

Dalam pertemuan itu, Kalla mengatakan bahwa instrumen yang bisa dipakai adalah grasi. Tapi, Wapres tidak memberikan janji khusus. Dia hanya

Minta diberi pengampunan karena dianggap telah berjasa kepada negara. Bila dikabulkan, bisa menjadi preseden buruk.

menyatakan akan membicarakan dengan Presiden soal kemungkinan pemberian grasi.

Tentunya apa yang disampaikan Wapres menjadi harapan baru bagi mereka. Saat ini, selain Mulyana, yang menjadi terpidana adalah mantan ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, Daan Dimara, Rusadi Kantaprawira, Sekjen KPU Safder Jusaac dan mantan kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto. Selain itu ada juga mantan kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin.

Ini bukanlah upaya pertama yang dilakukan Ramlan, Valina dan Chusnul untuk membantu rekan-rekannya. Ketika ketiganya bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Maret 2006 untuk melaporkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden, hal ini juga sempat digulirkan.

Ketika itu, Presiden menyatakan tidak bisa mengintervensi proses hukum. Namun dia memiliki kewenangan memberikan amnesti, abolisi dan grasi. Sebulan setelah itu langsung ditindaklanjuti oleh para anggota KPU dengan

mengirim surat permohonan amnesti, namun tak ada tanggapan. Tiga bulan kemudian, surat kedua dilayangkan, tetap tak ada tanggapan.

Preseden Buruk

Sekjen KPU Aries Djaenuri menyatakan, permohonan grasi itu bukan semata-mata untuk para anggota dan pejabat KPU di pusat, melainkan juga untuk mereka yang ada di daerah.

Selama ini banyak kasus yang membuat anggota KPU di daerah dijerat hukum dan masuk bui. Sayangnya KPU tak memiliki datanya, sebab tak semua KPU daerah melapor.

Menanggapi rencana permohonan grasi oleh para terpidana kasus korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004, beberapa pihak tak setuju. Di antaranya, Mudzakkir, pakar pidana dari Universitas Islam Indonesia, seperti dikutip *Tempo* berpendapat, selama ini grasi hanya diberikan untuk kasus politik atau hukuman mati.

Lebih tegas, Direktur Masyarakat Pemantau Peradilan, Hasril Hertanto berpendapat,

bahwa grasi yang diberikan untuk kasus korupsi tak pernah terjadi sebelumnya. Kalau hal itu dilakukan, bisa menjadi preseden buruk. Para koruptor tak takut dipenjarakan karena berpikir suatu saat bisa minta grasi.

Pakar hukum tata negara Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Denny Indrayana, juga menyesalkan dimintakannya grasi bagi para terpidana kasus korupsi KPU. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan kesan tidak baik, karena bisa dianggap sebagai upaya intervensi eksekutif dalam wilayah hukum. Menurutnya, faktor jasa para anggota dan pejabat KPU jelas harus dihormati dan itu sudah dipertimbangkan dalam hal yang meringankan saat hakim menjatuhkan vonis.

Sementara Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menuding sempitnya waktu persiapan Pemilu 2004 sebagai penyebab rekan-rekannya masuk penjara. KPU hanya memiliki waktu 9 bulan untuk persiapan. Padahal idealnya adalah 2 tahun.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa anggota dan pejabat KPU ke pengadilan karena berbagai kasus penyimpangan dalam proses pengadaan logistik pemilu 2004. ■ RH

Kontroversi Sebuah Pembebasan

Bupati Semarang Bambang Guritno boleh bernapas lega karena majelis hakim membebaskannya dari dakwaan dugaan korupsi buku pelajaran Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dalam putusan sela, (5/7).

Hakim membebaskan terdakwa berdasarkan eksepsi terdakwa yang meminta dibebaskan dengan alasan jaksa penuntut umum terlambat memberikan perubahan dakwaan ke pengadilan. Perubahan dakwaan baru diserahkan pada 15 Juni, padahal sidang perdana digelar 14 Juni.

Akibat pembebasan itu, jaksa penuntut umum yang menangani perkara dugaan korupsi itu dieksaminasi atau diperiksa oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jateng.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung Salman Maryadi, seperti dikutip Kompas (12/7) menerangkan, bahwa pemeriksaan itu atas perintah Jaksa Agung kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Perintah itu kemudian ditindaklanjuti Kepala Kejati Jateng.

Apabila dari hasil eksaminasi terbukti jaksa tidak profesional dan melakukan kesalahan, ia akan dihukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pembebasan itu juga mendapat komentar dari beberapa pihak. *Koran Tempo* (6/7), mengutip komentar Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme Jateng, Abhan Misbah. Dia menganggap jaksa terlalu ceroboh.

Bambang Guritno terseret kasus korupsi pengadaan buku pelajaran 2004 senilai Rp 2,4 miliar. Bersama Ketua DPRD Semarang, dia didakwa menggelembungkan nilai proyek menjadi Rp 5,8 miliar. Uang hasil korupsi itu dibagi rata kepada anggota Dewan dan eksekutif. Bambang menerima *fee* Rp 650 juta. Dia sebelumnya ditahan sejak 28 Mei lalu. ■ RH



Dana nonbujeter tidak memenuhi syarat dalam pengambilan kebijakan.

foto: repro gatra

Hadiah Untuk Pak Menteri

Rokhmin Dahuri dituntut enam tahun penjara. Dia dituduh menerima hadiah (gratifikasi) untuk keperluan pribadi.

Jika nama Suhanah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang didakwakan kepada Rokhmin Dahuri, itu karena yang bersangkutan adalah saudara kandung sang mantan menteri.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengungkapkan, bahwa saudara Rokhmin itu menerima juga kucuran dana DKP. Namun Rokhmin segera berkilah bahwa dana itu hanya numpang lewat. Sebetulnya diberikan kepada masyarakat nelayan.

Seperti dilaporkan *Jurnal Nasional*, 12 Juli 2007, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Rokhmin telah memerintahkan Sekjen DKP Andin H. Taryoto, mengoordinasi penerimaan sumbangan. Sumbangan itu dilaporkan kepada Menteri dan oleh Menteri digunakan selain untuk operasional DKP juga untuk pribadi terdakwa.

Penggunaan untuk pribadi antara lain uang saku naik haji Rokhmin sebesar Rp 15 juta. Mengenai pengeluaran untuk saudara kandung Rokhmin itu, jaksa mempertanyakan jika pengeluaran itu ada kaitannya dengan tugas DKP, kenapa tidak diberikan melalui Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Rokhmin dituntut enam tahun penjara. Jaksa juga membantah pembelaan pengacara Rokhmin yang menyatakan bahwa penggunaan dana nonbujeter merupakan kebijakan terdakwa sebagai seorang menteri. Menurut jaksa dana nonbujeter tidak memenuhi syarat dalam pengambilan kebijakan.

Sementara itu, masih berkaitan dengan kasus Rokhmin Dahuri, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengakui menerima dana sebesar Rp 15 juta dari mantan menteri DKP itu. Dilaporkan *Republika*, 12 Juli 2007, Ketua Umum AJI Nasional, Heru Hendratmoko menyatakan bahwa dana itu merupakan sumbangan untuk peringatan HUT ke-10 AJI tahun 2004. Meski tak pernah disebut menerima dana nonbujeter DKP, AJI memilih segera mengembalikan dana itu ke negara, dengan memasukkan nominal yang sama ke rekening Departemen Sosial.

Saat ini AJI sedang mengkaji sanksi yang akan diberikan kepada anggota panitia yang menjadi perantara penerima dana itu. AJI tidak akan membuka identitasnya dan tanggung jawab sepenuhnya diambil alih AJI. ■ RH

Suryadharma Ali

Bangkitkan Koperasi

Selama tiga tahun terakhir, 2005-2007, koperasi di Indonesia berhasil memainkan peran signifikannya dalam memberdayakan ekonomi rakyat, baik di pedesaan maupun di perkotaan.



Koperasi di Indonesia mulai mengakar, dan telah menjadi sandaran hidup masyarakat kecil. Mereka, sebanyak 28 juta orang, bergabung di 133 ribu koperasi yang tersebar di berbagai kegiatan sektor ekonomi di seluruh pelosok.

Sebagai badan usaha ekonomi rakyat, koperasi mampu menyediakan fasilitas pembiayaan, melayani kebutuhan barang konsumsi dengan harga terjangkau, memasarkan produk-produk para anggota, serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Koperasi Simpan Pinjam (KSP), misalnya, yang jumlahnya sudah 36 ribu unit, bermetamorfosa menjadi lembaga keuangan mikro non-bank, yang mampu memberikan permodalan kepada kelompok usaha kecil dan menengah di pedesaan, bahkan ada yang tanpa agunan.

Membangkitkan koperasi Indonesia adalah gagasan utama Suryadharma Ali, yang memangku jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM sejak Oktober 2004. Gagasan diimplementasikan dengan

menggelontorkan alokasi anggaran hingga Rp 3,6 triliun selama 2005-2007, untuk program pemberdayaan koperasi dan UKM. Sebagai pembangkit soko guru perekonomian rakyat, politisi yang kini menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini bertekad kuat untuk melahirkan setidaknya 70 ribu koperasi berkualitas di seluruh Tanah Air.

Lahir di Jakarta 19 September 1956, mantan Ketua Umum PMII ini pernah menjadi pengurus di berbagai organisasi ritel. Selama 1985-1999 ia bekerja di PT Hero Supermarket Tbk, terakhir menjabat sebagai Deputy Direktur, sebelum akhirnya terjun sebagai politisi *fulltimer* sejak 1999. Ayah empat orang anak ini menyelesaikan pendidikan S-1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1977-1984).

Sebagai pekerja keras namun tak mau banyak bicara, Suryadharma Ali mengemas peringatan Hari Koperasi ke-60 yang jatuh pada 12 Juli 2007 secara apik, sederhana, namun penuh makna. Dipusatkan di Kompleks Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Badung, Bali, dihadiri 7.000 anggota dan

pengurus koperasi dari seluruh Indonesia, serta perwakilan anggota Aliansi Koperasi Internasional (ICA) dari 42 negara, Suryadharma bersama jajaran perkoperasian nasional memperoleh wejangan yang sangat berharga dari Kepala Negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (12/7) itu mengatakan, bangsa Indonesia tetap memilih ideologi yang menguntungkan bagi seluruh rakyat, yakni ideologi ekonomi terbuka yang mampu memaknai kerja sama dan kemitraan yang bermanfaat bagi bangsa.

"Ini bukan hanya sekadar harapan. Tetapi, ini adalah hasrat dan tekad yang kuat dari kebersamaan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera," kata Suryadharma Ali. ■ HT

Zaenal Ma'arif

Lakukan Upaya Terakhir

Apabila pendekatan kekuasaan yang berlaku, maka pada masa reses ini pergantian antar waktu (PAW) hampir pasti terjadi atas diri Zaenal Ma'arif, Wakil Ketua DPR RI asal Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR). Itu sebab, politisi asal Surakarta ini sudah berpamitan kepada para anggota DPR pada sidang paripurna lalu.

Namun apabila masih ada kesadaran hukum pada semua pihak, PAW bisa-bisa tak terjadi. Itulah sebab Zaenal Ma'arif masih berusaha melakukan upaya terakhir, dengan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar Presiden tak memproses PAW yang sudah melewati meja Sekjen KPU, Ketua DPR Agung Laksono, dan kini sudah tiba di Istana Negara.

Dalam suratnya Zaenal meminta Presiden agar mengabaikan permohonan PAW

dirinya. Alasannya, untuk menghormati konstitusi serta proses hukum yang saat ini sedang berjalan. "Saya mencoba mengingatkan Presiden tentang persoalan hukum yang masih berjalan di pengadilan," ucap Zaenal, yang menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Kamis (12/7).

Kisah pencopotan Zaenal sebagai anggota DPR bermula dari keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBR, di bawah kepemimpinan Bursah Zarnubi, yang menarik Zaenal sebagai Wakil Ketua DPR pada akhir Desember 2006. Namun Zaenal bereaksi keras dengan menolak, bahkan mengancam hingga merealisasikan pendirian partai tandingan. Zaenal lantas klaim sebagai ketua umum baru, setelah mendirikan Kantor Pusat PBR di Tebet, Jakarta Selatan. Iapun lantas

menerima sanksi yang lebih berat, pada 8 Januari 2007 namanya ditarik sebagai anggota DPR.

Pimpinan DPR sempat terpecah menanggapi kasus Zaenal. Sebab pencopotan Zaenal bisa berpotensi terjadi kokok ulang pimpinan DPR. Tetapi lewat sepuuk surat tertanggal 31 Mei 2007, Agung akhirnya meneruskan permohonan PAW ke KPU kendati tiga orang wakilnya menolak. Zaenalpun pada tanggal 6 Juni 2007 menulis surat bernada rahasia kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditandatangani bersama Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno (PDI Perjuangan) dan Muhaimin Iskandar (PKB), untuk mementahkan surat Agung.

"Pak Agung tidak bisa melangkah sendiri, sesuai tata tertib pimpinan itu



kolektif jadi tidak bisa tanpa rapat pimpinan surat *recalling* dari Bursah diserahkan ke KPU," kata Zaenal. Mereka bertiga beralasan, surat yang dikeluarkan Agung belum kesepakatan pimpinan DPR. "DPR harus satu suara dulu, baru bisa diproses KPU," tambah Mbah Tardjo.

Tetapi proses PAW tetap saja berjalan. Maka, kini, SBY menjadi satu-satunya nama penyelamat akhir karir penulis buku biografi politik, bertajuk "Sang Pendobrak Dari Kalitan", ini di DPR. ■ HT



foto: berindo wilson

Mewujudkan Purwakarta yang aman, damai, demokratis maju dan sejahtera.

Purwakarta 176 Tahun

Tampilkan Sosok Otda yang Ideal

Peringatan Hari Jadi Purwakarta merupakan momentum penting dalam menggalang dan menumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan dalam pembangunan.

Kabupaten Purwakarta tanggal 20 Juli 2007 merayakan hari jadi ke-176. Berdasarkan penelitian, sejarah kelahiran Purwakarta ditemukan dalam buku karya sejarawan dan arsiparis Dr. Frederick de Hann tahun 1912, buku karya G de Seriere tahun 1849 serta Resoluitien van den Gouverneur Generaal and interim van Nederlandsch Indie in Rade, Batavia den 14 den Maart 1835 No.5.

Surat keputusan van den Krawang G de Seriere, Sindangkasih, 20 Juli 1831 No. 2, menyatakan: Melihat asisten resident Krawang No. 40 hari ini, adanya keinginan kepala pribumi di wilayah ini yang mengusulkan perubahan nama ibukota sekarang ini menjadi Purwakarta. Memahami dan menyetujui, menempatkan bahwa ibukota afdeeling Karawang akan diberi nama Purwakarta. Adapun kata **Purwa** berarti permulaan dan **Karta** bermakna ramai atau hidup. Purwakarta dinyatakan resmi sebagai Ibukota Kabupaten pada tanggal 20 Juli 1831.

Di era kemerdekaan, Purwakarta berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten Karawang sampai tahun 1949. Selanjutnya, berdasarkan SK Wali Negeri Pasundan Nomor 12 tanggal 29 Januari 1949, Kabupaten Karawang dipecah dua. Karawang Timur menjadi Kabupaten Purwakarta, ibukotanya di Subang, dan Karawang Barat menjadi Kabupaten Karawang. Wilayah administratifnya meliputi eks Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Tahun 1968, daerah ini dibagi dua menjadi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Wilayah administratifnya, eks wilayah Kewedanaan Purwakarta, ditambah masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Empat kecamatan; Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka meliputi 70 desa.

Setelah ditata ulang, Kabupaten Purwakarta mencakup 11 Kecamatan, 9 Kelurahan, 183 Desa dan 8 Kemantren. Setelah Otonomi Daerah 1 Januari 2001, terjadi restrukturisasi Pemerintah Kabu-

paten, mencakup 17 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 183 Desa.

Hari kelahiran Purwakarta ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah No.2/Tahun 2006, tentang Hari Jadi Purwakarta. Penetapan dalam bentuk Perda ini menjadi landasan yuridis formal. Peringatan Hari Jadi Purwakarta menjadi momentum penting dalam menggalang dan menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan kebersamaan dalam pembangunan.

Kabupaten yang memiliki luas 971,72 kilometer persegi ini, terletak pada posisi strategis perlintasan antara Jakarta-Bandung-Cirebon. Bagian Barat dan wilayah Utara berbatasan Kabupaten Karawang, bagian Utara dan sebagian wilayah Timur berbatasan Kabupaten Subang. Bagian Selatan berbatasan Kabupaten Bandung, dan bagian Barat Daya berbatasan Kabupaten Cianjur. Ditunjang jalan tol Jakarta-Cikampek dan Cikampek-Purwakarta-Cipularang tembus ke Bandung, posisi kabupaten ini potensial bagi pengembangan sektor industri, perdagangan, jasa dan pemukiman.

Purwakarta yang berjarak 75 km dari Jakarta, memiliki infrastruktur lengkap seperti kawasan industri 2.000 Ha dan Zona industri 3.000 Ha. Di wilayah ini terdapat Waduk Cirata, Waduk serbaguna Jatiluhur yang merupakan sentra pemasok listrik, air baku, air irigasi dan rekreasi.

Mengayomi Masyarakat

Bupati Purwakarta Drs H. Lily Hambali Hasan M.Si bersama wakilnya, H. Dedi Mulyadi SH, sejak menjabat pada April 2003 selalu mengayomi semua lapisan masyarakat dan partai politik yang ada di daerahnya yang berpenduduk lebih dari 750.000 jiwa. Lily berupaya semaksimal mungkin mewujudkan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang, agama, kelompok dan golongan.

Di bawah kepemimpinannya, kabupaten ini mampu mengimplementasikan Otonomi Daerah (Otda) secara lebih tepat. Yakni mengakselerasi pembangunan dengan semangat kemandirian dan otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam memajukan kabupaten yang dipimpinnya, Bupati Lily Hambali juga memiliki visi yang sangat mulia, yakni terwujudnya masyarakat Purwakarta yang aman, damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Berlandaskan iman dan taqwa menuju wibawa karta raharja. Visi itu dijabarkan dalam tujuh misi yaitu dalam bidang hukum dan keamanan, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, lingkungan hidup, serta agama. ■ **BND, SP**

DENGAN PANCASILA

KITA JAGA KEBHINEKAAN

Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh elemen anak bangsa diyakini Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, H. Rudy Harsa Tanaya, bisa meredam **keresahan-keresahan konflik SARA di beberapa daerah.** Sebagai dasar

falsafah negara, Pancasila mencita-citakan terwujudnya kemerdekaan individu dan keadilan sosial, berlandaskan persamaan derajat, kebersamaan serta anti terhadap eksploitasi manusia.



Rudy Harsa Tanaya, memiliki daya magnet yang kuat sebagai daya tawar politik. Bahkan dalam memori politik empat tahun yang lalu, di tengah hiruk pikuk gendang Pilkada Jabar 2003, hampir semua elit tahu, Rudy yang tampil berpasangan dengan Mayjen TNI Tayo Tarma di sebagai Cagub-Cawagub, berposisi sebagai pesaing kuat bagi lawan-lawan politiknya. Walau di akhir penghitungan suara, kalah tipis dengan pasangan Dany-Numan setelah berada duduk di puncak kualifikasi dua besar pasangan calon.

Rudy, putera terbaik Jawa Barat ini, dikenal bersih oleh banyak kalangan Ormas, Orsospol, maupun masyarakat keagamaan di Jawa Barat. Bagi yang mengenalinya secara dekat, kehidupan pucuk pimpinan partai "Wong Cilik Jabar" ini iramanya jauh dari kemegahan. Penampilannya yang sederhana melengkapi keberadaannya.

Kesederhanaan terlihat dari tata ruang rumahnya. Saat *Berita Indonesia* berandang, sejauh mata memandang, tak terlintas kesan *wah* layaknya rumah seorang pejabat yang berdiam di kawasan elit. Almari *kriya koleksi* di ruang tamu rumah Rudy banyak diisi buku-buku politik, budaya dan agama. Empat lukisan kaligrafi yang digantung di dinding rumah Wakil Ketua I DPRD Jabar ini, menguatkan kesan bahwa dia seorang pemimpin yang religius dan humanis.

Uniknya lagi, Rudy berkiprah di panggung politik mirip pemimpin yang lahir dari sebuah pergerakan. Karena memang dia lahir dari idealisme kerakyatan yang diperjuangkannya. Pengagung falsafah budaya *silih asah, silih asih, silih asuh*, ini sejak lama mengagumi sosok Bung Karno.

Itulah sebabnya, wawasan nasionalisme dan kebangsaan serta kerakyatannya cu-

kup mendalam. Dengan pendalamannya itu, Rudy menyadari, masyarakat hendaknya tidak terjebak oleh hal-hal yang bisa memicu timbulnya disintegrasi bangsa karena persoalan-persoalan daerah.

Apalagi ujarinya di dalam situasi Indonesia yang sampai saat ini masih labil dan rawan akan ancaman disintegrasi bangsa, seyogyanya kita semua merenungkan kembali arti hakiki Pancasila. Menangkap intisari nilai-nilainya kemudian mengamalkannya ke dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, bahaya disintegrasi bisa dihindarkan.

Menurutnya, alangkah indahnyanya bila kita semua menyadari akan perlunya toleransi dan hidup berdampingan secara damai antar sesama umat beragama. Hidup rukun sesama suku bangsa dan etnik, kemudian membangun kesadaran akan perlunya supremasi hukum dan HAM serta keadilan sosial. Bukan menu-ruti racun kebencian antar sesama umat beragama dan atau etnik. Kerena hakikat Pancasila adalah persatuan dan kesatuan di atas segalanya.

Dikatakannya, Pancasila merupakan sumber tuntunan hidup yang paling substansial dan bersifat universal. Logika penggaliannya digambarkan Bung Karno sebagai kristalisasi tabiat hidup bersama dari rakyat Indonesia.

Kaitannya dengan kesejahteraan dan keadilan sosial, dapat kita dalam pemikiran Soekarno yang sangat konsisten dengan ide kemerdekaan sebagai jembatan emas yang disampaikannya 72 hari sebelum proklamasi Indonesia berkibar, yaitu 1 Juni 1945.

Hari ini, tandas Rudy, dengan adanya semangat Pancasila, kita semua perlu menghayati, meresapkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara lengkap dan utuh. Terlebih di era reformasi sekarang ini, sangatlah penting untuk dilakukan kembali perencanaan ulang Pancasila demi pemaknaan yang lebih substansial untuk implementasi yang lebih konkrit dan kontekstual.

Sementara itu, pada masa Orde Baru, perjalanan Pancasila direduksi pemaknaannya sebagai perangkat legitimasi ideologis praktik kekuasaan. Pancasila dijadikan alat pembenaran politik dominasi melalui praktik politik represif dan penyeragaman stabilitas dan berlangsung kurang lebih 30 tahun. Pada masa itu, kata Rudy, bisa dikatakan satu generasi telah dibesarkan dalam pemikiran ideologis yang diperpermiskin dan tidak lengkap.

Lantas puncaknya kemudian, kata Rudy, dengan diperlakukannya Pancasila sebagai azas tunggal yang dalam prakteknya itu 'memaksa' setiap organ politik untuk mendasarkan operasionalnya pada

Pancasila tafsir Orde Baru, walau sekalipun versi tafsir yang lain lebih otentik, berakibat pada penekanan politik dan hukum. Dalam pragmatasi ini, ujar Rudy, Pancasila dijadikan sebagai "alat pukul politik".

Bagi PDI Perjuangan yang pernah dipinggirkan selama Orde Baru, menjadikan pelopor dan lokomotif pemurnian Pancasila adalah tugas yang maha penting. Sebagai salah satu partai terbesar di republik ini, PDI Perjuangan dan seluruh kepemimpinan hendaknya dapat memfasilitasi

sinis menuding sebagai *Jargon Romantis Orde Lama*. Karena itu, ucap Rudy, setiap kader PDI Perjuangan hendaknya berusaha menepis tuduhan itu.

Rudy mengatakan, PDI Perjuangan Jawa Barat melalui peran dan kinerja setiap jenjang kepemimpinan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan politik dan akhirnya *vote* sebagai ukuran yang konkrit bagi kekuatan politik dalam rangka menyongsong banyak pemilihan di daerah. Selain itu, mampu pula membuat partai semakin kuat dalam rangka memenangkan Pemilu Legislatif 2009 termasuk menghadapi Pilkada Jabar 2008.

Defacto

Pesta demokrasi masyarakat Jawa Barat baru akan dimulai tahun depan, namun nuansa politiknya sudah mulai bergejolak. Konon katanya, level pusat bakal ramai turun ke daerah. Sebagai pemimpin, Rudy dan partainya ingin memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa disuguhkan bagi masyarakat Jawa Barat. Namun untuk mencapai cita-cita itu, mau tidak mau harus ditempuh melalui jalur kekuasaan.

Sebenarnya PDI-P dengan jumlah potensi 20 kursi dari total 100 kursi di DPRD Jabar, penunjukan Rudy sudah lebih dari cukup untuk bisa melampaui 15% ketentuan syarat undang-undang demi mengantarkan kader terbaiknya maju sebagai kandidat Pilkada. Secara *defacto*, Rudy berpeluang besar untuk tampil sebagai kandidat.

Terbukti, dari 25 cabang partai moncong putih ini pada Rakerda II PDI Perjuangan se-Jabar baru-baru ini di Wisma DPR-RI Griya Sabha Bogor, menginginkan Rudy Harsa Tanaya tampil kembali untuk maju sebagai Cagub atau Cawagub. Dikuatkan lagi secara bulat melalui Rakercab oleh masing-masing cabang. Kelanjutannya malah dipastikan akan mendapat apresiasi dari Ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Rudy yang dicalonkan partainya berpesan, apapun hasil Rakercab mesti dapat dilanjutkan sebagai yang terbaik bagi Pilkada. Lalu disosialisasikan DPP ke seluruh pelosok Jawa Barat mulai Ciamis sampai Depok.

Dengan harapan itu, tukas Rudy, satu atau dua bulan kemudian kita dapat mendengar lebih jauh seperti apa respon masyarakat terhadap figur terbaik pilkada untuk dapat dikukuhkan dalam Rakerdasus, September mendatang.

Pilkada langsung diharapkan tidak berbuah konflik. Suasana aman, tertib, lancar dan berkualitas menjadi harapan semua pihak. Optimismenya harus dibangun dengan meyakinkan Pilkada Jabar 2008 akan mendapat dukungan budaya setempat yang lebih toleran dan akomodatif. ■ **AW / DH / MLP**



BIODATA

- Nama** : H. Rudy Harsa Tanaya
- Alamat** : Jl. Sri Ayu No. 3, Srimahi-Bandung
- Agama** : Islam
- Lahir** : Bogor 20 Agustus 1950
- Pendidikan** : D 3 Bidang Percetakan
- Anak** : 4 orang
- Karier** :
 - » Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Barat 2005-2010.
 - » Ketua Paguyuban Petani Cianjur Selatan 2006-2008
 - » Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat 2005-2010
 - » Wakil Ketua I DPRD Jawa Barat 2005-2009

setiap kader partai untuk semakin menjiwai ideologi Pancasila.

Apalagi di masa demokrasi multi partai seperti sekarang ini, PDI Perjuangan harus mampu mengembangkan kultur *Gotong Royong* ke seluruh program demi membangun kekuatan politik rakyat. Walau tentang *Gotong Royong* ini, sambung Rudy, ada sementara pihak yang

Kabupaten Kuteng Ditentang



Pemda Kukar perlu segera membenahi pembagian "kue" hasil SDA.

Deklarasi pembentukan Kabupaten Kutai Tengah sebagai pecahan dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat reaksi keras. Enam kecamatan di wilayah hulu sungai Mahakam bertekad tetap bergabung dengan Kukar.

Kinginan sekelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan mendeklarasikan pembentukan Kabupaten Kutai Tengah (Kuteng), mendapat reaksi keras. Sejumlah elemen masyarakat yang mewakili enam Kecamatan di wilayah hulu sungai Mahakam,

yang merupakan wilayah Kabupaten Kukar, mendatangi gedung DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasinya.

Mereka yang menolak pembentukan Kabupaten Kuteng itu berasal dari Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Tabang, Kembang Janggut, dan Bangun Kota. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Yusuf AS didampingi 7

anggota dewan lainnya. Dalam pertemuan itu mereka menyatakan bahwa apa yang dideklarasikan di Kecamatan Kota Bangun tanggal 30 Juni 2007 lalu, sangat bertentangan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Juru bicara dari Kecamatan Muara Muntai, Husni Anwar menegaskan, 13 Kepala Desa, 13 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta 13 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kecamatannya menolak pemecahan Kab.Kukar. Dia mendesak DPRD Kukar agar tidak memberikan rekomendasi terhadap upaya pembentukan Kabupaten Kuteng.

Alasan penolakan itu karena saat ini masyarakat di kecamatan Muara Muntai telah merasakan manfaat dari program Pemerintah Kab. Kukar melalui program Gerbang Dayaku tahap II. "Jadi tidak ada alasan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara guna membentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Kutai Tengah," tegasnya.

Juru bicara dari Kecamatan Kenohan, M Thamrin juga menolak deklarasi itu dan tidak akan bergabung dengan Kuteng. Hal senada disampaikan

perwakilan masyarakat Kecamatan Kembang Janggut dengan juru bicara Hasan Sanusi. Menurutnya, 11 Kepala Desa, 11 BPD, 11 LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda bersepakat tetap mendukung program Gerbang Dayaku karena telah dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Menanggapi harapan itu, Yusuf AS menyatakan, akan meneruskannya kepada Pemerintah Kab.Kukar serta pihak terkait lainnya.

Alasan penolakan yang disampaikan itu mencakup aspek SDA, SDM yang belum bisa dandalkan. Aspek historis juga tak kalah pentingnya, karena sejumlah kecamatan di Hulu Sungai Mahakam tidak dapat dipisahkan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Ketidakterataan hasil SDA yang ditengarai sebagai pemicu tuntutan pemekaran itu, menurut para pengamat harus diatasi dengan membenahi pembagian "kue" hasil SDA untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan. ■ SB, SP

GPSI Dipimpin Putera Daerah

Musyawarah Daerah (Musda) ke IX, yang berlangsung selama tiga hari di Aula Gereja GPSI (Gereja Pantekosta Serikat Indonesia) Maranatha I Nunukan, Kalimantan Timur, Rabu dua pekan lalu dibuka oleh Bupati Nunukan, H Abd Hafid Achmad. Dalam kata sambutannya di Gedung Amalia Nunukan, Hafid Achmad, menyatakan bahwa putera daerah tidak kalah dengan para pendatang di bumi Borneo. "Anak-anak kami sering tidak diberi kesempatan, sehingga ada kesan bahwa putera daerah belum ada yang bisa memimpin. Padahal, tidak sedikit putera kami yang menyandang gelar pasca sarjana. Saya tidak bermaksud mencampuri Musda ini, kecuali mengungkap kenyataan," kata Hafid Achmad terus terang. Dalam Musda ini santer terdengar nama Pendeta Daud A Nainggolan, Dip.Th yang akan memegang tongkat pengembalaan kedua kalinya untuk masa bakti 2007-2012. Ternyata, Gembala Sidang Jemaat GPSI Bontang, Kalimantan Timur ini mengundurkan diri meski lima dari sembilan wilayah

mencalonkannya. Sementara, Pdt Yulius Supaat, M. Min.yang dicoba dipinang beberapa wilayah, terbentur dengan ketentuan, karena Gembala Sidang Jemaat GPSI Bukit Zaitun Balikpapan ini sudah pernah dua kali memangku Ketua Umum GPSI Se Indonesia. Pdt Dekky Pinontoan, 63 tahun, meski ada wilayah yang mencalonkannya, Gembala Sidang Jemaat GPSI Tenggarong, Kutai Kartanegara ini menolak dengan alasan usia. Dari lima calon, Pdt Yunus Herry Garong, terpilih sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2007-2012. Sementara Pdt Muda Jeffry H Pinontoan, S.Th dan Pdt Muda Samson Kurniadi, S.Th terpilih sebagai Ketua I dan II - sedangkan Pdt Anwar Suhendra, S.Th, M.Th ditunjuk sebagai Sekretaris. Ada yang menarik dan patut disyukuri, dalam kepemimpinan GPSI Daerah Kalimantan kali ini, Yunus Herry Garong dan Anwar Suhendra, merupakan putera asli Dayak Kalimantan dari Kutai Barat. Demikian juga dengan Jeffry H Pinontoan, lahir di Tenggarong, Kutai Kartanegara dan Samson Kurniadi, lahir di



foto: agustinus/pantia musda

Nunukan. Tongkat pengembalaan yang kini dipegang Pdt Yunus Herry Garong yang juga Gembala Sidang GPSI Jemaat Getsemiani di Jengan Danum, Sendawar Kutai Barat diharapkan mampu menjawab tantangan dunia terhadap pertumbuhan iman kristiani, khususnya jemaat GPSI di Kalimantan yang kini memiliki jemaat kurang lebih 12.000 jiwa. ■ SLP, MLP



foto: gsmarena.com

Buat yang Berkantong Tebal

Segmen pasar mobile broadband masih sangat terbatas. Hanya mereka yang berkantong tebal, pebisnis, orang-orang yang menyukai teknologi dan anak-anak muda yang internet minded yang antusias dengan kehadiran teknologi HSDPA.

Sejak akhir April lalu, salah satu operator seluler meluncurkan produknya yang sudah memanfaatkan teknologi 3,5G atau biasa disebut juga HSDPA (*high speed downlink packet access*). Operator lain yang masih mengandalkan teknologi 3G seakan 'kalah' dengan gencarnya promosi yang dilakukan oleh pesaingnya itu. Apalagi pesaing tersebut mendobrak pasar dengan paket *accelerator* yang diklaim bisa meningkatkan kecepatan koneksi hingga 4 kali lipat dari 3,5 G atau 28 kali lipat 3G.

Kalau teknologi 3G atau biasa disebut WCDMA (*wideband code division multiple access*) mampu mengusung data dengan kecepatan 384 kbps (*kilobyte per second*), atau EDGE (*enhanced data for global evolution*) yang cuma sanggup di 150 kbps, kecepatan 3,5G sanggup digeber sampai 3,5 Mbps (*megabyte per second*), hampir 10 kali lipat dari generasi sebelumnya.

Teknologi 3,5G, pada intinya menawarkan berbagai keunggulan dibanding teknologi se-

belumnya. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu: kemampuan akses yang lebih dari kecepatan 3G sehingga tayangan *video call* akan tampak lebih halus; *delay* pada koneksi VoIP lebih kecil; dan akses ke Internet menjadi jauh lebih cepat.

Selain HSDPA, dalam teknologi 3,5G ada teknologi yang disebut sebagai HSUPA (*High-Speed Uplink Packet Access*) yang sering kali disebut teknologi 3,75G, atau bahkan juga

disebut sebagai teknologi 4G. Teknologi HSUPA memang belum digunakan dalam sistem jaringan operator seluler, tetapi perbedaan yang cukup signifikan akan terasa ketika pengguna layanan 3G secara keseluruhan bermain dengan data-data dalam ukuran besar di atas 1 MB. Perbedaan antara HSDPA dan HSUPA terletak pada kecepatan downlink dengan kecepatan maksimum total mencapai 3,5 Mbps, dan kecepatan uplink yang total mencapai 7,2 Mbps.

Generasi teknologi yang diusung oleh para operator seluler ini bisa sama, namun mereka mempunyai pendekatan tarif yang berbeda. Tarif termurah yang bisa ditemui di pasaran yang ditawarkan oleh

salah satu operator seluler adalah Rp 1/KB sedangkan tarif untuk koneksi berdasarkan *time-based* Rp 100/menit. Tarif ini lebih murah daripada tarif yang ditawarkan Telkomnet Instan. Sedangkan operator seluler lainnya, menawarkan tarif yang bervariasi. Untuk tarif *time-based* ada yang menawarkan tarif Rp 160/menit, Rp 175/menit, dan Rp 350/menit. Sedangkan tarif berdasarkan ukuran data yang didownload, ada yang menawarkan Rp 99.000 dan Rp 130.000 untuk 1 GB.

Melihat masih besarnya kemungkinan tarif-tarif yang ditawarkan oleh para operator seluler berfluktuasi ditambah lagi dengan masih mahalannya ponsel yang sudah mendukung teknologi 3G ke atas, segmen pasar *mobile broadband* ini masih sangat terbatas. Hanya bagi mereka yang berkantong tebal, pebisnis, orang-orang yang menyukai teknologi dan anak-anak muda yang *internet minded* yang antusias dengan kehadiran teknologi HSDPA ini. Sebab memenuhi kebutuhan (keinginan) untuk bisa ber-kirim e-mail, *browsing* internet, mengunduh data ratusan *megabyte*, melakukan transaksi perbankan, menonton televisi, atau video call tidak bisa ditawarkan lagi. Selebihnya, cuma bisa puas memanfaatkan teknologi 2G seperti GPRS. ■ MLP

Pengguna Domain .id Wajib Daftar Ulang

Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi), pengelola domain .id yang baru, resmi beroperasi awal Juli 2007. Pandi yang beralamat pandi.or.id ini telah menetapkan semua nama domain yang terdaftar sebelum 1 Juli 2007 harus diper-

ikuti aturan baru. Sebut adalah di-ya tahunan untuk main berakhir nama domain .id kenai biaya pendomain berakhir- dan .web.id diberikan masa tenggat hingga 31 Agustus 2007 untuk beralih ke aturan baru. Sedangkan domain .sch.id, .ac.id dan .or.id sampai 30 September 2007 dan domain .go.id dan .mil.id sampai 28 Februari 2008. Pengalihan itu bisa dilakukan dengan membayarkan biaya satu tahun domain terkait. ■



baru untuk meng-Aturan baru terkenakannya biase-mua nama do-id. Sebelumnya, tertentu hanya di-daftar. Untuk an .co.id, .net.id, dan .web.id diberikan masa tenggat hingga 31 Agustus 2007 untuk beralih ke aturan baru. Sedangkan domain .sch.id, .ac.id dan .or.id sampai 30 September 2007 dan domain .go.id dan .mil.id sampai 28 Februari 2008. Pengalihan itu bisa dilakukan dengan membayarkan biaya satu tahun domain terkait. ■

Keajaiban Dunia yang Terlupakan

Hajatan dunia dalam memilih Tujuh Keajaiban Dunia yang Baru (The New 7 Wonders) membuka fakta baru. Candi Borobudur yang selama ini kita kenal rupanya hanya tercatat sebagai The Forgotten Wonders.

Berita tentang Tujuh Keajaiban Dunia yang Baru (New 7 Wonders/N7W) yang diumumkan awal Juli lalu menghiasi lembaran halaman semua surat kabar dan majalah terbitan ibukota. Sebagian lebih menyoroti sikap UNESCO yang tidak mengakui daftar yang dirilis lewat hasil poling internet itu. Menurut UNESCO, pemilihan itu hanya cerminan opini mereka yang memiliki akses Internet, bukan opini seluruh warga dunia. Pasalnya, banyak masyarakat dunia belum terhubung dengan saluran internet dengan baik. Sedangkan sebagian lagi, menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak jeli memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan kekayaan pariwisatanya khususnya Candi Borobudur yang sejak 1991 masuk dalam daftar resmi UNESCO sebagai salah satu warisan dunia (*world heritage*) yang harus dilestarikan.

Harian Suara Merdeka, Sinar Harapan dan Suara Pembaruan misalnya. Dalam laporannya menulis, meski Tu-

juh Keajaiban Dunia baru yang ditentukan lewat poling di bawah sponsor kurator museum Bernard Weber itu, tidak diakui oleh UNESCO, tetapi dari sisi promosi global hal itu diperkirakan memberi pengaruh besar dalam upaya menjangkau kedatangan wisatawan mancanegara ke situs-situs yang terpilih.

Cara berpikir inilah yang dimiliki oleh negara-negara besar lainnya. Agar terpilih menjadi pemenang, India menggunakan artis Bollywood untuk mempromosikan Taj Mahal. Presiden Brasil bahkan meluncurkan kampanye agar rakyatnya memilih Patung Yesus Kristus. Untuk itu, ia memberikan rakyatnya layanan sms gratis. Langkah-langkah strategis tadi terbukti ampuh mendongkrak perolehan suara bagi Taj Mahal dan Patung Yesus Kristus. "Itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah RI. Jangankan berpromosi bagi-bagi layanan sms gratis, memberikan informasi saja tidak," tulis Suara Pembaruan (12/7).

Namun di sisi lain, status

Candi Borobudur yang sejak dulu dikatakan termasuk dalam daftar tujuh keajaiban dunia dalam buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah sudah saatnya patut dipertanyakan. Sebab kenyataannya, sejak dulu pula, Candi Borobudur memang tidak dikenal sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia pada literatur internasional. Borobudur malah ditempatkan sebagai keajaiban yang terlupakan "The Forgotten Wonders". Peninggalan yang masuk kategori "yang terlupakan" itu biasanya adalah situs yang kurang dikenal oleh para sejarawan dan arsitek dunia. Informasi ini bisa kita jumpai dalam berbagai situs internet diantaranya situs wonderclub.com atau situs milik Alaa K. Ashmawy profesor teknik sipil University of South Florida.

Gagasan Bernard Weber

Bernard Weber tergerak menggagas Tujuh Keajaiban Dunia yang Baru (New 7 Wonders/N7W) setelah menyaksikan kerusakan patung Buddha di Bamiyan, Afghanistan oleh Taliban pada 2001. Jutawan petualang, pilot sekaligus sutradara film (antara lain Hotel Locarno, 1978), ini lalu memulai kampanye dengan mendirikan dua yayasan, New-OpenWorld dan New7-Wonders. Ia menggelar acara pencarian dana untuk memperbaiki patung Buddha di Bamiyan. Selain bertujuan mengumpulkan dana untuk mempertahankan dan memperbaiki situs-situs bersejarah di seluruh dunia, yayasan ini juga ingin membuat daftar baru sebagai revisi atas daftar



tujuh keajaiban dunia versi masyarakat Yunani kuno yang dianggap sudah kadaluwarsa.

Weber juga menggandeng para sponsor dan mengorganisasikan paket wisata ke tempat-tempat yang dinominasikan. Membuat acara di sana, termasuk menerbangkan ratusan balon udara. Ia menggandeng stasiun televisi dan tak lupa mengajak tokoh dunia untuk menjadi juru promosi. Salah satunya mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. Semenjak tahun 2001 itulah, Weber membentuk panel ahli yang bertugas membuat seleksi kandidat Tujuh Keajaiban Dunia Baru. Dua tahun kemudian, 24 Desember 2005, terpilih 77 kandidat. Untuk masuk kandidat, keajaiban itu harus buatan manusia, selesai sebelum tahun 2000 dan terlindung cukup baik. Hasil pemilihan panel itu memunculkan 21 finalis pada 1 Januari 2006 yang kemudian diadu melalui kontes popularitas lewat poling di internet www.new7wonders.com atau melalui telepon.

Sekitar 100 juta orang mengambil bagian dalam poling tersebut, menghasilkan tujuh situs di tujuh negara yang dianggap sebagai tujuh keajaiban baru dunia. Pengumuman tujuh pemangannya digelar besar-besaran di Stadion Benfica, Lisbon. Karena melibatkan nyaris seluruh dunia, program itu juga ditayangkan di lebih dari 170 negara dunia dan ditonton oleh



Keajaiban Dunia yang Terlupakan



sekitar 1,6 juta orang.

Tujuh keajaiban dunia yang baru hasil poling itu adalah, pertama, Tembok Besar China yang dibangun dalam dua periode, 220 SM dan 1368-1644 M. Tembok ini merupakan bangunan buatan manusia paling besar, satu-satunya yang terlihat dari angkasa luar. Kedua, Taj Mahal di Agra, India. Mausoleum ini dibuat pada 1630 atas perintah Kaisar Mogul V, Shah Jahan, untuk mengenang istri tercintanya. Ketiga, reruntuhan Petra di Yordania. Kota Petra dilengkapi terowongan dan tangki-tangki air yang baik. Bangunan lainnya yang menarik dalam kompleks Petra adalah stadion teater yang berkapasitas hingga 4.000 orang. Keempat, Colosseum di Roma, Italia. Dibangun tahun 71-82 M, sebagai simbol penghormatan bagi para pejuang sekaligus memperingati kejayaan Kekaisaran Roma. Kelima, patung Kristus

Sang Penebus (Christ the Redeemer) di Rio de Janeiro, Brazil. Didesain oleh Hector da Silva Costa (Brazil) namun dibangun oleh orang Prancis Paul Lanowski selama lima tahun sebelum diresmikan pada 12 Oktober 1931. Keenam, reruntuhan Inca Machu Picchu di Peru. Kompleks kota yang dibangun tahun 1460-1470 ini sempat 'hilang' selama tiga abad dan ditemukan kembali oleh Hiram Bingham pada 1911. Ketujuh, kota Maya kuno, Chichen Itza di Meksiko. Di situ terdapat candi terakhir dan terbesar suku Maya.

Daftar tersebut menjadi delapan dengan Piramid Giza di Mesir. Piramid ini dicabut dari daftar pemungutan suara dan ditetapkan menjadi kandidat kehormatan Tujuh Keajaiban Dunia yang Baru. Pemicunya adalah protes dari Zahi Hawass, Kepala Dewan Tertinggi Kependudukan Mesir, yang meminta agar nama Piramid Giza dicoret

dari kompetisi. "Dunia tahu bahwa bangunan 4.500 tahun itu adalah superkeajaiban. Ia tidak bisa dibandingkan dengan bangunan modern lain, sehebat apa pun itu," katanya.

Asal Mula

Tujuh Keajaiban Dunia Kuno diyakini dibuat oleh sejarawan Yunani Herodotus 2.000 tahun



Weber menggandeng para sponsor, mengorganisasikan paket wisata ke tempat-tempat yang dinominasikan serta menerbangkan ratusan balon udara.

lalu. Piramid Giza satu-satunya dari Tujuh Keajaiban Dunia Kuno yang masih eksis. Enam situs sejarah lain yang termasuk Tujuh Keajaiban Dunia Kuno sudah musnah diantaranya Taman Gantung Babilonia, Candi Artemis (Diana) di Yunani, Patung Dewa Zeus di Olympia Yunani, Mausoleum Harlicarnassus atau makam

gubernur pada zaman Persia di Yunani, Patung Dewa Apollo Colossus of Rhodes atau Patung Dewa Helios Yunani, dan Mercusuar Alexandria. Ke tujuh Keajaiban Dunia Kuno itu hanya berlokasi di sekitar Mediterania karena berdasarkan kisah sejarah era Yunani kuno. Sedangkan tujuh keajaiban dunia baru ini berasal dari tujuh negara.

Selain versi kuno, ada lagi Tujuh Keajaiban Dunia Abad Pertengahan yang populer sekitar abad ke-18-19. Yaitu, Stonehenge di Inggris, Colosseum Roma di Italia, kompleks pemakaman Catacombs of Kom el Shoqafa di Alexandria Mesir, Tembok Besar di Tiongkok, Menara Porselen di Nanjing Tiongkok, Istana Hagia Sophia di Turki dan Menara Miring di Pisa Italia. Setelah itu, ada lagi daftar keajaiban dunia yang lain. Mulai dari Tujuh Keajaiban Dunia Modern versi Masyarakat Teknik Sipil Amerika, Tujuh Keajaiban Lokasi Wisata Dunia versi Hillman Wonders dan Tujuh Keajaiban Alam Dunia versi CNN. Bahkan tahun lalu, November 2006, koran USA Today dan acara televisi Good Morning America mengumumkan daftar Tujuh Keajaiban Dunia yang dipilih enam juri ditambah satu keajaiban yang dipilih pemirsa. Di antaranya adalah bongkahan es di Kutub, Internet dan proses migrasi besar hewan di taman nasional Serengeti dan Masai Mara di Tanzania dan Kenya. ■ MLP



Bernard Weber dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad.

Pakistan Masih Terkoyak



foto: bbc.co.uk

Krisis berdarah selama delapan hari di Masjid Merah sudah berakhir. Namun, kelompok garis keras penentang pemerintah masih terus mengobrak-abrik kedamaian di negeri berpenduduk 160 juta itu.

Kawasan di sekitar Masjid Lal atau Masjid Merah yang merupakan masjid terbesar di Islamabad Pakistan berubah menjadi seperti medan perang awal Juli lalu. Para tentara mengambil posisi di berbagai tempat dengan senapan-senapan mesin menyembul dari gundukan pasir yang menjadi tempat

perlindungan mereka. Lubang-lubang besar menganga di dinding luar masjid. Tentara sengaja meledakkan dinding itu untuk memberikan jalan jika serangan akan dilakukan.

Mobil-mobil lapis baja hilir mudik di sekitar masjid. Empat helikopter bersenjata terbang meraung-raung di atas masjid menebar ketegangan, menimbulkan ketakutan, dan mendo-

rong agar orang-orang dalam masjid menyerahkan diri. Sedidaknya ada ratusan orang termasuk perempuan dan anak-anak tersandera di dalam masjid. Dengan wajah tegang, sekumpulan siswa dan pendukung Ketua Ulama Masjid Maulana Mohammad Abdul Aziz memanggul senjata AK-47, peluncur roket dan granat. Beberapa di antara mereka me-

ngenakan jaket berisi bom.

Sulit membayangkan suasana Masjid Merah akan berubah mencekam seperti itu. Masjid tertua di Islamabad itu selama puluhan tahun menikmati sokongan dari pemerintah. Namun belakangan, menjadi sumber masalah bagi pemerintah Pakistan yang dipimpin Presiden Pervez Musharraf. Masjid tersebut menjadi basis para militan dari berbagai wilayah di Pakistan. Konflik antara pemerintah dengan para ulama dan pendukungnya di Masjid Merah itu mulai memanas setelah pemerintah Musharraf menentang keras proposal yang diajukan oleh Ketua Ulama Masjid Merah, Maulana Mohammad Abdul Aziz dan wakilnya Abdul Rashid Ghazi yang meminta pemerintah menerapkan Syariat Islam di Islamabad.

Penolakan pemerintah ini membuat para siswa Masjid Merah bersama dengan Madrasah Jamia Hafsa - sekolah khusus wanita - memulai anarkisme sipil di Islamabad tahun 2007. Mereka melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap pihak-pihak yang dicurigai anti-Islam. Salah satunya adalah kompleks prostitusi milik imigran China. Beberapa pebisnis prostitusi dibunuh dan arealnya dibersihkan dari kemaksiatan. Konflik makin meruncing 6 April lalu, setelah pemimpin Masjid Merah membentuk sebuah pengadilan Islam di masjid berinding warna

Hukuman Mati Bagi "The Benghazi Six"

Mahkamah Agung Libya (11/7) memutuskan hukuman mati bagi Nasya Nenova (41), Kristiana Valcheva, Snezhana Dimitrova (54), Valentina Siropoulo (48), Valya Chervenysheva, para perawat asal Bulgaria, dan Ashraf Djum'a al-Hadjudj, dokter asal Palestina. Para petugas medis di Rumah Sakit Anak El-Fath di Benghazi, Libya yang dijuluki The Benghazi Six itu didakwa dengan sengaja menginfeksi 438 anak yang dirawat di RS itu dengan virus HIV, November 1998. Sebanyak 56 anak di antaranya meninggal. Mereka ditangkap tahun 1998 dan telah dipenjarakan delapan tahun. Bersama mereka ditangkap juga 13 petugas medis lainnya, tetapi kemudian dibebaskan. Pada Mei 2004, pengadilan Benghazi menjatuhkan hukuman mati di depan regu tembak. Kecaman dunia



foto: rti.fr

internasional menyebabkan Mahkamah Agung Libya memerintahkan pengadilan digelar kembali. Pengadilan kedua pada 2006 juga berakhir dengan

hukuman mati. Pengadilan mengesampingkan laporan Profesor Luc Montagnier dan Profesor Vittorio Colizzi, ahli Badan Kesehatan Dunia, bahwa anak-anak itu terinfeksi HIV sejak 1997, sebelum The Benghazi Six datang. Kedua profesor itu menyatakan, buruknya praktik sanitasi di rumah sakit itulah yang memicu penularan virus HIV. Pengadilan menolak bukti-bukti yang mereka paparkan dan tetap menjatuhkan hukuman mati. Orang tua anak-anak itu menuntut hukuman terberat, sekaligus kompensasi sebesar 10 juta dollar AS per anak. Sebagian besar anak-anak itu kini dirawat di rumah sakit di Eropa. ■

Konser Live Earth

Lebih dari 150 pemusik paling populer di dunia tampil dalam konser Live Earth yang digelar di 7 benua termasuk Antartika, 7 Juli lalu. Konser yang digagas mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore ini ditujukan untuk mengajak seluruh penduduk bumi memulihkan bumi yang terancam pemanasan global. Konser yang digelar bergerak dari timur ke barat dan berlangsung selama 24 jam ini dimulai dari Sydney lalu berlanjut ke Tokyo, Johannesburg, Shanghai, Hamburg, New York dan Rio de Janeiro. Di seputar dunia tampil antara lain Kelly Clarkson, Bon Jovi (Giants Stadium, New

EAR
OR A CLIMATE

foto: msn.com



foto: reuters

**“Ekstremisme dan terorisme belum terkikis dan kami kukuh memerangi mereka dari setiap sudut wilayah Pakistan.”
- Musharraf.**

merah yang dibangun pada tahun 1965 itu. Kalangan fundamentalis termasuk Muslim Pakistan lain, yang pada umumnya tergolong moderat juga mengancam Musharraf yang dinilai sangat pro Amerika. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa Musharraf adalah jenderal atas angkatan bersenjata Pakistan yang mengambil kekuasaan menjadi pemimpin negara melalui kudeta, yang dicurigai didanai oleh AS. Konflik memuncak dengan pertumpahan darah di Masjid Merah diawali dari perebutan senjata oleh beberapa siswa masjid dari tangan polisi Pakistan. Sayangnya, banyak perempuan dan anak-anak yang

terjebak di dalam masjid dijadikan sandera oleh para militan. Selama delapan hari, 3-10 Juli, pemerintah berusaha memaksa militan membebaskan mereka. Negosiasi menemui jalan buntu. Meski tentara berhasil menangkap Maulana Mohammad Abdul Aziz (5/7) yang berusaha melarikan diri dengan mengenakan pakaian perempuan atau burqa, saudaranya Abdul Rashid Ghazi, tetap bertahan di dalam masjid dan berharap pengorbanan mereka akan memicu revolusi Islam di Pakistan. Sebelumnya, keduanya sudah didakwa oleh polisi dengan pembunuhan dan terorisme serta merusak harta milik negara dan turut campur dalam urusan negara.

Militer Pakistan akhirnya menyerbu masuk ke Masjid Merah, Selasa (10/7) setelah perundingan menemui jalan buntu. Pemerintah menolak permintaan Ghazi agar ia diberi amnesti dan kepastian keamanan bagi dirinya dan para pengikutnya. Sekitar 50 anggota garis keras dan delapan tentara tewas dalam baku tembak saat penyerbuan dilakukan pada pukul empat

pagi waktu setempat. Sebaliknya, dari serbuan itu, 68 perempuan dan anak-anak bisa diselamatkan.

Dalam penyerbuan itu, Ghazi tewas tertembak dengan dua peluru bersarang di tubuhnya. Setelah membersihkan seluruh ruangan di Masjid Merah, Pemerintah Pakistan menyebutkan bahwa jumlah korban tewas mencapai 108 orang. Jumlah korban itu termasuk 10 tentara dan seorang anggota polisi serta beberapa warga sipil. Pemerintah menyatakan, dari jumlah korban tewas itu,



foto: nytimes.com

Petugas medis menyelamatkan seorang tentara yang terluka saat penyerbuan ke Masjid Merah.

70 di antaranya dinyatakan sebagai aktivis garis keras pengikut Ghazi.

Meredanya krisis berdarah di Masjid Merah tidak memberi jaminan bahwa kekerasan akan berakhir di Pakistan. Sebab seminggu setelah penyerbuan, sedikitnya sudah 73 tentara Pakistan tewas sebagai balasan atas penyerbuan Masjid Merah. Ribuan orang turun ke jalan meneriakkan slogan-slogan anti-Musharraf, anti-AS, dan anti pada siapa saja yang menjadi sahabat AS. Sejumlah ulama radikal dan pemimpin militan juga sudah menyerukan untuk menentang

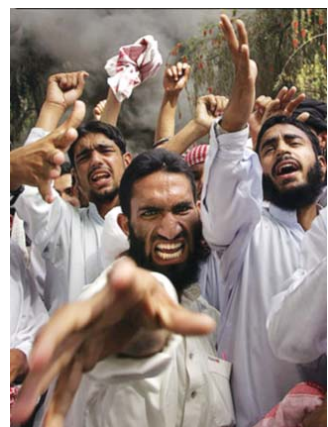


foto: telegraph.co.uk

Para siswa garis keras menyerukan slogan anti Amerika di Masjid Merah, Pakistan.

pemerintahan Musharraf. Di tengah-tengah ketidakstabilan di dalam negeri, muncul pertanyaan tentang bagaimana Musharraf memenuhi janjinya mengatasi para militan yang sudah mengakar di negaranya. Sebab posisinya semakin sulit. Pihak oposisi makin gencar menuntut Musharraf mengundurkan diri. Sebab bagi mereka, delapan tahun pemerintahan Musharraf telah menumbuhkan radikalisme di Pakistan. Mereka juga menyerukan digelarnya pemilu baru di bawah sebuah pemerintahan sementara yang tidak melibatkan Musharraf. Sementara itu, para militan, termasuk Al Qaeda dan Taliban semakin memperluas pengaruhnya di seluruh penjuru negeri. ■ **MLP**

Birth di 7 Benua

BIRTH
IN CRISIS



Jersey, AS), Madonna, Snow Patrol (Wembley Stadium, London, Inggris), Huang Xiao Ming, Sarah Brightman (The Oriental Pearl Tower, Shanghai, China), Angelique Kidjo, UB40 (Coca Cola Dome, Northgate, Johannesburg, Afrika Selatan), Enrique Iglesias, Shakira (HSH Nordbank Arena, Hamburg, Jerman), serta Lenny Kravitz, Jota Quest (Copacabana Beach, Rio de Janeiro, Brasil). Al Gore yang gigit mengkampanyekan isu pemanasan global dan mendapatkan penghargaan Oscar atas filmnya tentang isu tersebut, An Inconvenient Truth, menegaskan, “Kini saat yang tepat untuk mulai memulihkan bumi.” ■

DPR AS Berusaha Akhiri Perang Irak

Dukungan terhadap Bush terkait kebijakan perang Irak terus merosot. Untuk segera mengakhiri perang Irak, DPRAS kembali melakukan pemungutan suara (12/7). Dengan perolehan suara 223-201, DPR AS mengesahkan rancangan undang-undang yang mensyaratkan penarikan sebagian besar pasukan AS dari Irak. Penarikan itu harus dimulai 120 hari mendatang. Seluruh penarikan juga harus sudah selesai 1 April 2008. Agar penarikan pasukan benar terlaksana, RUU itu juga harus disahkan Senat.



foto: southflorida.com

Kemudian DPR dan Senat itu harus menyetujui dua versi RUU, lalu diajukan ke presiden. Pemungutan suara untuk menarik pasukan AS itu sebenarnya pernah dilakukan pada Maret 2007. Bush memveto keputusan DPR yang pertama dan keputusan kedua kemudian gagal karena Senat tidak mendukung penarikan itu. Hasil keputusan yang terakhir itu mensyaratkan pasukan AS tetap bertahan di Irak untuk memberi pelatihan kepada tentara Irak dan tetap menjalankan operasi-operasi melawan terorisme. ■



Bambang Darwoto: Mempersiapkan Angkasa Pura I masuk ke pasar modal.

foto-foto: humas angkasa pura I

penerbangan terjamin keselamatannya. "Proses audit dilakukan hampir satu tahun, terkait dengan adanya penerbangan dari Guam Amerika langsung ke Bali. Penerbangan satu-satunya di Indonesia dan tidak dimiliki bandara lain di Tanah Air," kata Bambang Darwoto yang didampingi Kuntadi Budianto Sekretaris Perusahaan AP I kepada Sam-suri dari *Berita Indonesia*.

"Pesawat *Continental Air-line* dari Guam Amerika tujuan Bali dan kembali ke Guam seminggu dua kali, di mana penumpangnya sebagian besar adalah warga Amerika. Sesuatu yang wajar bila hasil audit TSA sebagai parameter dari pemerintah Amerika," tuturnya.

Keberhasilan Bandara Ngu-

Optimalkan Pelayanan Menuju Persaingan Global

Sebagai salah satu BUMN, PT Angkasa Pura I (AP I) senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai harapan pengguna jasa penerbangan. Untuk menjawab tantangan terkini dan ke depan yang semakin kompetitif, PT AP I terus menerus melakukan langkah-langkah antisipasi.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Bandar Udara dan pelayanan jasa Navigasi Penerbangan, PT Angkasa Pura I (AP I) menempatkan faktor keselamatan dan keamanan pada prioritas utama, di samping mengoptimalkan profit dan pelayanan.

Situasi global memberi semangat baru bagi jajaran AP I untuk lebih aktif melihat semua peluang dan tuntutan perubahan yang lebih maju, di mana perhatian lingkungan dan strategi di era kompetisi dewasa ini semakin berpacu dengan waktu. Maka perhatian terhadap potensi pasar perlu

diperluas dan mendapat perhatian serius.

Perubahan yang selalu berkembang dapat meningkatkan pemahaman dalam menuju perusahaan yang adaptif, responsif dalam mengerahkan kemampuan dan potensi untuk menyesuaikan dan menganalisa dengan baik setiap perubahan yang terjadi dengan memiliki daya saing tinggi.

Terpilihnya Bandara Ngurah Rai Bali yang berada di bawah pengelolaan Angkasa Pura I sebagai bandara terbaik tahun 2007, merupakan salah satu bukti kesiapan perusahaan memasuki kompetisi global. Pertanyaannya, di mana kekuatan dan kelebihan ban-

dara yang terletak di Pulau Dewata itu, sehingga mendapat prestasi puncak, seperti yang diumumkan Dr. Budhi Suyitno Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, beberapa waktu yang lalu, Direktur Utama PT AP I Bambang Darwoto, mengungkapkan, predikat terbaik yang diterima Bandara Ngurah Rai Bali, hasil buah kerja keras dan kerjasama dari seluruh komunitas jajaran AP I Bandara Ngurah Rai Bali. Prestasi itu tidak lepas dari berbagai aspek, terutama komitmen terhadap keselamatan dan keamanan yang mendapat prioritas tertinggi. Perhatian terhadap dua hal itu merupakan standar internasional, terutama pasca kejadian WTC di New York, Amerika Serikat.

Di samping itu, ada syarat yang dipenuhi Bandara Ngurah Rai Bali, di antaranya audit oleh TSA (*Transportation Security Administration*). Melalui hasil audit itu, Amerika Serikat yakin semua lalu lintas

rah Rai mendapat predikat terbaik, bukan berarti berpuas diri bahkan terlena, lalu Bambang mengingatkan, momentum keberhasilan diharapkan semakin memacu semangat untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. "Memberi pelayanan secara maksimal, bukan untuk mengejar predikat terbaik, tapi merupakan komitmen perusahaan kepada pengguna jasa penerbangan. Bila dianggap berhasil dan mendapat penghargaan, semakin memotivasi kami bekerja lebih baik," ungkap mantan Dirut Pelindo III itu lebih jauh.

Maka, kata dia, tidak berlebihan Bandara Ngurah Rai yang memiliki standar ICAO menjadi *benchmark* bagi bandara lain di AP I, baik bandara ukuran kecil, sedang dan besar. Sebagai salah satu Bandara yang memiliki *brand image* dan pemberi keuntungan bagi perusahaan, maka penambahan personil dari 217 orang menjadi 600 orang dan pe-

ningkatan kinerja fasilitas merupakan bagian dari komitmen AP I dalam memberi rasa aman dan nyaman pengguna jasa, di mana setengah dari jumlah penumpang adalah turis mancanegara.

Bandara dengan jumlah penumpang lebih dari 6 juta per tahun ini, secara umum tidak kalah dibanding bandara di negara maju. Sebagai pembandingan, penumpang domestik dan internasional tahun 2007 ini menunjukkan angka *fifty-fifty*. "Akan tetapi, sejak tahun 2005-2006 dampak peristiwa bom Bali satu dan dua, pengaruhnya terhadap pertumbuhan *traffic international* mencapai penurunan lebih dari 50 persen, sebaliknya penumpang domestik terdapat kenaikan yang cukup signifikan," kata Bambang. Kita berharap kondisi di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya semakin kondusif.

Pengembangan

Berbagai kebijakan diterapkan agar dapat menunjang bidang ekonomi dan pembangunan dengan memperkuat kultur perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Maksudnya, kata Bambang, agar perusahaan semakin siap menghadapi kompetisi. Untuk itu diperlukan langkah strategis guna peningkatan persaingan dalam setiap aspek bisnis. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan semakin baik.

Tuntutan hari esok lebih beragam dan cenderung meningkat, maka peningkatan fasilitas di bandara selalu menjadi perhatian perusahaan, misalnya lalu lintas penumpang domestik di Bandara Ngurah Rai Bali perlu dikembangkan sesuai kebutuhan.

Maka untuk itu, kata dia, melalui RTT (Rencana Teknik Terinci) dan sesuai *master plan*, secara bertahap seluruh bandara di bawah Angkasa Pura I akan dibangun dan dikembangkan. "Pembangunan dan pengembangan bandara dilakukan bertahap, itu disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Di mana sebelumnya pembiayaan

atas pembangunan pengembangan bandara dilakukan oleh pemerintah, tapi saat ini hal itu merupakan tugas Angkasa Pura I. Sekarang hampir seluruh dana dikeluarkan oleh perusahaan," ungkapnya.

Sebagai contoh, jelasnya, pembangunan Bandara Makassar dari terminal lama ke terminal baru dengan biaya sekitar Rp 564 miliar, diharapkan selesai bulan Agustus tahun ini. Pembangunan bandara di Lombok Tengah dengan biaya Rp 655 miliar, di mana dana perusahaan mencapai Rp 515 miliar. Berturut-turut juga dilakukan pembangunan, Bandara di Balikpapan, Banjar-

harus dioptimalkan. Termasuk program *Good Corporate Governance* (GCG), sebab apa yang diharapkan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi bagi *stake holders*.

"Peran Angkasa Pura I, sebagai salah satu komponen dalam mempercepat lalu lintas perekonomian nasional, dan sebagai mata rantai perputaran usaha di kebandarudaraan, diharapkan memberi kontribusi dan memacu roda perekonomian, antardaerah, provinsi, dan antarnegara. Dengan menyatukan gerak langkah dan bertransformasi dengan lingkungan persaingan global, itu tujuan kami," kata Bambang. Maka

sasaran yang ingin dicapai. Pertama, pembiayaan pembangunan dan pengembangan bandara. Kedua, mempersiapkan administrasi yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Obsesi kami, tahun depan Angkasa Pura I menjadi bagian dari bursa pasar modal.

Menyinggung pengawasan terhadap penumpang membawa air mineral, Bambang menjelaskan, itu dilakukan sejak bulan April 2007 serentak di seluruh dunia. Seperti bawa parfum lebih dari 100 ml turut diperiksa. Sosialisasi kepada pengguna jasa penerbangan diintensifkan, peme-



Aktivitas: Bandara Ngurah Rai Bali.

masin dan Adi Sucipto Yogyakarta. Di samping itu, perusahaan juga melakukan investasi untuk peningkatan pelayanan navigasi seperti pengadaan Radar yang harganya mencapai ratusan miliar.

Pembangunan bandara, dari sisi bisnis belum memadai tapi dianggap strategis perlu dibangun, semisal Bandara Adisumarmo-Solo, dan Bandara di Lombok Tengah-NTB yang pembangunannya perlu uluran dana pemerintah.

Secara umum menurut Bambang Darwoto, pelayanan perusahaan semakin baik dan terus dipacu lagi agar hasilnya semakin berkembang maju, semua peluang sekecil apa pun

orientasi bisnis dan orientasi publik merupakan sasaran pokok.

Obligasi

Sebagai perusahaan mandiri, Angkasa Pura I tidak terlepas dari keterbatasan dana, ungkap Bambang, terbatasnya dana merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana mencari dana-dana pembangun bandara yang *representative*, di antaranya, merangkul investor dan kerjasama dengan perbankan nasional atau melalui pasar modal dengan penjualan obligasi.

Masuknya Angkasa Pura I ke pasar modal sedang dipersiapkan secara serius. Ada dua

riksaan dilakukan demi keamanan penumpang itu sendiri.

Saat menjawab adanya kelambatan berangkat dan tiba pesawat, lebih jauh Bambang mengatakan, itu tergantung dari *airline* yang mengatur jadwalnya. Di Indonesia penerbangan dilakukan dari satu kota ke kota lain serta penerbangan lanjutan. Bila dari satu bandara terlambat maka di bandara berikutnya akan mengalami kelambatan. Kecenderungan kelambatan bukan akibat di bandara, tapi di *airline* itu sendiri.

Obsesi ke depan adalah semua bandara di AP I, setara dengan standar bandara di Asia Pasifik. ■ **RI**



foto: dok. puskom dephub/paino

Peninjauan: Presiden SBY beserta rombongan saat mendapat penjelasan dari Soemino Eko Saputro, Dirjen Perkeretaapian, tentang pembangunan jalur ganda.

Merevitalisasi Infrastruktur

Peresmian jalur ganda Tanah Abang-Serpong memiliki makna tersendiri. Pembangunan prasarana kereta api serta teknologi yang digunakan merupakan hasil karya bangsa sendiri.

Hal itu diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peresmian pengoperasian jalur rel ganda kereta api Tanah Abang-Serpong di stasiun Serpong-Banten beberapa waktu lalu. Presiden mengajak peran swasta untuk berinvestasi membangun dan mengembangkan infrastruktur kereta api, khususnya dalam menggunakan teknologi dalam negeri.

Presiden mengungkapkan, pembangunan jalur ganda kereta api Serpong-Tanah Abang merupakan upaya pemerintah untuk merevitalisasi infrastruktur perkeretaapian secara nasional. Ini merupakan program pembangunan infrastruktur yang sangat penting. Hal itu sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkeretaapian yang baru disahkan.

Namun, Presiden juga berharap, kereta api dapat meningkatkan pe-

layanan kepada masyarakat, di mana KA sebagai salah satu moda angkutan hemat energi dan ramah lingkungan. "Di samping mengurangi tingkat kemacetan dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh warga kota," kata Presiden, sambil mengharapkan jajaran Departemen Perhubungan membangun infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman mengingat mobilitas penduduk semakin tinggi.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal mengatakan, jalur ganda lintas Tanah Abang-Serpong sepanjang 24,5 Km meningkatkan perjalanan kereta api dari 89 per hari menjadi 179 per hari. Untuk itu disiplin penumpang sangat diperlukan agar tidak naik di atap. "Lintas Tanah Abang-Serpong merupakan proyek percontohan tiket elektronik dan sterilisasi peron. Ini proyek pertama di Indonesia," kata

Jusman

Mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia itu kepada *Berita Indonesia* mengungkapkan, pada akhir tahun 2007 semua kereta api dan kereta rel listrik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ditargetkan sudah memanfaatkan teknologi tiket elektronik. "Hal itu untuk mengurangi jumlah penumpang kereta api yang tidak bertiket. Di sisi lain, pendapatan KA diharapkan semakin meningkat," ungkap Jusman.

Hal senada diungkapkan oleh Soemino Eko Saputro, Dirjen Perkeretaapian. Peresmian jalur ganda ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut yang jauh lebih besar dan semakin mendekati *demand* pengguna jasa kereta api. Kita berharap faktor keselamatan mendapat perhatian utama dari pengguna jasa KA, untuk tidak memaksakan diri naik di atap, jangan terjadi atap gerbong runtuh akibat penumpang naik di atap-atap gerbong.

Pembangunan jalur ganda Tanah Abang-Serpong, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan dan penggunaan kecanggihan teknologi semua produksi dalam negeri. "Kita sangat mendukung kemampuan hasil karya bangsa Indonesia yang tidak kalah dibanding produk negara lain," kata Soemino.

Sebagaimana harapan Presiden tentang penggunaan teknologi dalam negeri, Abraham Mose General Manager Transportation Business unit PT LEN industri menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan pemerintah, khususnya oleh Dirjen Perkeretaapian yang menggunakan produksi dalam negeri, diantaranya persinyalan produk LEN yang digunakan pada jalur ganda Tanah Abang-Serpong.

PT LEN melakukan terapan, baik desain *software* maupun *hardware* sampai pelaksanaan konstruksi rekayasa rancang bangun. Di mana sistem pengaturan lalu lintas kereta api mengacu kepada keselamatan dan keandalan. "Desain didasarkan pada kebutuhan operasional dalam berbagai kondisi di Indonesia," kata Abraham.

Pembangunan jalur ganda dimulai 13 Juli 2006 dan diresmikan 4 Juli 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepat satu tahun kurang 9 hari. Angka 9 memiliki keistimewaan bagi pendiri partai Demokrat itu, lahir tanggal 9 dan bulan 9.

Peresmian jalur ganda lintas Tanah Abang-Serpong selangkah lebih maju dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun jumlah penumpang yang semakin tinggi, merupakan tantangan tersendiri bagi kereta api Indonesia. Maka strategi saat ini maupun ke depan perlu dibuat sebaik-baiknya. ■ RI

Sahabat Para Tentara di Dunia

Bagi Amerika, “senjata musuh”, namun bagi yang lain, “simbol perlawanan”.

The Man with the Golden Gun sudah mati di tiang gantung. Julukan yang diberikan kepada mantan Presiden Irak Saddam Hussein itu, selain menggambarkan gaya kepemimpinannya yang mengandalkan kekuatan militer, juga karena Saddam benar-benar memiliki senjata berlapis emas. Senjata yang disebut Tabuk Rifle - istilah Irak untuk senjata AK-47 - diyakini seharga dua juta dolar AS atau Rp 18 miliar (kurs Rp 9.000 per dolar AS). Amerika sengaja memberikan senjata yang kini disimpan di Australian War Memorial (AWM) di Canberra itu kepada Australia sebagai hadiah atas dukungan mutlak Negeri Kangguru saat invasi Sekutu ke Irak, 2003 silam. Begitu tingginya reputasi senjata AK-47 ini di Irak, para tentara koalisi Irak yang dilatih oleh tentara Amerika menolak dipersenjatai dengan senjata buatan Amerika seperti M-16 dan M-4. Para prajurit Irak ngotot bahwa mereka hanya mau menggunakan senjata buatan Uni Soviet (kini Rusia) Kalashnikov ini.

Tentara Amerika saat perang Vietnam pun lebih suka menggunakan AK-47 meski



AK-47 bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 250.000 manusia di seluruh dunia tiap tahunnya.



mereka sudah memiliki senjata otomatisnya yang canggih M-16. Alasannya, saat itu, mereka tidak mempercayai lagi kemampuan M-16 yang dilaporkan sering “jamming” atau tidak lancar dalam mengeluarkan peluru. Banyak pasukan Amerika yang ditemukan meninggal dengan senjata mereka dalam kondisi tidak berfungsi. Itulah sebabnya, banyak tentara Amerika selalu mengambil AK-47 dari tentara Vietnam yang tertembak dan menggantikan M-16 mereka.

Amerika juga secara intensif menggunakan AK-47 pada perang Afghanistan di pertengahan tahun 80-an. Di sinilah AK-47 mulai menyebar ke seluruh dunia ketika Uni Soviet mulai jatuh. Amerika melalui CIA menyalurkan ratusan ribu senjata AK-47 yang kebanyakan datang dari Cina kepada pasukan Afghanistan. Sebagaimana CIA mengirim AK-47 ke Afghanistan, CIA juga melakukan hal yang sama di Nicaragua pada awal tahun 1980-an untuk melawan pemberontak Sandinista yang didukung oleh Uni Soviet. Setelah kehancuran Uni Soviet, penyebaran AK-47 benar-benar di luar kendali. Di beberapa belahan dunia seperti Afghanistan, Pakistan, Liberia, Rwanda, dan negara-negara sangat miskin di benua Afrika dimana perang antar suku terjadi di mana-mana, AK-47 menjadi semacam simbol kebudayaan. AK-47 bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Afrika bahkan di beberapa wilayah, AK-47 dinamakan sebagai “African credit card” dimana “you could not leave home without it.” Di

Amerika Latin, AK-47 banyak digunakan para pedangar obat terlarang dan pemberontak anti pemerintah.

Indonesia pun tidak ketinggalan memanfaatkan senjata yang kini sudah banyak mengalami modifikasi dan varian ini. Pada tahun 60-an beberapa pasukan elit Indonesia seperti Kopasgat (kini, Pas-khas), KKO (Marinir), dan RPKAD (Kopassus) juga memakainya dalam ajang konfrontasi dengan Malaysia, penumpasan G30S/PKI, penumpasan PGRS/Paraku, dan di awal operasi Timor Timur. Bahkan pernah tersiar cerita, pasukan yang diterjunkan dalam Operasi Seroja pernah menolak M16 dan tetap menggunakan AK-47. Selain TNI, Polri juga pengguna setia. Mereka memakainya sejak tahun 70-an.

Sejarah penciptaan AK-47 bermula pada tahun 1941. Seorang prajurit lokal bernama Mikhail Timofeyevich Kalashnikov yang ketika itu berusia 21 tahun harus dirawat di rumah sakit karena *tank*-nya terkena tembakan artileri dari pasukan Jerman. Selama dirawat di rumah sakit, Mikhail Kalashnikov terobsesi untuk membuat sebuah senjata yang dapat mengusir pasukan Jerman dari kampung halamannya. Akhirnya pada tahun 1947,

Avtomat Kalashnikov (AK-47) diperbolehkan untuk pertama kalinya diproduksi secara massal. Akhir tahun ‘50-an Uni Soviet mulai menggunakan AK-47 untuk menyebarkan pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Dibandingkan dengan senjata buatan Amerika M-1 dan M-14, AK-47 terbukti lebih superior. AK-47 terbukti lebih tahan banting dan mampu bekerja dengan sangat baik di berbagai kondisi. Hal ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas perbaikan senjata. Uni Soviet memberikan lisensi gratis kepada negara-negara kiri seperti Bulgaria, Cina, Jerman Timur, Honggaria, Korea Utara, Polandia, dan Yugoslavia.

Tahun ini genap 60 tahun, AK-47 digunakan di atas muka bumi ini. Untuk menghormati Mikhail Kalashnikov yang masih terlihat segar bugar pada usia 87 tahun, pemerintah Rusia menyelenggarakan perayaan istimewa di Museum Pusat Pasukan Bersenjata Rusia di Moskow 6 Juli lalu. Hingga kini, senjata tersebut telah diproduksi lebih dari 100 juta pucuk dalam berbagai model di seluruh dunia. Berkas senjata kreasi Kalashnikov, Rusia memperoleh pendapatan EUR 1,47 miliar (sekitar Rp 18 triliun) setiap tahun. ■ MLP



Mikhail Timofeyevich Kalashnikov

Timnas Bangkitkan Nasionalisme

Meskipun gagal maju ke babak perempat final, timnas mengukir kebanggaan buat bangsa Indonesia.

Babak penyisihan Piala Asia telah berakhir Rabu (18/7). Delapan tim akhirnya dipastikan maju ke babak kedua putaran final. Dari grup A, Irak maju sebagai juara grup dan Australia *runner up* grup dengan nilai 5 dan 4. Sebenarnya, Thailand juga memiliki nilai 4, sama dengan Australia. Namun, tuan rumah itu kalah dalam selisih gol, dimana Australia berhasil memasukkan 6 gol dan memasukkan 4 gol sedangkan Thailand hanya berhasil memasukkan 3 gol dan memasukkan 5 gol. Sementara Oman yang juga berlaga di grup A hanya berhasil mengumpulkan nilai 2 dari dua kali seri.

Di grup B, Jepang dan tuan rumah Vietnam maju ke babak perempat final dengan nilai 7 dan 4. Sedangkan dua negara lainnya, Uni Emirat Arab dan Qatar hanya meraih nilai masing-masing 3 dan 2.

Dari grup C, Iran dan Uzbekistan maju ke perempat final sebagai juara dan *runner up* grup dengan nilai 7 dan 6. Sementara China hanya meraih nilai 4, dan tuan rumah Malaysia tidak memiliki nilai sama sekali.

Di grup D yang berlaga di Indonesia, juara tiga kali Piala Asia, Arab Saudi masuk delapan besar sekaligus juara grup dengan nilai 7, dan Korea Selatan menjadi *runner up* dengan nilai 4. Sementara Bahrain dan Indonesia yang hanya meraih nilai 3 harus rela sampai di babak penyisihan saja. Dengan hasil itu, dari empat negara ASEAN yang menjadi tuan rumah bersama Piala Asia 2007 ini, hanya Vietnam yang berhasil maju ke

babak berikutnya, babak perempat final.

Pada perempat final nanti, Irak akan berhadapan dengan Vietnam sedangkan Jepang berhadapan Australia. Di grup C dan D, Iran akan berhadapan dengan Korea Selatan, sedangkan Arab Saudi.

Timnas Indonesia

Bagi Tim Nasional Indonesia, ungkapan 'Kegagalan adalah sukses yang tertunda', barangkali pas diberikan untuk mereka. Meskipun gagal membuat sejarah baru, maju ke babak perempat final, namun timnas mengukir kebanggaan buat bangsa dalam pesta sepakbola terakbar se Asia kali ini.

Sejak awal, Indonesia memang pantas bangga karena dipercaya bersama Thailand, Vietnam, dan Malaysia jadi tuan rumah Piala Asia 2007. Di samping menggelar laga penyisihan Grup D, semakin membanggakan lagi ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah di ajang puncak, tanggal 29 Juli nanti.

Namun yang paling membanggakan dari semuanya itu adalah bangkitnya nasionalisme masyarakat melihat perjuangan tim nasional yang berusaha menegakkan Merah Putih setinggi mungkin di mata dunia. Kecintaan masyarakat nyata setiap kali pasukan Merah Putih berlaga di lapangan hijau. Puluhan ribu pecinta tim Merah Putih rela antri berjam-jam membeli tiket agar bisa menyaksikan tim kesayangannya secara langsung di lapangan hijau. Petugas kepolisian pun harus bersusah payah menenangkan mereka yang tidak bisa masuk



Para penonton, baik yang penggila bola maupun 'musiman', turut merasakan kebanggaan

stadion karena tidak kebagian tiket.

Semangat dan kebanggaan itu tidak hanya terasa di se-

kitar lingkungan Gelora Bung Karno tapi di setiap pelosok negeri, dari kawasan elite di Jakarta sampai ke pedesaan.

Sampras dan Sanchez-Vicario Mas

Pete Sampras, petenis yang mencatatkan namanya sebagai pemegang rekor pengoleksi gelar grand slam terbanyak (14 gelar) dan pemegang empat gelar grand slam Arantxa Sanchez-Vicario masuk ke International Tennis Hall of Fame di Newport, Rhode Island, Sabtu (14/7). Sampras juga memegang rekor sebagai petenis yang menempati

posisi satu dunia terlama (286 pekan), termasuk 102 pekan secara berturut-turut antara 15 April 1996 sampai 30 Maret 1998 dan mengakhiri musim sebagai petenis nomor satu dunia selama enam tahun beruntun (1993-1998). Selama 15 tahun berkarir, ia merebut 64 gelar tunggal dan melaju ke final dalam 24 turnamen tambahan. Gelar grand slam



foto: berindo wilson

an melihat perjuangan yang ditunjukkan Timnas.

bentar di stasiun atau terminal-terminal, berdiri berge-rombol di depan toko elektronik hanya untuk menyaksikan Timnas sedang berlaga melalui televisi. Di kompleks perumahan, di gang-gang hunian padat, juga di pedesaan, warga sengaja mengeluarkan televisi ke halaman, juga hanya untuk ramai-ramai menyaksikan laga Timnas nasional. Di kantor-kantor, di warung kopi, Timnas sepakbola juga menjadi pembicaraan.

Doa dan dorongan mengalir dari segenap warga Indonesia, mulai dari masyarakat kecil sampai pejabat tertinggi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga seakan berlomba memberi dorongan pada tim, baik saat sesi latihan maupun saat pertandingan.

Simpatinya dari masyarakat itu memang tak lepas dari langkah Timnas pada laga pertama melawan Bahrain yang cukup membanggakan. Saat itu Indonesia bisa memetik angka penuh dengan skor 2-1. Kemudian pada laga kedua, walaupun harus mengalami kekalahan 1-2 dari Arab Saudi, namun Timnas nasional tidak begitu mengecewakan. Arab Saudi yang merupakan salah satu raksasa sepakbola Asia sempat dibuat kerepotan sampai menit-menit terakhir, sebelum dewi keberuntungan akhirnya memilih berpihak pada negara dari jazirah Arab itu pada menit *injury time*. Menurut pendapat beberapa pihak, wasit yang memimpin

pertandingan saat itu beberapa kali melakukan kesalahan yang merugikan Timnas Indonesia. Kemudian pada laga penentuan, saat berhadapan dengan tim raksasa sepakbola Asia lainnya, Korea Selatan, permainan Ponaryo Astaman cs juga tidak terlalu buruk. Dalam permainan 'hidup-mati' kedua tim itu, Timnas hanya kalah tipis 0-1.

Begitu gigihnya perjuangan yang ditunjukkan para pemain, sehingga tidak ada yang menghujat Timnas, sekalipun harus berhenti sampai di babak penyisihan. Bahkan beberapa kalangan menyebutkan, Timnas kali ini adalah tim terbaik dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Petinggi PSSI sendiri juga mengatakan, tidak akan mengganti tim dan pelatih Ivan Venkov Kolev asal Bulgaria itu, paling tidak sampai pra piala dunia nanti. "Apa yang mereka perlihatkan sudah luar biasa. Tim dan pelatih akan dipertahankan hingga Pra Piala Dunia nanti," kata Ketua PSSI Nurdin Halid. Barangkali kita juga setuju dengan rencana tersebut. Apa yang diperlihatkan tim dan pelatih pada penyisihan Piala Asia ini hendaknya menjadi awal yang baik bagi persepakbolaan nasional. Ke depan, Indonesia diharapkan bisa menunjukkan diri sebagai salah satu negara besar melalui olahraga terpopuler di dunia itu. Dorongan dari masyarakat Indonesia tidak kurang besar untuk mendukung itu. Hal tersebut sudah dibuktikan pada perhelatan Piala Asia 2007 ini. ■ MS

Brasil Bersinar

Walau tanpa pasukan terbaik, bahkan sempat didera kekalahan pada pertandingan perdana, Brasil akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai tim terbaik di Amerika Selatan dengan menjuarai Copa America 2007. Argentina yang berambisi besar menebus kegagalannya tiga tahun lalu di Peru, saat mereka dikalahkan Brasil lewat adu penalti, akhirnya harus bertekuk lutut juga untuk kedua kalinya terhadap tim Samba Brasil. Kemenangan Brasil 3-0 atas Argentina pada final Copa America 2007, ini mengantarkan Brasil menambah koleksi gelarnya yang ke delapan di turnamen antarnegara Amerika Selatan, yang sebelumnya pernah diraih pada tahun 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999 dan 2004. Brasil yang berlaga di Venezuela tanpa diperkuat semua pemain-pemain bintangnya Ronaldinho, Kaka, Lucio, Ronaldo, Ze Roberto dan Adriano, serta dengan susah payah mencapai final, akhirnya bisa membuktikan kalau mereka tetap tim terbaik di kawasan Amerika Selatan. Sementara Argentina yang sudah 14 kali menjuarai Copa America ini, dan bermain begitu impresif sejak babak penyisihan grup, belum bisa mengakhiri kebuntuan mereka meraih gelar sejak 1993. Pasca pertemuan Brasil dan Argentina di final Copa America, berita gembira datang dari organisasi sepakbola dunia (FIFA). Berdasarkan pemeringkatan FIFA, Brasil yang sebelumnya berada di peringkat 3 dunia berhasil menggeser posisi juara Piala Dunia 2006 Italia di peringkat 1. Sedangkan Argentina melompat dari posisi 4 ke 2, bertukar posisi dengan Prancis. Amerika Serikat yang memenangi Piala Emas (Gold Cup) naik dua peringkat menjadi posisi 14. The Sam's Army bisa saja naik lebih tinggi lagi, sayangnya mereka kalah tiga kali di Copa America. Sedangkan Jerman, Belanda, Kroasia, Portugal, Spanyol, serta Meksiko melengkapi peringkat dalam deretan Top 10. Meksiko naik dari posisi 26 ke 10, menyusul hasil bagus sebagai *runner up* Piala Emas serta peringkat 3 Copa America. Inggris turun dari posisi 8 ke 12. ■ RIF



suk "Hall of Fame"

yang dikoleksinya terdiri atas tujuh gelar Wimbledon, dua gelar Australia Terbuka dan lima gelar AS Terbuka. Sementara itu, Sanchez-Vicario merebut tiga gelar Roland Garros (1989, 1994, 1998) dan pada 1994 menjadi petenis Spanyol pertama yang memenangi AS Terbuka. Ia juga merebut enam gelar ganda dan empat gelar ganda campuran di grand slam.

Petenis lain yang juga masuk ke Hall of Fame ialah petenis Swedia pertama yang merebut gelar grand slam, Sven Davidson dan fotografer tenis Russ Adams. International Tennis Hall of Fame, diakui pada 1986 sebagai Hall of Fame resmi di bidang olahraga oleh Federasi Tenis Internasional, telah memasukkan 204 nama yang mewakili 18 negara. ■ MLP

Antara Kura-kura dan Salmonella



Bayi kura-kura ternyata mengandung bakteri Salmonella.

Bayi kura-kura menyebabkan penyakit serius terhadap anak-anak.

Di pinggir jalan pasar Jatinegara yang ramai tampak toples-toples plastik berisi bayi kura-kura. Para penjualnya duduk di emperan menunggu pembeli. Beberapa orang dengan membawa anaknya mampu dan membeli seekor dua ekor lengkap dengan kandangnya yang berbentuk

toples persegi. Harganya tak lebih dari Rp 30.000.

Di Indonesia, penjualan hewan kecil ini cukup menarik minat. Pembelinya kebanyakan anak-anak, untuk dipelihara di rumah. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa bayi kura-kura mengandung bakteri yang berbahaya bagi manusia.

Di Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 5 Juli lalu mengumumkan bahwa kura-kura bukanlah hewan peliharaan yang aman.

Diberitakan harian *Jurnal Nasional* (10/7), kotoran pada bayi kura-kura ternyata mengandung bakteri Salmonella, bakteri ini diberitakan telah

menyebabkan kematian seorang bayi berumur empat minggu di Florida, AS. Kasus itu terjadi awal tahun ini. Dalam penyidikannya, CDC menemukan terjadi peningkatan angka penjualan bayi kura-kura. Padahal hukum federal 1975 secara tegas melarang pemeliharaan hewan ini.

Ketika Food and Drug Administration (FDA) juga mengumumkan bahwa bayi kura-kura tidak aman dipelihara di rumah dan menyebabkan penyakit serius terhadap anak-anak, masyarakat AS mulai menyadari bahayanya.

Salmonella adalah bakteri penyebab penyakit serius di negeri Paman Sam tersebut. Bakteri ini mampu bertransformasi ke dalam tubuh manusia, ketika melakukan kontak langsung dengan bayi kura-kura. Bakteri ini biasanya berkoloni dengan kura-kura, termasuk dalam kotoran hewan ini.

Sejak 2006-2007, CDC menemukan 15 orang yang terinfeksi strain baru Salmonella. Di mana 80 persen di antaranya melakukan kontak langsung dengan bayi kura-kura, seminggu sebelum dinyatakan terinfeksi.

Sebanyak 1,4 juta penduduk AS menderita infeksi nontypoid yang menyebabkan 15 ribu orang dirawat di rumah sakit dan 400 orang meninggal, diantaranya bayi berumur empat minggu itu. Gejalanya demam dan infeksi akut, bahkan pemberian antibiotik tidak dapat menyelamatkan nyawanya. ■ RH

Anggaran Cekak Untuk Si Miskin

Bukan rahasia lagi bahwa banyak warga mampu yang memanipulasi data agar mendapatkan Askeskin. Namun mulai 1 Juli tahun ini, ada beberapa perubahan dalam aturan Askeskin yang membuat kecurangan semacam itu bisa dicegah.

Seperti dilaporkan *Gatra*, 5-11 Juli 2007, data peserta Askeskin akan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Warga yang mengajukan Askeskin akan dicocokkan dengan data BPS. Jika cocok, baru akan disetujui.

Peraturan baru lainnya adalah dihapusnya ketentuan surat keterangan dokter yang dikenal protokol terapi. Sehingga, obat-obatan

rujukan dokter yang tidak tercantum dalam Askeskin tak akan dilayani. Dalam hal ini pemerintah hanya membatasi obat-obat tertentu bagi penyakit kanker, jantung, diabetes dan lain-lain.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Departemen Kesehatan Ida Bagus Indra Gotama, pembatasan itu perlu dilakukan karena banyak obat baru bermunculan dan dianjurkan pabrik obat. Harganya mahal padahal khasiatnya tak jauh beda. Pedoman Askeskin 2007 mencantumkan 358 jenis obat yang ditanggung pemerintah. Lebih sedikit dibanding jenis obat dalam Askeskin 2006.

Pembatasan obat ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak rumah sakit. Peraturan tersebut membuat pelayanan di rumah sakit terjepit. Di satu sisi pasien tidak boleh dikenai biaya sepeser pun, di sisi lain mereka tak boleh memberi obat selain di daftar. Padahal, dokter punya standar baku pengobatan dan reaksi obat terhadap tubuh pasien berbeda-beda.

Pemangkasan jumlah obat ternyata terkait dengan anggaran. Menurut Indra Gotama, jumlah peserta Askeskin terus meningkat setiap tahun, namun anggaran APBN untuk Depkes tak bertambah. ■ RH

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY